

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020

Kerjasama



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

dengan



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2020



Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Indeks Gini dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai tertinggi se-Indonesia. Oleh karena itu analisis ketimpangan pendapatan antar penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk dilaksanakan. Pada analisis ini pendapatan masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk. Selain Indeks Gini pada analisis ini juga digunakan ukuran dengan kriteria Bank Dunia dan Indeks Palma.

Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun hasil kerjasama Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berisi analisis ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015-2019. Langkah ini sebagai upaya mendapatkan gambaran lebih rinci distribusi pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian analisis ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Oktober 2020

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Dr. Heru Margono, M.Sc



KATA SAMBUTAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan data dan indikator statistik sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan di daerah. Data dan indikator-indikator ekonomi dan sosial yang terpercaya dapat digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang, apalagi pengaruh yang ada dengan adanya pandemi Covid-19.

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta”, sebagai produk kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis ini menjadi salah satu bahan pijakan untuk menyusun kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk monitoring dan evaluasi serta rumusan perencanaan pembangunan. Dampak lain dari hasil analisis ini adalah bermanfaat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Oktober 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Drs. Beny Suharsono, M.Si



DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	iii
<u>KATA SAMBUTAN</u>	v
<u>DAFTAR ISI</u>	vii
<u>DAFTAR TABEL</u>	ix
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xii
<u>1 PENDAHULUAN</u>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Ruang Lingkup Analisis	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
1.5. Referensi Hukum	5
<u>2 TINJAUAN PUSTAKA</u>	9
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
2.2. Definisi Pembangunan	11
2.3. Distribusi Pendapatan/Pengeluaran	11
2.4. Konsep Kesenjangan	12
2.5. Ukuran-ukuran Tingkat Kesenjangan	12
2.5.1. Indeks Gini dan Kurva Lorenz	14
2.5.2. Kriteria Bank Dunia	15
2.5.3. Indeks Palma	16
<u>3 METODE PENELITIAN</u>	19
3.1. Sumber Data	19
3.2. Metode Analisis	19
3.2.1. Indeks Gini	19
3.2.2. Kriteria Bank Dunia	21
3.2.3. Indeks Palma	22
<u>4 GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</u>	27
4.1. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta	27
4.2. Keadaan Perekonomian D.I. Yogyakarta	33
4.3. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga pada PDRB	39
4.4. Kemiskinan di D.I. Yogyakarta	44
<u>5 HASIL DAN PEMBAHASAN</u>	55
5.1. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Persentil/Desil/Kuantil	56
5.2. Perkembangan Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran dan Persentil/Desil/Kuantil	58
5.3. Karakteristik Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran	62

5.3.1. Pendidikan	63
5.3.2. Kesehatan	65
5.3.3. Lapangan Usaha	73
5.4. . Analisis Ketimpangan	75
5.4.1. Gini Rasio dan Kurva Lorenz	75
5.4.2. Kriteria Bank Dunia	79
5.4.3. Indeks Palma	80
5.5. Variasi Ketimpangan	81
5.5.1. Perkotaan dan Perdesaan	81
5.5.2. Kabupaten/Kota	85
5.6. Identifikasi Penyebab Ketimpangan	89
5.7. Identifikasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketimpangan	103
5.7.1. Ketimpangan Pada Masa Awal Pandemi Covid-19	
5.7.2. Kondisi Ketenagakerjaan	105
5.8. Keterkaitan Tingkat Ketimpangan dengan Tingkat Kemiskinan	107
5.8.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan	108
5.8.2. Pengeluaran Rumah Tangga Bukan Makanan	109
6 KESIMPULAN DAN SARAN	113
6.1. Kesimpulan	113
6.2. Saran	115

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 – 2019	27
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019	28
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta, 2018	29
Tabel 4.4 Perubahan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta, 2018 – 2019 (persen)	30
Tabel 4.5. Indikator Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019	31
Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2109	31
Tabel 4.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019	32
Tabel 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kotase-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)	35
Tabel 4.2.2. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2015-2019	37
Tabel 4.2.3 Perkembangan PDRB Perkapita D.I. Yogyakarta, 2015-2019	39
Tabel 4.3.1 Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY, 2015-2019	40
Tabel 4.3.2 Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015–2019	42
Tabel 4.3.2 Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015–2019	43
Tabel 4.4.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019	50
Tabel 4.4.2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019	50
Tabel 5.1.1 Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta, 2015-2019	56
Tabel 5.1.2 Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten Kota, 2015-2019	57
Tabel 5.2.1 Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil di D.I. Yogyakarta (Rupiah), 2015-2019	58
Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Kuantil dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, 2019	59

Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Kuantil dan abupaten/Kota di D.I Yogyakarta, 2019	60
Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kuantil di D.I. Yogyakarta, 2019	61
Tabel 5.3.1 Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Desil Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019	63
Tabel 5.3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018	64
Tabel 5.3.3 Persentase Penduduk Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019	65
Tabel 5.3.2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil,	66
Tabel 5.3.2.2 Persentase Penduduk yang Rawat Jalan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Fasilitas Kesehatan, 2019	67
Tabel 5.3.2.3 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Fasilitas Kesehatan, 2019	68
Tabel 5.3.2.3 Persentase Penduduk yang Rawat Jalan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Jaminan Kesehatan yang digunakan,	69
Tabel 5.3.2.4 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Jaminan Kesehatan yang digunakan,	70
Tabel 5.3.2.5 Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Indikator Perumahan, 2019	71
Tabel 5.3.2.7 Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Derajat Ketahanan Pangan, 2019	72
Tabel 5.3.4 PDRB ADHB, Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019	74
Tabel 5.3.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Kuantil Kelompok Pengeluaran Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019	75
Tabel 5.4.2.1. Distribusi Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2015 – 2019 (Persen)	79
Tabel 5.5.1.1. Distribusi Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran dan Wilayah, Maret 2015 – Maret 2019 (Persen)	83
Tabel 5.5.1.2. Indeks Palma Menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019	84
Tabel 5.5.1 Gini Rasio di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 -2019	86
Tabel 5.5.2 Persentase Pengeluaran oleh Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019	87
Tabel 5.5.1 Indeks Palma di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 -2019	89
Tabel 5.6.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2019 di D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)	90
Tabel 5.6.2. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK di D.I. Yogyakarta, 2015-2019	93
Tabel 5.6.3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di D.I. Yogyakarta (milyar rupiah), 2015-2019	97

Tabel 5.6.4. Analisis Regresi Linier Data Panel Indeks Gini dan Variabel Pengaruh Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015-2019	102
Tabel 5.7.1. Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY dan Indonesia, Maret 2019 - Maret 2020	103
Tabel 5.8.1. Pengeluaran Konsumsi Menurut Jenis Pengeluaran Makanan dan Kategori Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, 2019 (Rupiah per kapita per bulan)	109
Tabel 5.8.2. Pengeluaran Konsumsi Menurut Jenis Pengeluaran Bukan Makanan dan Kategori Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, 2019 (Rupiah per kapita per bulan)	110

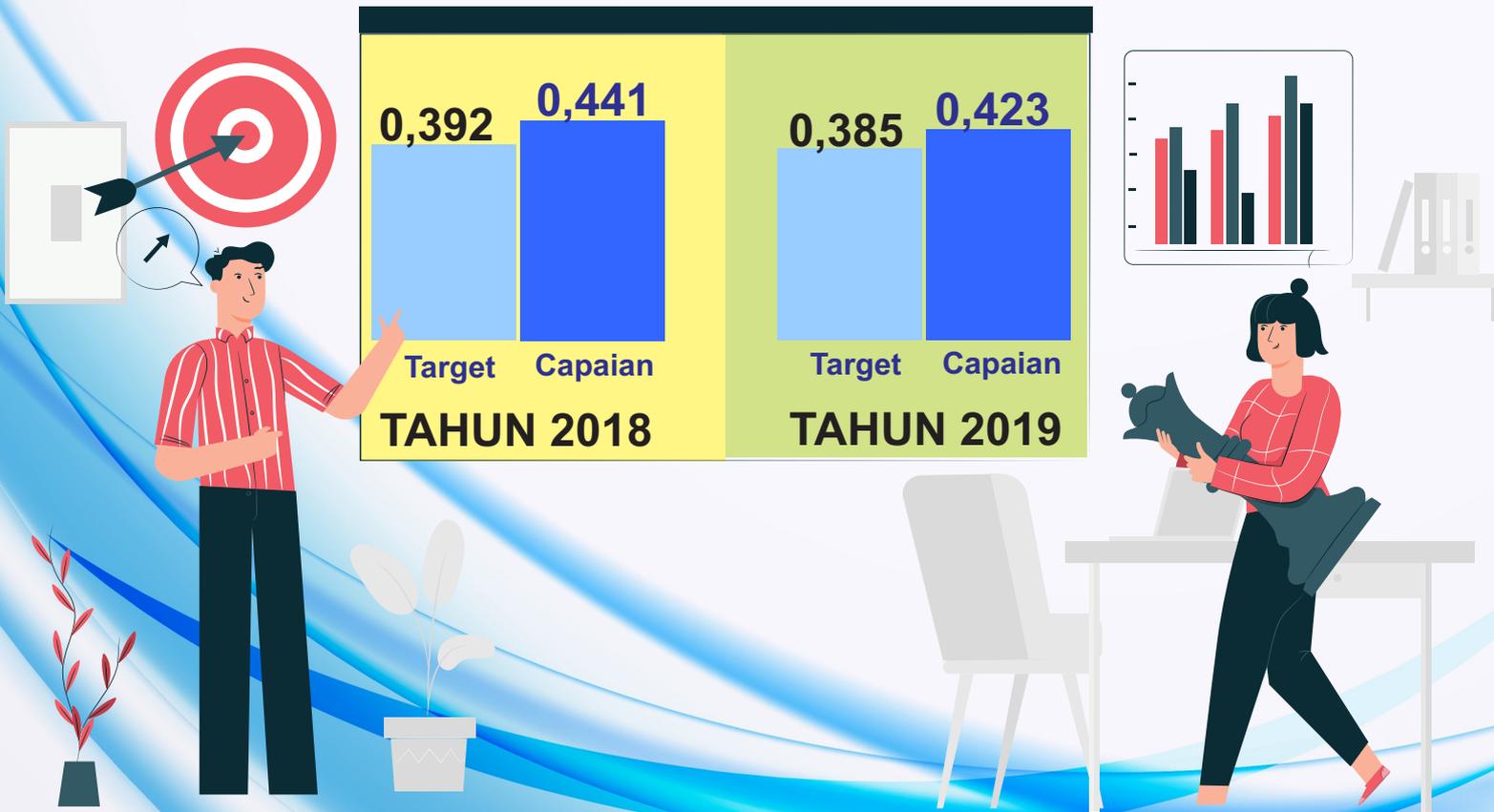
DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Perbandingan Capaian dan Target Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2019	2
Gambar 2.1 Kurva U-terbalik	9
Gambar 2.2 Contoh Kurva Lorenz	15
Gambar 3.1 Kurva Lorenz	20
Gambar 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta dan Indonesia, 2015-2019 (persen)	34
Gambar 4.2.2 Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Indonesia, 2015-2019 (persen)	36
Gambar 4.2.3 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta (persen), 2019	38
Gambar 4.3.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2015-2019	41
Gambar 4.4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019	45
Gambar 4.4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019	45
Gambar 4.4.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 – 2019	46
Gambar 4.4.4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 – 2019 (Ribu)	47
Gambar 4.4.5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 – 2019	49
Gambar 5.4.1.1. Perkembangan Gini Rasio D.I. Yogyakarta dan Indonesia, Maret 2015 – Maret 2019	76
Gambar 5.4.1.2. Kurva Lorenz D.I. Yogyakarta 2015 dan 2019	78
Gambar 5.4.3.1 Perkembangan Indeks Palma di D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2019	81
Gambar 5.5.1.1. Perkembangan Gini Rasio di Perdesaan dan Perkotaan D.I. Yogyakarta, Maret 2015 – Maret 2019	82
Gambar 5.5.1 Perkembangan Proporsi Pengeluaran untuk 40 Persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019	88
Gambar 5.6.1. IPM Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018-2019	101
Gambar 5.7.1. Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah di D.I. Yogyakarta, Maret 2019-Maret 2020	104
Gambar 5.8.1. Persentase Penduduk Miskin, Indeks Palma, dan Indeks Gini D.I. Yogyakarta Tahun 2015 -2019	107

TUJUAN ANALISIS KETIMPANGAN DI D.I. YOGYAKARTA



KETIMPANGAN PENDAPATAN D.I YOGYAKARTA





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dua masalah yang umum dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, dan masih menjadi isu penting untuk diatasi.

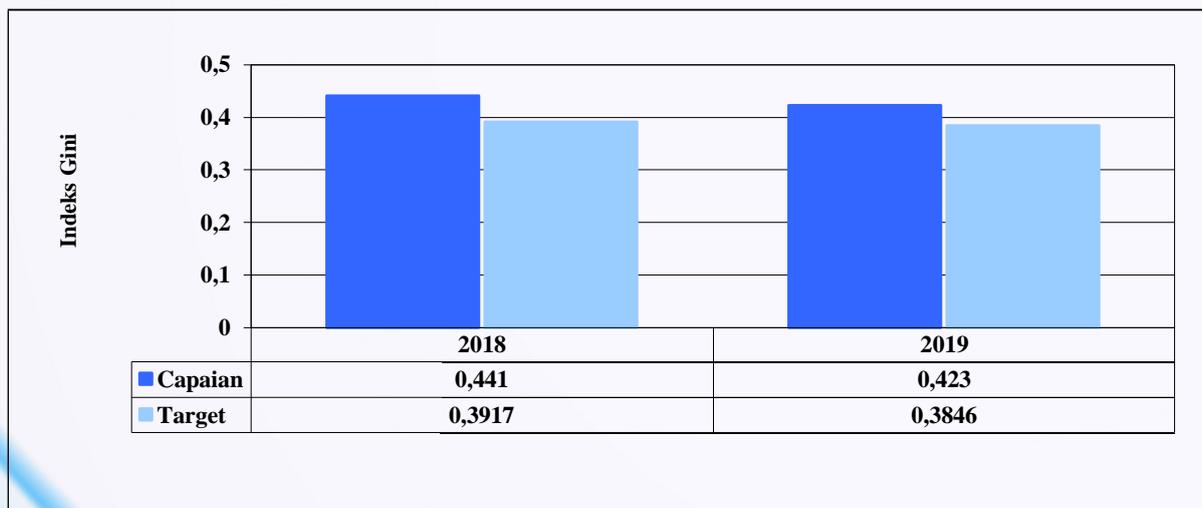
Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses yang hasilnya bersifat multidimensional, yang mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan diperlukan. Masalah ketimpangan perlu menjadi fokus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk secara utuh. Salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan di antara berbagai golongan ekonomi masyarakat. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh penduduk D.I. Yogyakarta. Peran masyarakat yang terlibat dalam pembangunan harus diperluas seiring dengan peningkatan kualitas hidup penduduk, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati lebih merata.

Kemiskinan dan ketimpangan tidak saja terjadi di pedesaan atau pertanian (*rural*) tetapi juga di perkotaan. Masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkembang, akan tetapi adanya persoalan distribusi pendapatan yang belum merata dapat menimbulkan masalah yang lebih besar saat ini maupun di masa datang. Hasil penghitungan

indeks gini oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2019 menunjukkan bahwa indeks gini D.I. Yogyakarta sebesar 0,423 adalah tingkat kesenjangan terbesar di Indonesia. Untuk itu, jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah keadaan perekonomian D.I. Yogyakarta ke depan. Karena itu analisis kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran antar golongan masyarakat atau antar wilayah perlu dilakukan.

Isu ketimpangan pendapatan menjadi salah satu target Indeks Kinerja Utama Kepala Daerah D.I. Yogyakarta yang diamanatkan dalam RPJMD 2017 – 2022. Pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini ditargetkan mencapai 0,3635. Perbandingan selama dua tahun awal masa RPJMD 2017 – 2022 (2018 sampai 2019) menunjukkan bahwa capaian Indeks Gini tidak mencapai target seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Ketidaktercapaian target ketimpangan pendapatan selama dua tahun awal RPJMD hendaknya menjadi pertimbangan untuk melakukan intervensi yang lebih tepat agar target indikator tersebut di akhir RPJMD dapat tercapai.

Gambar 1.1. Perbandingan Capaian dan Target Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2019



Ketimpangan pendapatan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi yaitu mampu mendorong kinerja, termasuk dalam memberikan dukungan investasi sumber daya manusia, mendorong pengambilan keputusan berisiko, serta keputusan untuk melakukan investasi. Sisi negatifnya, ketimpangan memunculkan demotivasi, ketegangan sosial, dan gangguan keamanan, serta penurunan permintaan yang bisa mengerem pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Meskipun perekonomian D.I. Yogyakarta terus berkembang, akan tetapi adanya persoalan distribusi pendapatan yang belum merata dapat menimbulkan masalah pada saat ini maupun di masa datang.

Monitoring dan evaluasi capaian berbagai hasil pembangunan saat ini menjadi pembahasan utama di berbagai wilayah. Pembahasan tersebut berawal dari pentingnya upaya mensinkronkan antara pencapaian indikator-indikator perekonomian dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberikan alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan yang dilakukan. Hasil evaluasi kinerja pembangunan diharapkan mampu merekomendasikan perubahan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup pesat pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Disamping itu juga ketimpangan kesempatan mereka (penduduk menurut golongan pengeluaran) terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasarnya (kesehatan dan pendidikan).

1.2. Maksud dan Ruang Lingkup Analisis

Maksud dari analisis ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta adalah untuk menyediakan hasil analisis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan D.I. Yogyakarta, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan yang ada.

Dalam kegiatan ini untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan selama lima tahun terakhir digunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai pendekatan. Hal ini disebabkan lebih mudah dan akurat mendapatkan informasi pengeluaran rumah tangga daripada data pendapatannya dan dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran konsumsi bisa menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat sehingga akan tergambar suatu perbandingan kesenjangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta.

1.3. Tujuan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan penduduknya. Oleh karena itu ke pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh semua lapisan penduduknya, Berbagai upaya eliminasi terhadap distorsi pembangunan dilakukan dengan mengetahui ketimpangan baik secara ekonomi maupun kesempatan.

Adapun tujuan analisis ketimpangan di D.I. Yogyakarta yaitu:

1. Menjelaskan distribusi pengeluaran menurut persentil selama lima tahun terakhir dan karakteristik jenis pengeluaran menurut persentil/desil/ kuantil.
2. Menganalisis variasi ketimpangan pengeluaran menurut wilayah perkotaan dan perdesaan selama lima tahun terakhir.
3. Menganalisis variasi ketimpangan pengeluaran menurut kabupaten/kota selama lima tahun terakhir.
4. Mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir.
5. Mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta.
6. Menganalisis keterkaitan antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun menjadi enam bab. Bab satu membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan ruang lingkup analisis, tujuan analisis sistematika penulisan, serta dasar pelaksanaan. Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan teori pertumbuhan ekonomi, definisi pembangunan, distribusi pendapatan, konsep kesenjangan, ukuran-ukuran

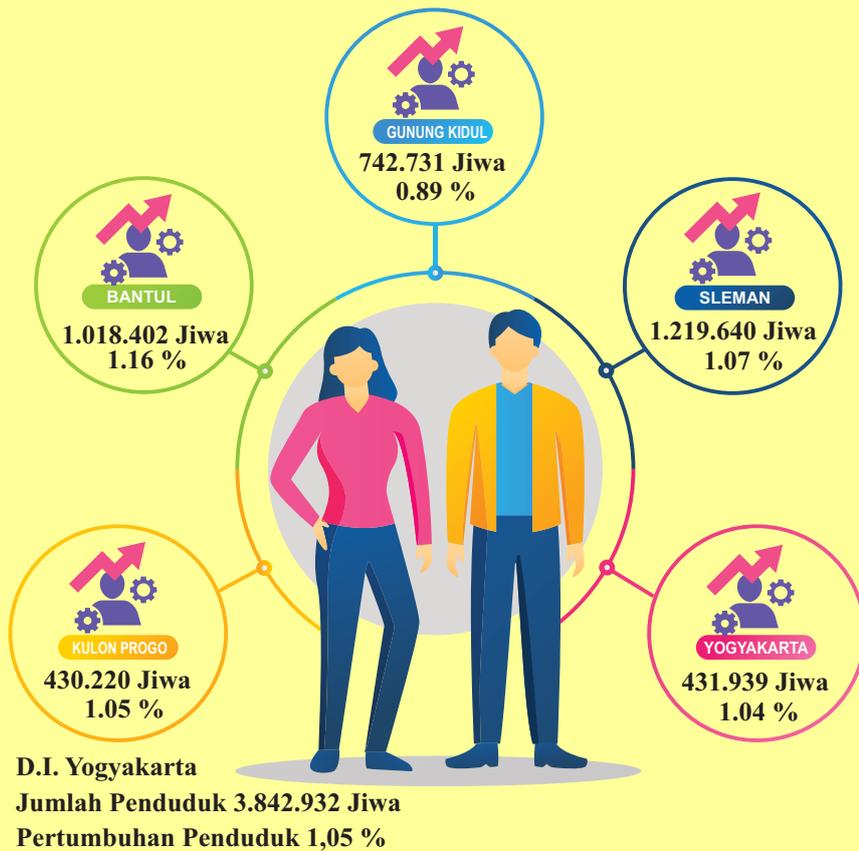
tingkat kesenjangan yang terdiri dari indeks gini dan kurva lorenz, kesenjangan menurut kriteria Bank Dunia, Palma Rasio/Indeks Palma. Bab tiga mendeskripsikan data yang digunakan dan metode analisis. Bab empat memberikan gambaran secara umum kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kondisi perekonomian, keadaan penduduk dan ketenagakerjaan, serta kemiskinan. Bab lima memaparkan hasil olahan data dan pembahasan mengenai kesenjangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini, dipaparkan karakteristik penduduk menurut kelompok pengeluaran terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lapangan usaha. Selain itu, dibahas juga hasil pengukuran kesenjangan berdasarkan Indeks Gini, Kriteria Bank Dunia, dan Indeks Palma. Selain itu juga dibahas identifikasi penyebab dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketimpangan. Bab terakhir adalah bab enam, berisi kesimpulan dan saran.

1.5. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai

Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 67 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan
Pusat Statistik Tahun Anggaran 2020;

JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA 2019



PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN KELOMPOK KUANTIL PENGELUARAN PER KAPITA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2019

01.KULON PROGO

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

Pertama	17,13
Kedua	14,90
Ketiga	19,08
Keempat	16,11
Kelima	32,77

02.BANTUL

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

Pertama	11,41
Kedua	13,54
Ketiga	19,49
Keempat	17,17
Kelima	38,38

03.GUNUNG KIDUL

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

Pertama	12,98
Kedua	14,80
Ketiga	24,73
Keempat	26,43
Kelima	21,06

04.SLEMAN

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

Pertama	6,36
Kedua	15,90
Ketiga	27,01
Keempat	23,24
Kelima	27,50

71.YOGYAKARTA

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

Pertama	12,86
Kedua	17,94
Ketiga	36,16
Keempat	20,48
Kelima	12,56

34.D.I YOGYAKARTA

Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita

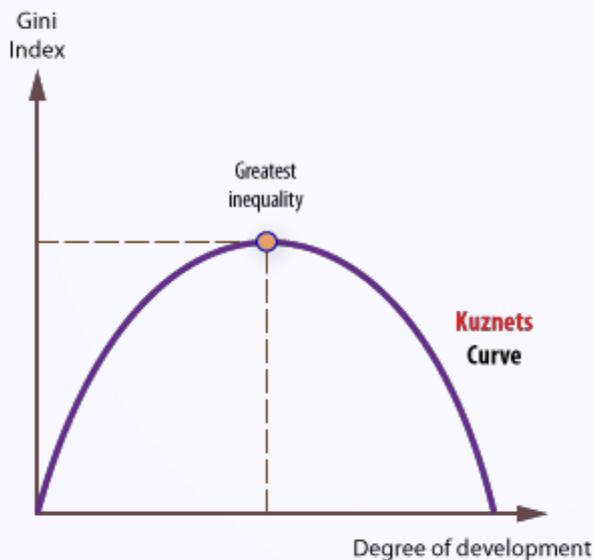
Pertama	11,14
Kedua	15,09
Ketiga	24,25
Keempat	21,17
Kelima	28,36



II. TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara pembangunan dan kesenjangan pendapatan telah menjadi fokus perhatian sejak lama. *Simon Kuznets* (1955) memprakarsai kajian dengan melihat korelasi antara kedua hal tersebut. Ray (1998) menuliskan bahwa Kuznets mendapatkan hubungan antara tingkat distribusi pendapatan dengan tingkat pembangunan ekonomi mengikuti pola seperti U-terbalik (*inverted-U curve*). Dengan demikian distribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2012)

Gambar 2.1 Kurva U-terbalik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disarikan bahwa pada awal perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah, pembangunan akan mendapatkan distribusi pendapatan dengan kesenjangan pendapatan semakin tinggi (diukur dengan indeks gini), tetapi seiring dengan semakin matangnya sebuah perekonomian, kesenjangan pendapatan tersebut akan menurun perlahan setelah melewati titik puncak. Harrod-Domar juga menyatakan untuk pertumbuhan yang tinggi diperlukan akumulasi modal (capital) melalui tabungan (saving). Komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dimotori oleh

kelompok masyarakat yang mampu menumpuk modal. Dengan demikian, pada tahap awal pertumbuhan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar, baru setelah “kue” pembangunan cukup besar mekanisme pemerataan secara otomatis berjalan melalui distribusi kesempatan kerja dan berusaha.

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Dimana pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara atau wilayah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dicetuskan Adam Smith dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Sedangkan dalam teori modern, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu investasi, pertumbuhan penduduk dan teknologi (Todaro, 2000). Sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal dan sumber daya manusia. Selanjutnya akan meningkatkan sumber daya produktif dan menaikkan produktivitas sumber daya melalui inovasi dan kemajuan teknologi.

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Boediono (2013) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut.

Menurut Mankiw (2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan bukan indikator lainnya. Alasan tersebut di antaranya bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian,

hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan

2.2. Definisi Pembangunan

Pembangunan dapat dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi yang ada di masyarakat, selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro dan Smith, 2006).

Proses pembangunan di masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara- bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.3. Distribusi Pendapatan/Pengeluaran

Dalam setiap proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara selalu dihadapkan pada masalah kesenjangan distribusi pendapatan, hal ini terjadi tidak saja di negara berkembang tetapi juga terjadi di negara maju. Di negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema

kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Kedua sama-sama penting. Pengutamakan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDB yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melakukan dan yang berhak menikmati hasil-hasilnya; kalangan elit kaya raya yang minoritas atautkah mayoritas rakyat yang miskin. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan pembagian antar kelompok dalam masyarakat, baik antar golongan pendapatan maupun antar daerah. Distribusi antar golongan pendapatan terdiri atas distribusi relatif dan absolut. Distribusi pendapatan relatif membandingkan pendapatan antar kelompok golongan pendapatan, sementara distribusi pendapatan absolut menganalisis batas pendapatan minimum yang layak diterima seseorang. Sedangkan distribusi antar daerah yang membandingkan pendapatan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu trade off yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan selalu disertai dengan memburuknya distribusi pendapatan atau terjadi kenaikan kesenjangan relatif.

2.4. Konsep Kesenjangan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber

daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva kuznet “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan

2.5. Ukuran-Ukuran Tingkat Kesenjangan

Di dalam melakukan analisa kesenjangan di suatu wilayah, kita memerlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat kesenjangan di suatu wilayah. Ada beberapa indeks yang diciptakan untuk mengukur kesenjangan di suatu wilayah, diantaranya Indeks Williamson, Atkinson, Gini Koefisien, Theil Indeks dan lain-lain, bahkan Bank Dunia menciptakan kriteria umum untuk membandingkan tingkat kesenjangan. Pada publikasi ini, digunakan Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan yang paling umum dipakai.

Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan, saat memilih ukuran kesenjangan, kita mengharapkan ukuran tersebut merupakan ukuran distribusi rumah tangga dalam ukuran tunggal (*single measure*). Menurut (Hindriks dan Myles, 2006), kriteria-kriteria bagi sebuah ukuran kesenjangan yang baik adalah sebagai berikut:

- ✓ **Tidak tergantung pada nilai rata-rata** (*mean independence*)
Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran kesenjangan seharusnya tidak berubah.
- ✓ **Dapat diperbandingkan**
Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat memberikan suatu angka ukuran kesenjangan yang dapat diperbandingkan, baik di dalam suatu daerah, interregional maupun secara intertemporal.

✓ **Sensitif terhadap transfer pendapatan**

Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat menangkap perubahan distribusi pendapatan ketika terjadi mekanisme transfer pendapatan dari rumah tangga berpendapatan tinggi ke rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah, walaupun total pendapatan masyarakat secara agregat tidak berubah. Sensitivitas terhadap transfer ini dikenal juga dengan "*Pigou- Dalton Principal of Transfer*".

Sementara kriteria tambahan bagi ukuran kesenjangan yang baik adalah:

✓ **Tidak tergantung jumlah populasi** (*population size independence*) Jika populasi berubah, ukuran kesenjangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).

✓ **Simetris**

Jika antar populasi bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran kesenjangan.

Dilihat dari kriteria-kriteria yang harus dimiliki indeks, Indeks Gini memenuhi kriteria-kriteria sebagai indeks yang mengukur kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

2.5.1. Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Ukuran kesenjangan ini juga memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan, namun demikian Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (*additively decomposable*). Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

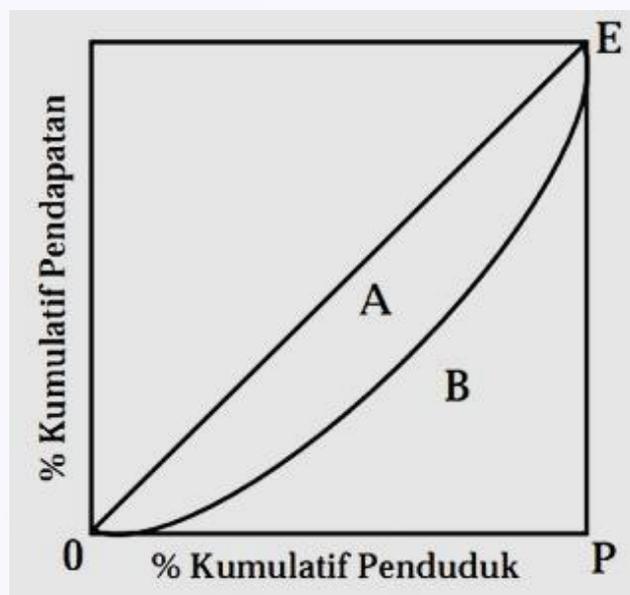
- a. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.

c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Secara visual, indeks Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gambar 2.2 Contoh Kurva Lorenz



Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke yang terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Indeks gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva lorenz. Semakin jauh jarak kurva lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat kesenjangannya semakin tinggi.

2.5.2. Kriteria Bank Dunia

Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

- ✓ Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah
- ✓ Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah
- ✓ Kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi.

Selanjutnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut Bank Dunia terpusat pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut **lebih kecil dari 12 persen**, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong “**tinggi**”.
- b. Bila kelompok tersebut **menerima 12 sampai 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**sedang**”.
- c. Bila kelompok tersebut **menerima lebih dari 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**rendah**”.

2.5.3. Indeks Palma

Indeks Palma adalah rasio pembagian pendapatan dari 10 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi terhadap pendapatan 40 persen penduduk pendapatan terendah. Indeks ini telah dikembangkan oleh Gabriel Palma berdasarkan pengamatan yang dilakukannya terhadap distribusi pendapatan menurut kelompok. Indeks ini didasarkan pada pengamatan bahwa ‘kelas menengah’ cenderung meraih sekitar 50 persen dari pendapatan nasional, tetapi sisa separuh dari pendapatan nasional dibagi antara 10 persen mereka yang terkaya dan 40 persen mereka yang termiskin. Cobhan dan Sumner (2013) berpendapat bahwa salah satu keunggulan dari rasio Palma adalah kemudahannya dalam diinterpretasikan. Selain itu, dengan memfokuskan pada kelompok teratas dan terbawah dalam distribusi pendapatan, maka indeks ini dapat menjadi indikator yang lebih relevan untuk kebijakan yang terkait dengan sejauh mana tingkat ketidaksetaraan di setiap negara, dan bisa jadi sangat relevan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

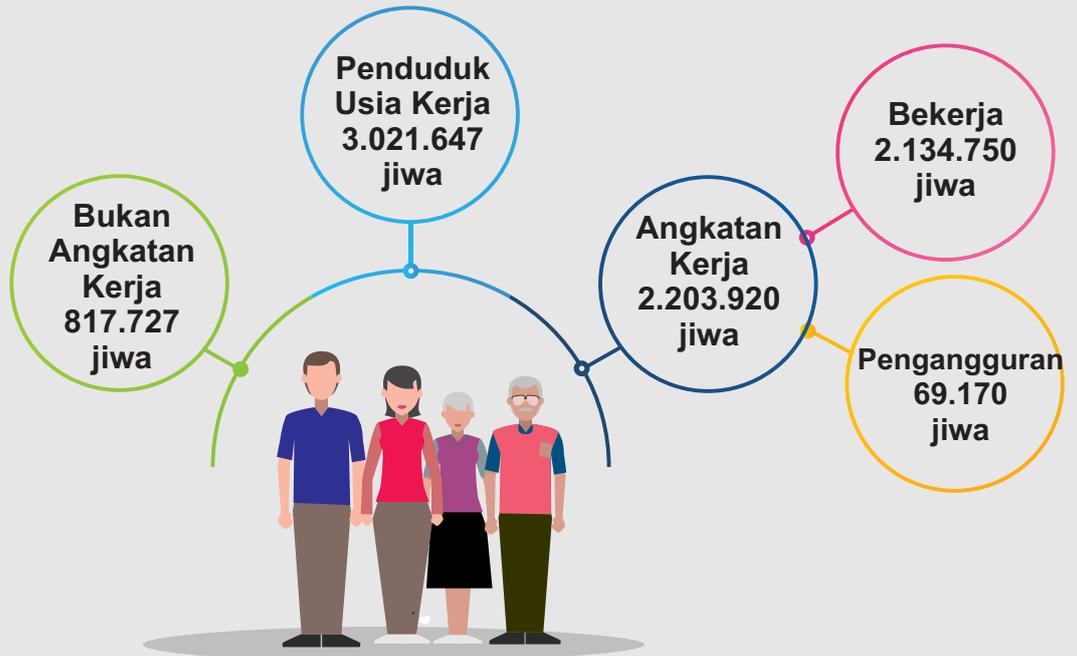
Jika indeks sebesar 0,25 berarti terjadi kesetaraan yang sempurna antara kelompok terkaya dan termiskin (Yusuf dalam Prastowo, dkk, 2014). Dengan kata lain, nilai indeks yang semakin mendekati 0,25 menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran atau pendapatan yang ada mendekati seimbang. Nilai indeks ini tidak mempunyai batasan maksimum. Semakin besar nilai Indeks Palma semakin besar disparitas antara penduduk terkaya dengan penduduk termiskin.

Salah satu keunggulan Indeks Palma adalah kemudahannya untuk diartikan. Jika nilai indeks ini adalah 2, maka berarti 10 persen kelompok terkaya menikmati dua kali lipat bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40 persen kelompok termiskin.

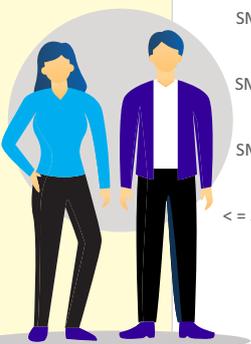
INDIKATOR KETENAGAKERJAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **72,94%**

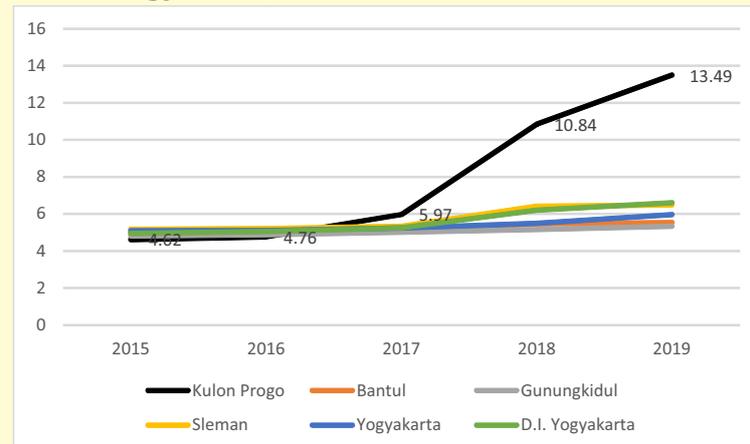
Tingkat Pengangguran Terbuka **3,14%**



Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan



Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019



Struktur Lapangan Pekerjaan Utama Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2019



Agustus 2019		Perubahan Distribusi Y-on-Y (Persen poin)	
Jumlah Penduduk Bekerja: 2.134,75 ribu Orang			
19.01%	Pertanian	-1.38	
18.96%	Perdagangan	0.39	
17.05%	Industri Pengolahan	0.67	
9.43%	Akomodasi & Makan Minum	-0.38	
6.91%	Jasa Pendidikan	1.33	
6.73%	Konstruksi	-0.85	
6.02%	Jasa Lainnya	-0.66	
3.98%	Transportasi & Pergudangan	0.37	
3.60%	Administrasi Pemerintahan	0.11	
2.45%	Jasa Perusahaan	0.09	
2.18%	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0.52	
1.54%	Jasa Keuangan & Asuransi	-0.09	
0.98%	Informasi dan Komunikasi	0.22	
0.74%	Pertambangan & Pengalihan	-0.14	
0.19%	Pengadaan Air	-0.06	
0.17%	Pengadaan Listrik & Gas	-0.11	
0.07%	Real Estat	-0.03	





III. METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan indikator ketimpangan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2015 sampai dengan 2019. Responden Susenas tersebar di lima kabupaten/kota di DIY, dengan jumlah responden setiap tahun sebesar 3.760-3.790 rumah tangga.

Selain itu, sebagai data pendukung juga digunakan data yang terkait dengan variabel kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan perekonomian hasil kompilasi. Sumber data tersebut sebagian berasal dari publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Provinsi DIY maupun BPS kabupaten/kota se-DIY.

3.2. Metode Analisis

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan di DIY tahun 2015-2019.

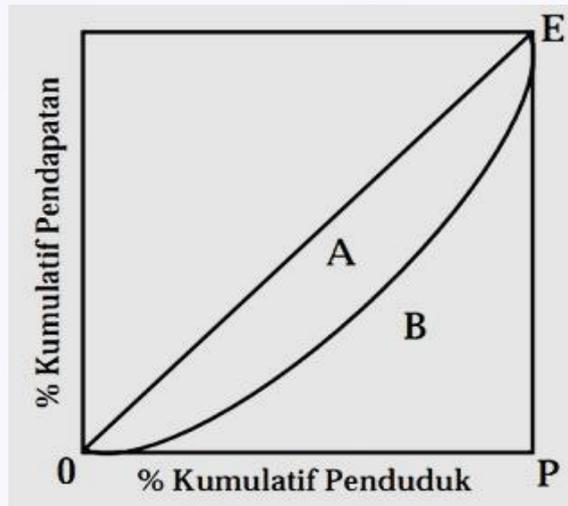
3.2.1. Indeks Gini

Dasar penghitungan indeks gini adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz diperkenalkan oleh Conrad Lorenz seorang ahli statistik dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva tersebut menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima dalam kurun waktu tertentu. Sumbu horisontal menunjukkan jumlah penerima pendapatan yang digambarkan dalam persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan pangsa (*share*) pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal digambarkan melalui titik awal di pojok kiri bawah menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan “kemerataan sempurna”. Oleh karena itu garis tersebut biasa juga disebut garis pemerataan sempurna. Jadi semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (garis

kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurva Lorenz ini akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah.

Gambar 3.1 Kurva Lorenz



Indeks Gini atau Gini Rasio adalah ukuran yang paling sering dan umum digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan pendapatan/pengeluaran, karena bila menggunakan kurva Lorenz maka hanya berdasarkan persepsi kecembungan kurva.. Indeks Gini banyak digunakan karena memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan, namun demikian Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (*additively decomposable*).

Teknis penghitungan Gini Rasio adalah sebagai berikut: misalkan terdapat n rumah tangga dalam suatu sampel. Selanjutnya ke-n rumah tangga tersebut diurutkan berdasarkan pengeluaran dari rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita terkecil hingga rumah tangga yang mempunyai pengeluaran terbesar, yaitu $y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_n$.

Selanjutnya Gini Rasio dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

dimana

GR = Gini Rasio

P_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i

Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i

n = Jumlah Observasi.

Setelah diperoleh nilai Gini Rasio, dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Gini Rasio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

3.2.2. Kriteria Bank Dunia

Ukuran ketimpangan kriteria Bank Dunia merupakan indikator tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi.

Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (*decile*) yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10.

Dalam menentukan besarnya desil ke-*i* digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)} (Q_a - Q_b)$$

dimana

$i = 1, 2, 3, \dots 10$

$n_i =$ Persentase ke-*i*

$D_i =$ Desil ke-*i*

$Q_b =$ Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

$Q_a =$ Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

$P_b =$ Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum D_i

$P_a =$ Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah D_i

Selanjutnya dari hasil penghitungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut **lebih kecil dari 12 persen**, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong “**tinggi**”.

- b. Bila kelompok tersebut **menerima 12 sampai 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**sedang**”.
- c. Bila kelompok tersebut **menerima lebih dari 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**rendah**”.

3.2.3 Indeks Palma

Indeks Palma adalah rasio pembagian pendapatan dari 10 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi terhadap pendapatan 40 persen penduduk pendapatan terendah. Indeks ini telah dikembangkan oleh Gabriel Palma berdasarkan pengamatan yang dilakukannya terhadap distribusi pendapatan menurut kelompok. Indeks ini didasarkan pada pengamatan bahwa ‘kelas menengah’ cenderung meraih sekitar 50 persen dari pendapatan nasional, tetapi sisa separuh dari pendapatan nasional dibagi antara 10 persen mereka yang terkaya dan 40 persen mereka yang termiskin. Cobhan dan Sumner (2013) berpendapat bahwa salah satu keunggulan dari rasio Palma adalah kemudahannya dalam diinterpretasikan. Selain itu, dengan memfokuskan pada kelompok teratas dan terbawah dalam distribusi pendapatan, maka indeks ini dapat menjadi indikator yang lebih relevan untuk kebijakan yang terkait dengan sejauh mana tingkat ketidaksetaraan di setiap negara, dan bisa jadi sangat relevan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Jika indeks sebesar 0,25 berarti terjadi kesetaraan yang sempurna antara kelompok terkaya dan termiskin (Yusuf dalam Prastowo, dkk, 2014). Dengan kata lain, nilai indeks yang semakin mendekati 0,25 menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran atau pendapatan yang ada mendekati seimbang. Nilai indeks ini tidak mempunyai batasan maksimum. Semakin besar nilai Indeks Palma semakin besar disparitas antara penduduk terkaya dengan penduduk termiskin.

Salah satu keunggulan Indeks Palma adalah kemudahannya untuk diartikan. Jika nilai indeks ini adalah 2, maka berarti 10 persen kelompok terkaya menikmati dua kali lipat bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40 persen kelompok termiskin.

Indeks yang dikembangkan oleh Gabriele Palma merupakan ukuran kesenjangan yang relatif masih baru. Dalam website-nya, Alex Cobham mengilustrasikan bahwa indeks ini merupakan penyederhanaan dari Gini Rasio dengan memfokuskan penghitungan hanya pada dua sisi ekstrim kelompok pendapatan yang ada (<http://uncounted.org/palma/>). Indeks ini disusun dengan membandingkan antara 10 persen kelompok terkaya dan 40 persen kelompok termiskin.

Adapun formula penghitungan Indeks Palma adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Palma} = \frac{\text{pengeluaran 10\% penduduk berpendapatan tertinggi}}{\text{pengeluaran 40\% penduduk berpendapatan terrendah}}$$

Salah satu keunggulan indeks ini adalah kemudahannya untuk diinterpretasikan. Angka yang diperoleh menunjukkan seberapa besar konsumsi yang dikeluarkan oleh 10% penduduk terkaya dibandingkan dengan 40% penduduk termiskin. Tidak ada batasan maksimum untuk nilai Indeks Palma. Namun demikian jika nilainya semakin besar maka kesenjangan yang terjadi antara kelompok 10 persen terkaya dan 40 persen termiskin semakin besar. Sementara itu, Yusuf (dalam Prastowo, dkk, 2014) menyatakan bahwa jika Indeks Palma sebesar 0,25 berarti terjadi kesetaraan yang sempurna.

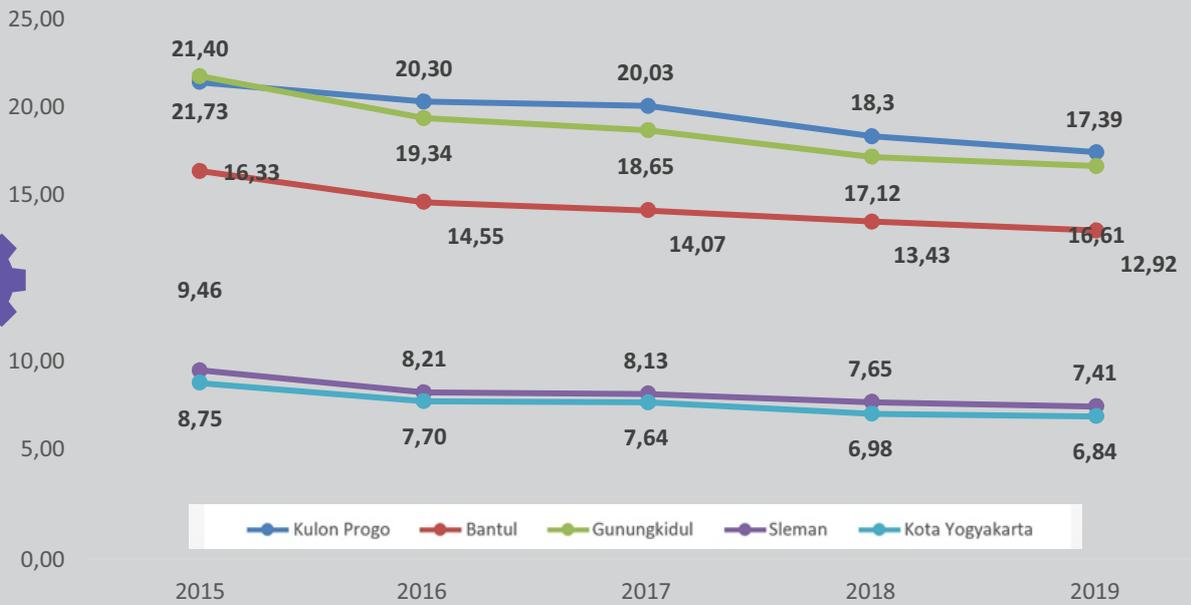




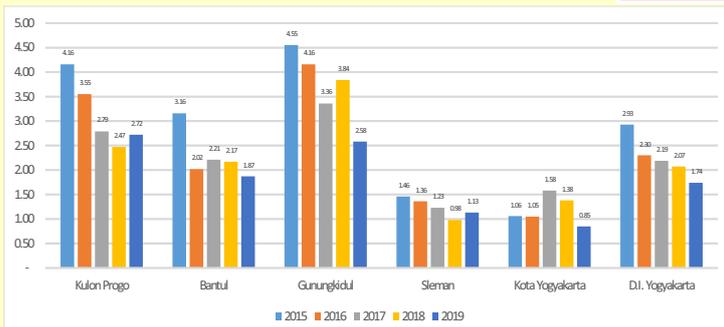
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN D.I YOGYAKARTA



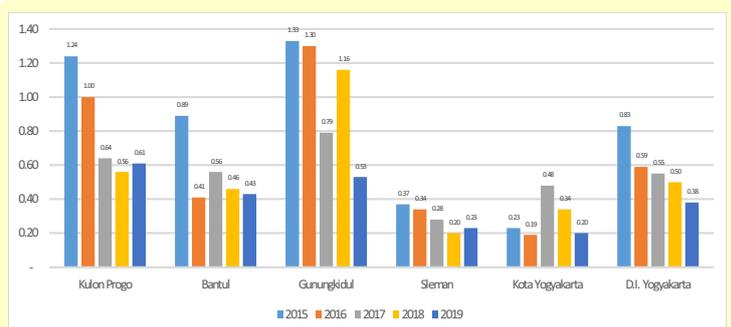
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2015-2019



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2015-2019



Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2015-2019





IV. GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4.1. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil penghitungan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertengahan tahun 2019 sebanyak 3.842.932 jiwa atau tumbuh 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk tersebut paling banyak tersebar di Kabupaten Sleman diikuti Kabupaten Bantul dan paling sedikit ada di Kabupaten Kulon Progo. Walaupun demikian, jika dilihat pertumbuhan per tahun ada 4 kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan di atas 1 persen, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul tahun hanya tumbuh 0,89 persen.

**Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 – 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)			Pertumbuhan 2018-2019 (%)
	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kulon Progo	421.295	425.758	430.220	1,05
02 Bantul	995.264	1.006.692	1.018.402	1,16
03 Gunungkidul	729.364	736.210	742.731	0,89
04 Sleman	1.193.512	1.206.714	1.219.640	1,07
71 Yogyakarta	422.732	427.498	431.939	1,04
D.I. Yogyakarta	3.762.167	3.802.872	3.842.932	1,05

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk D.I Yogyakarta 2010-2020

Tingginya pertambahan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya diduga karena pengaruh migrasi masuk. Daerah Istimewa Yogyakarta selain memiliki daya tarik sebagai kota tujuan hunian pensiun, juga sebagai kota tujuan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Banyak perguruan tinggi tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota

Yogyakarta. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga mulai mengembangkan kampusnya ke Kabupaten Kulon Progo sehingga menjadikan pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Lebih lanjut, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang terbatas tidak lagi mampu menampung pertambahan jumlah penduduk sehingga Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sebagai wilayah penyangga luapan jumlah penduduk dari Kota Yogyakarta.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita					
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kulon Progo	33,13	22,60	17,80	20,04	6,43	100,00
02 Bantul	23,82	20,06	16,78	22,24	17,11	100,00
03 Gunungkidul	33,17	27,09	19,63	16,56	3,54	100,00
04 Sleman	8,62	17,03	23,90	18,70	31,75	100,00
71 Yogyakarta	7,29	13,30	19,36	24,56	35,49	100,00
D.I. Yogyakarta	19,99	19,98	19,99	20,03	20,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2019, diolah

Berdasarkan data Susenas Maret 2018 dan Maret 2019, persentase penduduk menurut pengeluaran per kapita Daerah Istimewa Yogyakarta relatif tersebar tidak merata di semua kelompok pendapatan kabupaten/kota. Penduduk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 lebih banyak tersebar di kelompok kuantil 4 ke atas dan bahkan mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan penduduk Kabupaten Bantul lebih dari 56 persen tersebar di kelompok kuantil 3 ke atas. Selanjutnya distribusi penduduk di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul lebih dari 55 persen tersebar di kuantil 1 dan kuantil 2.

Tabel 4.4 menunjukkan perubahan persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan kelompok pengeluaran. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada kelompok pendapatan 20 persen terbawah (kuantil 1) dan 20 persen teratas (kuantil 5) pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 walaupun tidak signifikan, yaitu 0,01 persen poin pada kuantil 1 dan 0,02 persen poin pada kuantil 5.

Berbeda dengan pola Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase penduduk pada kelompok kuantil pertama Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 justru menurun. Sedangkan persentase penduduk pada kuantil pertama di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman mengalami kenaikan. Selanjutnya persentase penduduk pada kelompok 20 persen terkaya yang mengalami penurunan terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul, sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta meningkat. Penurunan persentase penduduk di kelompok pendapatan terbawah (kuantil pertama) dan teratas (kuantil teratas) mengisyaratkan pada penurunan tingkat ketimpangan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita					
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kulon Progo	36,18	26,14	16,12	14,26	7,30	100,00
02 Bantul	25,98	19,68	19,89	16,85	17,61	100,00
03 Gunungkidul	26,45	26,89	22,19	19,63	4,85	100,00
04 Sleman	8,26	16,67	21,59	23,09	30,39	100,00
71 Yogyakarta	11,63	12,31	15,79	25,36	34,91	100,00
D.I. Yogyakarta	19,98	20,02	19,99	20,03	19,98	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018, diolah

Tabel 4.4 Perubahan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta, 2018 – 2019 (persen)

Kabupaten/Kota	Kelompok Kuantil Pengeluaran Per Kapita				
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kulon Progo	-3,05	-3,54	1,68	5,78	-0,88
02 Bantul	-2,16	0,38	-3,11	5,39	-0,50
03 Gunungkidul	6,72	0,20	-2,56	-3,07	-1,30
04 Sleman	0,36	0,36	2,31	-4,38	1,36
71 Yogyakarta	-4,33	0,99	3,56	-0,79	0,58
D.I. Yogyakarta	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,02

Sumber: Susenas Maret 2018 dan 2019, diolah

Pada tabel 4.5 menyajikan indikator ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2019. Semakin bertambah penduduk usia kerja juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja. Dibandingkan tahun 2018, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2019 meningkat 1,15 persen dan diikuti kenaikan penduduk yang bekerja sebesar 0,77 persen. Sebaliknya jumlah pengangguran pada tahun 2019 turun sebesar 5,70 persen dibandingkan tahun 2018. Jika dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 mencapai 3,14 persen atau turun 0,21 persen poin dibanding tahun 2018.

Dari kecenderungan selama periode 2017-2019, terlihat adanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang semakin baik. Tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke atas pada periode 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTA ke atas pada tahun 2019 sebanyak 55,22 persen atau naik 1,30 persen poin dibandingkan tahun 2018 dan naik 13,99 persen poin jika dibandingkan tahun 2017. Sebaliknya tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah terus berkurang. Pada tahun 2019, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah hanya mencapai 28,04 persen atau turun 0,72 persen poin dibandingkan tahun 2018 dan turun 14,08 persen poin dibandingkan tahun 2017.

Tabel 4.5. Indikator Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	2.960.204	2.987.330	3.021.647
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	2.117.187	2.191.742	2.203.920
	a. Bekerja	2.053.168	2.118.392	2.134.750
	b. Pengangguran	64,019	73.350	69.170
3.	TPAK (%)	71,52	73,37	72,94
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	3,02	3,35	3,14
5.	Bekerja < 35 jam seminggu (%)	25,99	28,54	30,63

Sumber : Sakernas Agustus 2017- Agustus 2019

Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2109

Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
< = SD	42,12	28,76	28,04
SMP	17,94	17,32	16,74
SMA	17,46	15,76	17,25
SMK	10,40	22,20	20,78
Universitas	12,07	15,96	17,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Agustus 2017- Agustus 2019

Pembangunan ekonomi yang semakin baik selain ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya tenaga kerja juga ditunjukkan dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor-sektor yang lain. Walaupun demikian sektor pertanian masih merupakan sektor paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu pada tahun tahun 2019 mampu menyerap 19,37 persen. Sementara itu, meskipun masih berfluktuasi terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan; perdagangan; dan akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Tabel 4.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,01	20,40	19,37
2. Pertambangan dan Penggalian	0,70	0,89	0,74
3. Industri Pengolahan	16,57	16,38	16,97
4. Pengadaan Listrik dan gas	0,18	0,28	0,17
5. Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,25	0,19
6. Konstruksi	7,47	7,58	6,70
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	18,70	18,57	18,87
8. Transportasi dan Pergudangan	2,77	3,60	3,96
9. Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	9,11	9,81	9,39
10. Informasi dan Komunikasi	0,81	0,77	0,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;	1,48	1,62	1,53
12. Real Estat	0,18	0,09	0,07
13. Jasa Perusahaan	2,31	2,36	2,44
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	3,56	3,49	3,59
15. Jasa pendidikan	5,51	5,58	6,88
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,66	2,17
17. Jasa Lainnya.	6,69	6,68	6,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2017- Agustus 2019

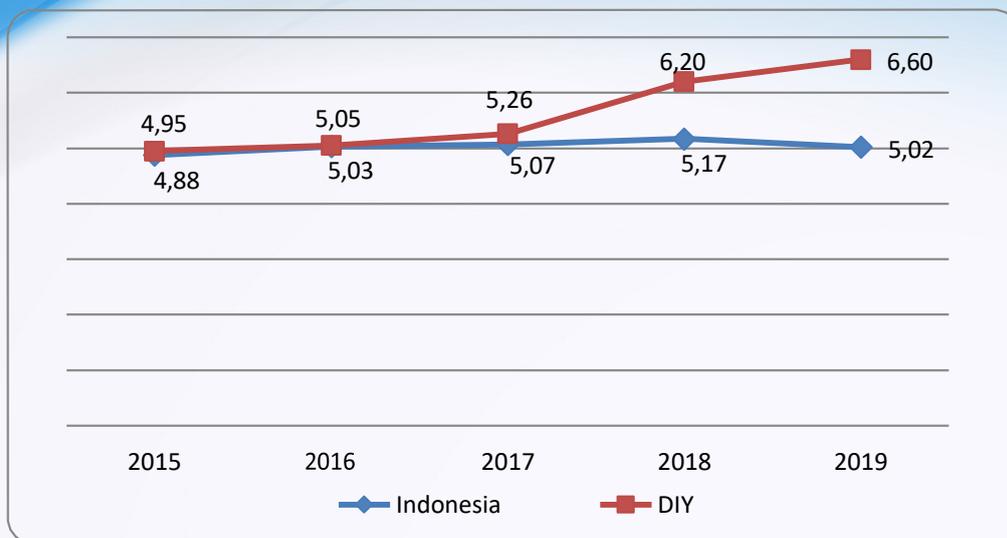
4.2. Keadaan Perekonomian D.I. Yogyakarta

Kinerja pembangunan suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu indikator strategis, pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi tingkat pengangguran, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta mengalami fluktuasi. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,77 persen per tahun, namun pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta menunjukkan percepatan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen dan terus naik menjadi 5,26 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan yang melesit sebesar 6,20 persen, bahkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,60 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta mengalami akselerasi. Tingginya kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya pembangunan mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta (*Yogyakarta International Airport* – YIA) di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga adanya pembangunan fasilitas infrastruktur penunjang seperti kelanjutan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), *underpass* bandara YIA, *underpass* Kentungan, dan infrastruktur lainnya.

Jika dibandingkan dengan angka nasional, laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2019 berada di atas angka nasional. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, laju pertumbuhan D.I. Yogyakarta sedikit di atas angka nasional. Namun, pada tahun 2018 dan 2019, laju pertumbuhan D.I. Yogyakarta terpaut 1 hingga 1,5 persen di atas angka nasional. Peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan membawa konsekuensi secara langsung pada peningkatan pendapatan. Harapannya dapat membawa kesejahteraan bagi penduduk di D.I. Yogyakarta.

Gambar 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta dan Indonesia, 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Ditinjau menurut kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kabupaten/kota memiliki pola yang cukup bervariasi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada level provinsi hakikatnya merupakan gabungan dari pertumbuhan semua kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki kontribusi pertumbuhan yang bervariasi sesuai ukuran ekonominya maupun tingkat perubahannya. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang selalu memiliki pertumbuhan ekonomi di atas angka D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul, pertumbuhannya selalu di bawah angka D.I. Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pola yang berbeda mulai tahun 2017. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo meningkat secara drastis jauh di atas angka D.I. Yogyakarta. Kondisi ini didorong adanya proyek pembangunan bandara YIA yang akan memberikan *multiplier effect* yang cukup besar, baik dari percepatan perekonomian sekitar, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan kesejahteraan. Berkembangnya investasi pembangunan di kawasan sekitar bandara seperti pembangunan perhotelan, akses jalur kereta api, dan infrastruktur pendukung lainnya dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Tabel 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49
Bantul	4,97	5,05	5,10	5,47	5,53
Gunungkidul	4,82	4,88	5,01	5,16	5,33
Sleman	5,18	5,22	5,34	6,42	6,49
Yogyakarta	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Tingkat pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, yang biasa dikenal sebagai inflasi. Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang kondusif akan menjaga daya beli masyarakat sehingga laju inflasi terkendali dengan baik. Ketersediaan barang dan jasa di suatu wilayah akan mempengaruhi perubahan harga disamping karakteristik pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Kinerja perekonomian secara makro membaik apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah menguat.

Fenomena perubahan harga barang dan jasa tingkat konsumen di D.I. Yogyakarta direpresentasikan oleh inflasi Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi Kota Yogyakarta sebesar 3,09 persen kemudian pada tahun 2016 dengan inflasi sebesar 2,29 persen. Meskipun di tahun 2017 laju inflasi sempat naik di atas 4 persen yaitu 4,20 persen, namun pada tahun 2018 dan 2019 laju inflasinya lebih rendah bahkan berada di bawah 3 persen.

Apabila dibandingkan dengan angka nasional, inflasi Kota Yogyakarta secara rata-rata lebih rendah. Pada tahun 2019, inflasi Kota Yogyakarta dan inflasi Indonesia dengan laju yang hampir sama. Inflasi nasional selama lima tahun terakhir dengan angka yang relatif rendah dan cenderung stabil. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, inflasi Indonesia pada kisaran 3,02 persen hingga 3,61 persen, dan pada tahun 2019 menurun dengan inflasi sebesar 2,72 persen. Perkembangan inflasi Kota Yogyakarta dan Indonesia seperti pada Gambar 4.2.2.

Gambar 4.2.2 Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta dan Indonesia, 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Kondisi perekonomian di suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Struktur perekonomian di suatu wilayah memberikan gambaran mengenai aktivitas sektor apa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, struktur ekonomi juga memberikan gambaran mengenai tingkat dan perkembangan teknologi di suatu daerah. Struktur perekonomian D.I. Yogyakarta atas dasar harga berlaku seperti pada Tabel 4.2.2.

Tiga lapangan usaha di D.I. Yogyakarta dengan kontribusi terbesar pada tahun 2019 adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Ketiga lapangan usaha tersebut masing-masing memberikan kontribusi sebesar 12,85 persen; 11,11 persen; dan 10,35 persen. Kontribusi dengan peningkatan yang cukup besar pada lapangan usaha konstruksi selama dua tahun terakhir mampu menggeser posisi lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum. Sedangkan lapangan usaha pertanian yang semula menduduki posisi tiga besar bergeser dan berada pada posisi ke empat. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, lapangan usaha pertanian menunjukkan kontribusi yang cenderung menurun. Hal tersebut berbeda dengan lapangan usaha konstruksi yang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum selalu berada pada peringkat tiga besar. Lapangan usaha tersebut merupakan sektor ekonomi andalan di D.I. Yogyakarta karena memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu icon wisata di Indonesia.

Tabel 4.2.2. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	10,64	10,42	10,02	9,79	9,37
2	Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51
3	Industri Pengolahan	13,11	13,23	13,13	12,99	12,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,13	0,15	0,14	0,14
5	Pengadaan Air	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,37	9,35	9,49	10,28	11,11
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,22	8,46	8,58	8,59	8,47
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,68	5,68	5,69	5,75	5,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	10,24	10,33	10,22	10,35
10	Informasi dan Komunikasi	8,13	8,15	8,21	8,10	7,98
11	Jasa Keuangan	3,97	3,94	3,90	3,93	4,00
12	Real Estat	7,02	7,09	7,03	6,95	7,00
13	Jasa Perusahaan	1,03	1,01	1,02	1,01	1,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	8,26	8,38	8,57	8,43	8,23
15	Jasa Pendidikan	8,48	8,19	8,14	8,11	8,14
16	Jasa Kesehatan	2,52	2,51	2,52	2,48	2,50
17	Jasa-jasa Lainnya	2,55	2,57	2,61	2,60	2,59
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

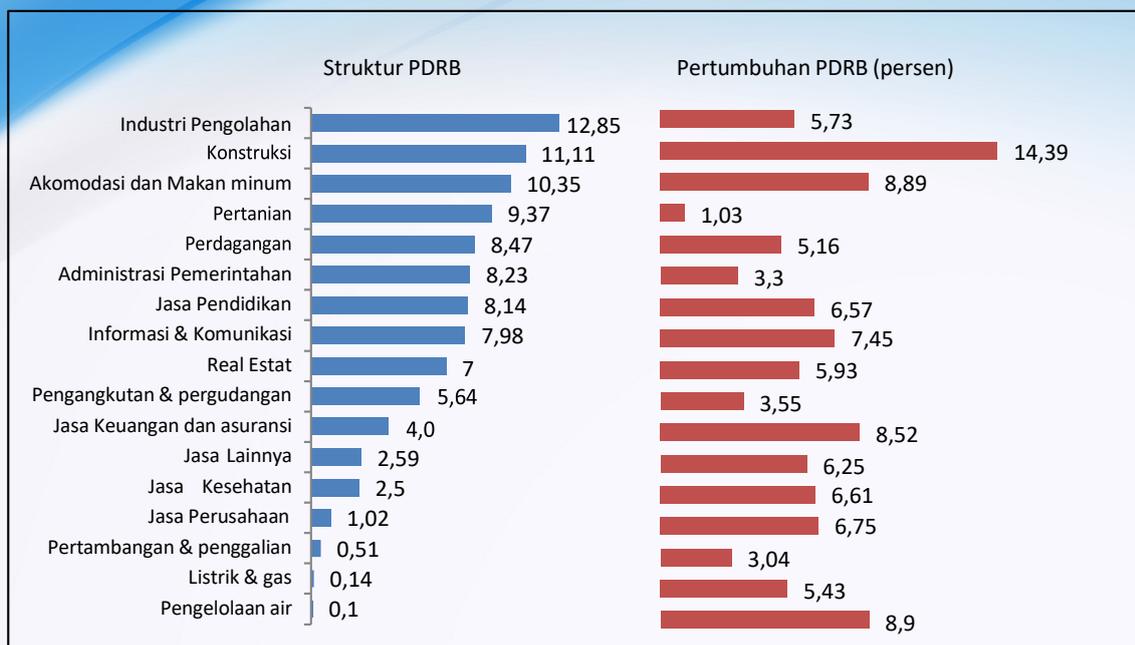
Keterangan:*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Gambar 4.2.3 menunjukkan gambaran potensi ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2019 berdasarkan struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi secara sekaligus. Ketiga lapangan usaha yang mempunyai kontribusi tertinggi yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain memiliki kontribusi yang tinggi, lapangan usaha konstruksi memiliki laju pertumbuhan tertinggi sehingga sangat potensial dalam mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki laju pertumbuhan di bawah pertumbuhan total PDRB namun memiliki kontribusi yang tinggi sehingga potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk lapangan usaha pengadaan air meskipun memiliki pertumbuhan tertinggi kedua, namun kontribusinya hanya 0,1 persen sehingga tidak begitu pengaruh bagi perekonomian D.I. Yogyakarta. Pertumbuhan pengadaan air yang tinggi karena adanya musim kemarau yang cukup panjang khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 4.2.3 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta (persen), 2019



Sumber: BPS D.I. Yogyakarta

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah dilihat dari PDRB perkapita. PDRB per kapita menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada setiap penduduk wilayah tersebut. Namun PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah.

Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB perkapita D.I. Yogyakarta atas dasar harga berlaku tahun 2019 tercatat sebesar 36,79 juta rupiah. Jika dihitung berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB perkapita D.I. Yogyakarta tahun 2019 sebesar 27,19 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 merupakan data awal untuk mendapatkan angka pendapatan riil per kapita suatu wilayah. PDRB perkapita bermakna bahwa nilai PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar 104,49 triliun rupiah, apabila dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 2,27 juta rupiah bulannya. Namun realita dalam kenyataan kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah demikian. Angka PDRB perkapita dapat dimanfaatkan sebagai indikasi kebijakan agar pemerintah dapat menciptakan pemerataan implementasi dan juga hasil pembangunan di wilayahnya agar memberi dampak pada pengurangan kesenjangan distribusi

pendapatan antar penduduk. Perkembangan pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan selama tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 3,75 kemudian terus naik dan tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,48 persen.

Tabel 4.2.3 Perkembangan PDRB Perkapita D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku (juta rupiah)	101.447.650	109.962.354	119.131.000	129.874.338	141.400.183
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	83.474.441	87.685.810	92.302.022	98.024.264	104.489.706
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872	3.842.932
PDRB per kapita adh. berlaku (rupiah)	27.573.470	29.552.527	31.665.527	34.151.646	36.794.870
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (rupiah)	22.688.352	23.565.677	24.534.270	25.776.378	27.190.100
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	8,02	7,18	7,15	7,85	7,74
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,75	3,87	4,11	5,06	5,48

Keterangan:*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

4.3. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga pada PDRB

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. PDRB merupakan jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian suatu wilayah dapat digambarkan melalui perkembangan komponen-komponen PDRB menurut pengeluaran.

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi pengeluaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*) yang disusun oleh sembilan komponen. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen

tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto.

Tabel 4.3.1 Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran di DIY, 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB					
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	68.730.528	74.429.796	81.335.810	86.753.197	92.459.989
a. Makanan dan Minuman	28.969.375	31.379.792	33.878.342	36.043.724	38.532.497
b. Bukan Makanan	39.761.153	43.050.003	47.457.468	50.709.473	53.927.491
2. Pengeluaran lainnya	32.709.990	35.532.558	37.792.909	43.121.141	48.940.194
Total	101.440.518	109.962.354	119.128.719	129.874.338	141.400.183
ADHK					
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	50.193.386	52.619.164	55.364.064	57.552.317	59.745.355
a. Makanan dan Minuman	19.195.190	19.920.604	20.834.663	21.570.908	22.372.280
b. Bukan Makanan	30.998.196	32.698.560	34.529.401	35.981.409	37.373.076
2. Pengeluaran lainnya	33.281.066	35.066.646	36.936.180	40.471.947	44.744.351
Total	83.474.452	87.685.810	92.300.244	98.024.264	104.489.706

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Kondisi perekonomian DIY yang semakin membaik ditunjukkan dengan angka PDRB yang meningkat setiap tahun. Hal ini tercermin dari nilai PDRB ADHB dan ADHK. Pada tahun 2015, PDRB DIY ADH Berlaku sebesar 101.441 miliar rupiah dan mencapai 141.400 miliar rupiah pada tahun 2019. Selama lima tahun terakhir PDRB ADH Berlaku rata-rata naik sekitar 9.990 miliar rupiah per tahun

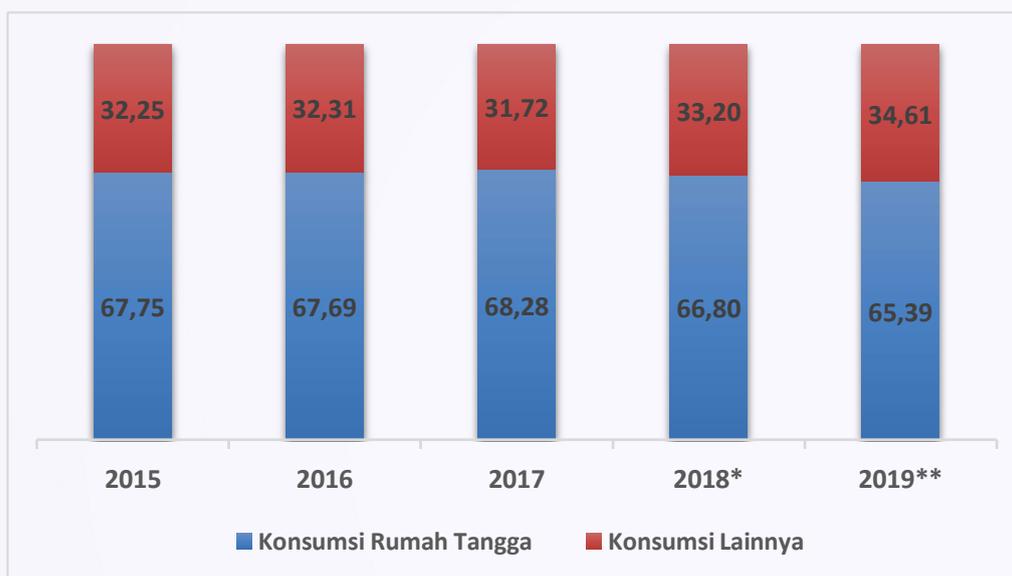
PDRB ADH periode tahun 2015-2019, sejalan dengan PDRB ADH Berlaku. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADH Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADH Konstan tahun 2015 sebesar 83.474 miliar rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 104.490 miliar rupiah.

Struktur PDB/PDRB menurut pengeluaran di DIY masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu diatas 65 persen selama periode 2015-2019. Kontribusi konsumsi rumah

tangga dalam PDRB tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Jika segala hal yang terjadi pada pengeluaran rumah tangga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi akhir rumah tangga dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan signifikan baik secara nominal maupun secara riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan konsumsi rumah tangga tersebut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar 4.3.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY (persen), 2015-2019



Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Pada tahun 2015 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,75 persen terhadap total PDRB dan terus meningkat menjadi 68,28 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2019 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Pada akhir periode 2019 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 65,39 persen.

Selain peningkatan nominal PDRB, kondisi perekonomian dapat digambarkan melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi utamanya akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan sekaligus ketimpangan pendapatan yang ada dalam masyarakat. Tabel 4.3.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2015, ekonomi tumbuh sebesar 4,95 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mampu mencapai 6,60 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut tak lepas dari peran pertumbuhan PDRB masing-masing komponen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi DIY

menurut pengeluaran adalah jenis pengeluaran komponen Pengeluaran pembentukan modal. Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh rata-rata sekitar 7,69 persen.

Tabel 4.3.2 Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY (persen), 2015–2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi rumah	4,74	4,83	5,22	3,95	3,81	4,45
a. Makanan dan Minuman	3,80	3,78	4,59	3,53	3,72	3,90
b. Bukan Makanan	5,32	5,49	5,60	4,21	3,87	4,79
2. Pengeluaran konsumsi LNPR	2,90	-0,92	9,61	2,63	9,58	5,12
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	5,50	1,81	1,20	3,47	3,12	2,40
4. Pembentukan modal tetap bruto	4,34	5,97	4,97	10,17	9,74	7,69
5. Perubahan Inventori	4,73	7,24	2,02	3,54	3,04	3,94
6. Ekspor Luar Negeri	3,23	-0,35	9,26	12,82	-0,07	5,26
7. Impor Luar Negeri	15,49	20,48	9,19	6,22	-9,01	6,19
8. Net Ekspor Antardaerah	-5,39	-16,55	-6,16	-3,14	-9,95	-9,09
P D R B	4,95	5,05	5,26	6,2	6,6	5,77

Hal menarik tampak bahwa struktur pengeluaran di DIY didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, tetapi komponen ini hanya mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,81 persen di tahun 2019. Menurut jenis komponen pengeluaran rumah tangga, antara kelompok makanan dan bukan makanan tumbuh cukup baik, yaitu masing-masing sebesar 3,72 persen dan 3,87 persen. Pertumbuhan kelompok makanan lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,53 persen. Sebaliknya, pertumbuhan kelompok bukan makanan tahun 2019 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Bila pendapatan masyarakat meningkat ada indikasi akan meningkatkan daya beli. selanjutnya peningkatan daya beli akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Dengan demikian mengawal daya beli masyarakat akan berimplikasi kenaikan konsumsi rumah tangga. Tentu Faktor ketersediaan barang dan pendapatan memegang peranan penting. Bagaimana profil pengeluaran rumah tangga akan lebih detil bila dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita.

Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di DIY menghabiskan dana sekitar 61.340 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi akhir rumah tangga baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat menjadi 78.405 ribu rupiah pada tahun 2019. Dalam struktur konsumsi akhir rumah tangga DIY selama 2015-2019, porsi konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 41-42 persen.

Tabel 4.3.3 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga DIY, 2015- 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	68.731	74.430	81.336	86.753	92.460
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	50.193	52.619	55.364	57.552	59.745
Proporsi Terhadap PDRB	67,75	67,69	68,28	66,8	65,39
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga per Tahun (ribu rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	61.340	66.550	72.962	75.756	78.405
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	44.796	47.048	49.664	50.257	50.663
Rata-rata Konsumsi per kapita per Tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	18.681	20.003	21.619	22.813	24.060
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	13.643	14.141	14.716	15.134	15.547
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,74	4,83	5,22	3,95	3,81
b. Per RT	3,79	5,03	5,56	1,19	0,81
c. Per kapita	3,54	3,66	4,06	2,84	2,73
Jumlah RT(unit)	1.120.477	1.118.411	1.114.767	1.145.168	1.179.263
Jumlah Penduduk(ribu orang)	3.679	3.721	3.762	3.803	3.843

Pengaruh pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi terhadap PDRB mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terdominasi untuk makanan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam struktur pengeluaran PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergairah dan permintaan domestik yang lebih stabil. Selain itu, pengeluaran konsumsi

rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi DIY, sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk DIY. Perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang bisa untuk menjaga pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Namun, di sisi lain perlu disadari bahwa komponen ini bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. Oleh karena itu harus ada kesesuaian dengan komponen lainnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran, yaitu perlunya dorongan dari investasi dan kinerja ekspor yang lebih optimal.

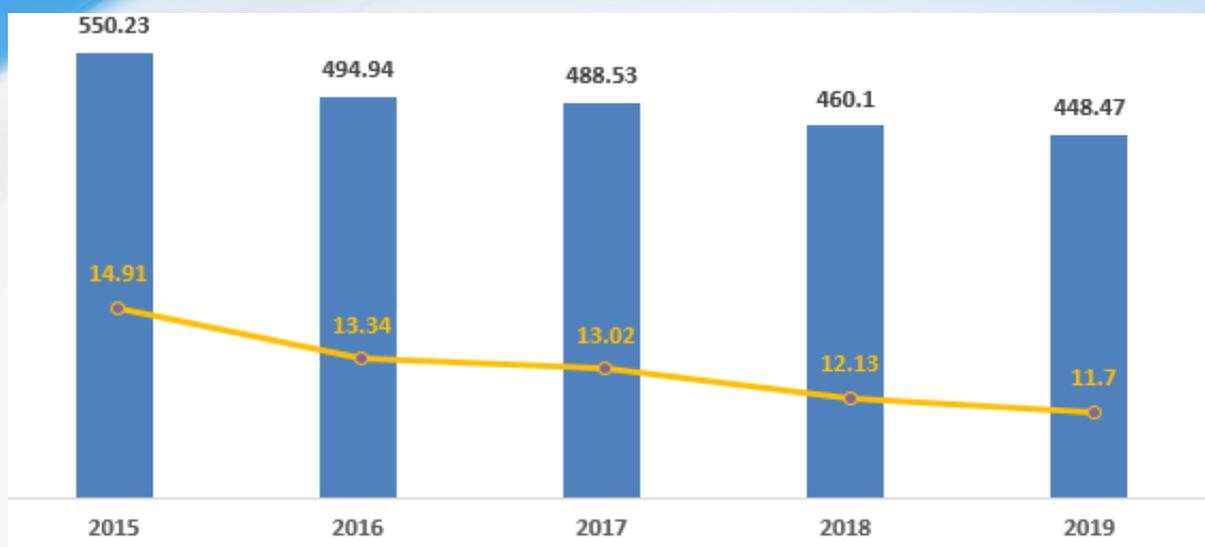
Dari uraian diatas beberapa poin penting yaitu konsumsi akhir rumah tangga mendominasi dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Dengan demikian, perubahan konsumsi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor perubahan konsumsi rumah tangga diantaranya adalah perubahan daya beli dan ketersediaan barang dan jasa. Oleh karena itu daya beli penduduk kelas menengah kebawah harus dijaga, tidak hanya untuk kesejahteraan pribadinya, namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY. Jika penduduk kelas bawah semakin kecil kontribusinya dalam pengeluaran nasional, maka ketimpangan akan semakin lebar dan hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pengeluaran makin rendah manakala distribusi pengeluaran antara kelompok penduduk makin kecil selisihnya.

4.4. Kemiskinan di D.I. Yogyakarta

Gambar 4.4.1 menyajikan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta pada kurun waktu 2015 – 2019. Dalam kurun waktu tersebut terlihat bahwa kemiskinan, baik dari sisi jumlah maupun persentase (P0), di D.I. Yogyakarta mengalami penurunan.

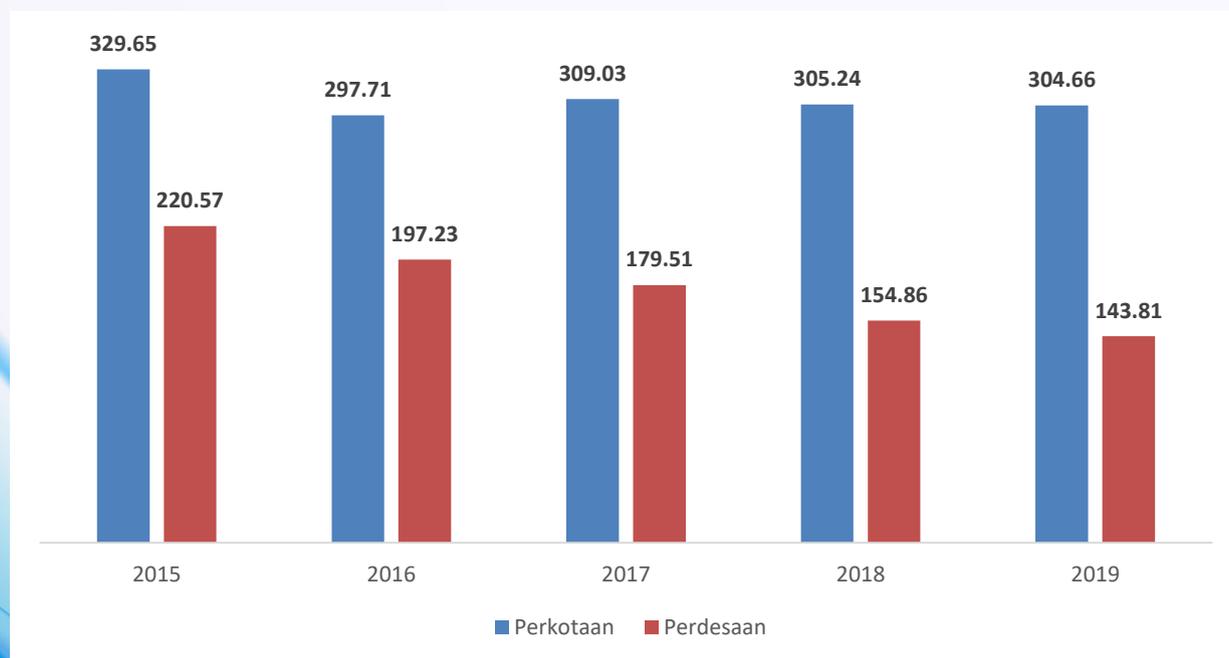
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 101,76 ribu jiwa. Selama lima tahun terakhir, penurunan penduduk miskin pada periode 2015 – 2016 tercatat sebagai yang tertinggi, dimana pada saat itu jumlah penduduk miskin turun sebanyak 55,29 ribu orang atau turun sebanyak 10,05 persen. Secara rata-rata, pada periode lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin turun sebanyak 25,44 ribu orang per tahun.

**Gambar 4.4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019**



Sumber : BPS DIY, Berita Resmi Statistik 2015-2019

**Gambar 4.4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan
D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019**

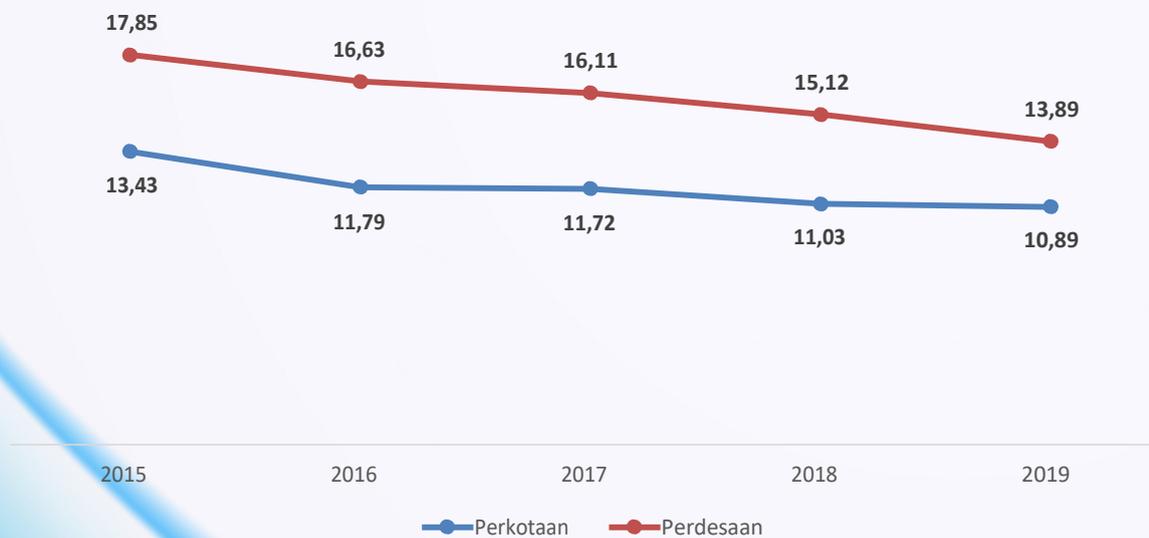


Sumber : BPS DIY, Berita Resmi Statistik 2015 - 2019

Pada periode yang sama, *headcount poverty ratio* (P0) menunjukkan pola yang hampir sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah 14,91 persen. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin turun 1,57 poin persen menjadi 13,34 persen. Dan pada tahun 2018, persentase penduduk miskin kembali turun 0,89 poin persen menjadi 12,13 persen. Secara rata-rata, selama 2015 – 2019, persentase penduduk miskin berkurang sebanyak 0,80 poin persen di D.I. Yogyakarta.

Gambar 4.4.3 memberikan informasi mengenai perkembangan persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 – 2019. Terlihat bahwa kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan menunjukkan kecenderungan yang menurun meskipun dengan pola yang berbeda. Penduduk miskin di daerah perkotaan menunjukkan kecenderungan yang menurun meskipun sedikit mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sempat mengalami kenaikan sebanyak 11,32 ribu orang menjadi 309,03 ribu orang. Adapun penduduk miskin di perdesaan menunjukkan penurunan yang konsisten selama periode yang sama.

Gambar 4.4.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS DIY, Berita Resmi Statistik 2015 - 2019

Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin absolut di daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada penduduk miskin absolut di perdesaan. Lebih lanjut, laju penurunan penduduk miskin di perdesaan terlihat lebih cepat dibandingkan dengan laju penurunan penduduk miskin di perkotaan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di

perkotaan hampir 1,5 kali lipat penduduk miskin di perdesaan. Pada tahun 2019, selisihnya meningkat menjadi lebih dua kali lipatnya.

Meskipun secara absolut, jumlah penduduk miskin lebih banyak di perkotaan, namun secara persentase jumlah penduduk miskin justru banyak ditemukan di perdesaan. Berdasarkan hasil susenas 2015 – 2019 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan (Gambar 4.4.3).

Meskipun persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, namun laju penurunan penduduk miskin di perdesaan lebih cepat daripada di perkotaan. Pada tahun 2015, terdapat selisih lebih dari 4 poin persen antara persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2019, selisih antara persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan berkurang menjadi 3 poin persen. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir, rata-rata laju penurunan penduduk miskin perdesaan adalah 6,06 persen. Sementara itu, pada periode yang sama, laju penurunan penduduk miskin perkotaan adalah 4,99 persen.

Gambar 4.4.4 memberikan gambaran jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta selama tahun 2015 – 2019. Selama periode waktu tersebut, tingkat penurunan penduduk miskin yang tertinggi terjadi di Gunungkidul. Gunungkidul berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 155 ribu menjadi 123,08 ribu orang atau berkurang sebanyak 31,92 ribu penduduk.

Penurunan penduduk miskin di Bantul juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin Bantul tercatat lebih dari 160,15 ribu orang. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Bantul tercatat sebanyak 131,15 ribu orang atau turun sebanyak 29 ribu orang.

Pada saat yang sama, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat penurunan penduduk miskin yang terendah di D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan dari bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 6,53 ribu orang selama rentang waktu 5 tahun terakhir. Namun, demikian, karena jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta juga relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di D.I. Yogyakarta, maka penurunan jumlah penduduk miskin absolut tersebut tetap membawa hasil yang signifikan secara persentase.

Gambar 4.4.4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 – 2019 (Ribu)

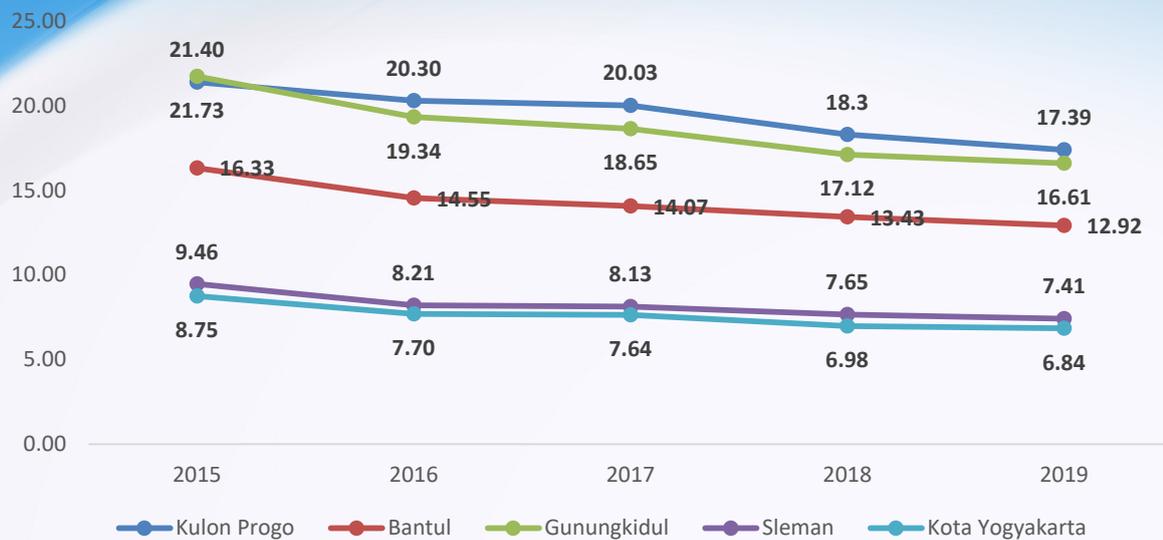


Sumber: BPS, 2016 - 2019

Berdasarkan Gambar 4.4.5, terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang tertinggi di D.I. Yogyakarta terdapat di Gunungkidul dan Kulon Progo. Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kabupaten dan kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Bahkan pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Sleman dan Kota Yogyakarta telah berada pada level satu digit.

Meskipun di awal periode tingkat kemiskinan di Gunungkidul merupakan yang tertinggi, namun pada perkembangan selanjutnya dapat diturunkan sampai dengan level di bawah tingkat kemiskinan Kulon Progo. Sejak tahun tahun 2016, persentase penduduk miskin di Gunungkidul lebih rendah dibandingkan dengan Kulon Progo.

Gambar 4.4.5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPS, 2016 - 2020

Tabel 4.4.1 memberikan informasi mengenai tingkat kedalaman kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta selama tahun 2015 – 2019. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran untuk mengetahui jarak antara rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin besar nilai P1 maka semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin dari keterpurukannya.

Di antara lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, indeks kedalaman kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon Progo selama lima tahun terakhir merupakan yang paling tinggi. Namun demikian kondisi kemiskinan di kedua kabupaten tersebut menunjukkan adanya perbaikan dengan semakin berkurangnya nilai indeks P1 selama periode 2015 -2019.

**Tabel 4.4.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	4,16	3,55	2,79	2,47	2,72
Bantul	3,16	2,02	2,21	2,17	1,87
Gunungkidul	4,55	4,16	3,36	3,84	2,58
Sleman	1,46	1,36	1,23	0,98	1,13
Kota Yogyakarta	1,06	1,05	1,58	1,38	0,85
D.I. Yogyakarta	2,93	2,30	2,19	2,07	1,74

Sumber : BPS, 2016 - 2019

Adapun Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan nilai indeks P1 yang paling kecil di D.I. Yogyakarta selama rentang waktu yang sama. Pada tahun 2015, nilai indeks P1 Kota Yogyakarta tercatat sebesar 1,06. Pada tahun 2016, nilai indeks P1 sempat menyentuh angka 1,05. Namun pada tahun 2017, indeks P1 di daerah ini meningkat menjadi 1,58. Meskipun demikian, pada tahun 2018 indeks P1 kembali turun menjadi 1,38. Bahkan pada tahun 2019, indeks P1 Kota Yogyakarta tercatat 0,85 dan merupakan yang terkecil di D.I. Yogyakarta.

**Tabel 4.4.2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	1,24	1,00	0,64	0,56	0,61
Bantul	0,89	0,41	0,56	0,46	0,43
Gunungkidul	1,33	1,30	0,79	1,16	0,53
Sleman	0,37	0,34	0,28	0,20	0,23
Kota Yogyakarta	0,23	0,19	0,48	0,34	0,20
D.I. Yogyakarta	0,83	0,59	0,55	0,50	0,38

Sumber : BPS, 2016 - 2019

Secara umum, nilai indeks P1 menunjukkan adanya perbaikan dalam waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, indeks P1 untuk D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 2,93. Pada tahun 2019, nilai indeks P1 turun menjadi 1,74. Penurunan indeks P1 tersebut memberikan gambaran semakin membaiknya situasi kemiskinan karena pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 4.4.2. memberikan informasi mengenai nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk masing-masing kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta selama tahun 2015 – 2019. Indeks P2 menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan nilai indeks P2 yang relatif paling rendah untuk kurun waktu lima tahun terakhir. Rata-rata indeks P2 Kota Yogyakarta selama periode tersebut adalah 0,288.

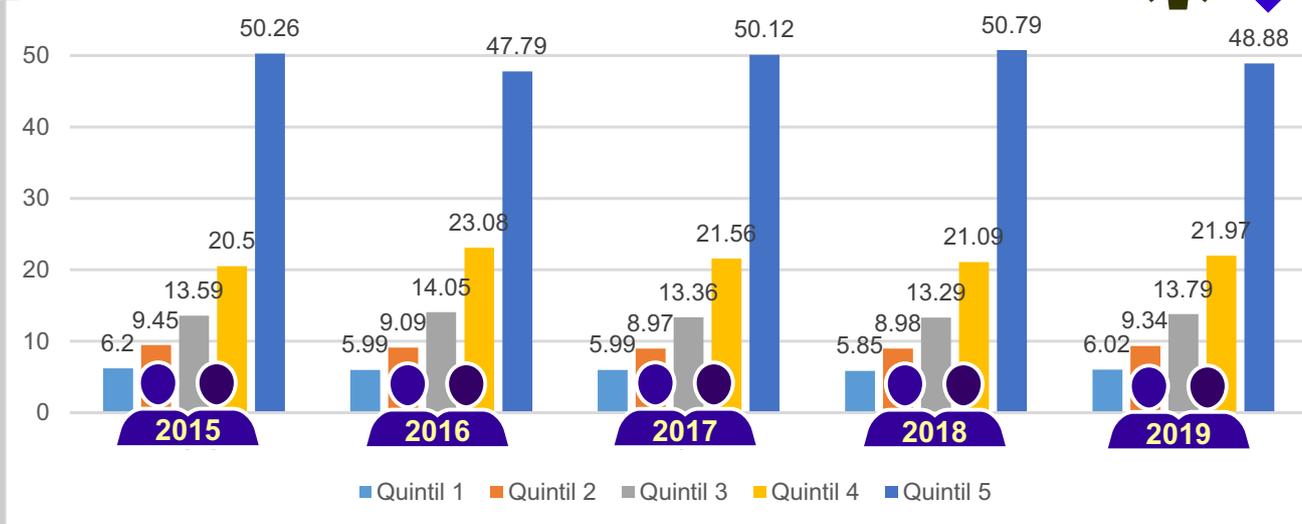
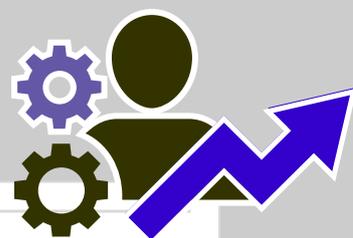
Nilai indeks P2 yang tertinggi selama tahun 2015 – 2019 di D.I. Yogyakarta tercatat di Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata indeks P2 kabupaten ini adalah 1,02 per tahun untuk kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, indeks P2 di wilayah ini mencapai titik tertingginya yaitu 1,33. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi diantara penduduk miskin di Gunungkidul pada tahun tersebut.

Secara umum, kondisi ketimpangan antara penduduk miskin di D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2015, indeks P2 D.I. Yogyakarta adalah 0,83. Sementara itu, pada tahun 2019, nilai indeks P2 tercatat sebesar 0,38 dan merupakan nilai indeks terkecil selama lima tahun terakhir. Penurunan pada nilai indeks P2 tersebut menunjukkan tingkat kesenjangan antara penduduk miskin yang semakin berkurang.

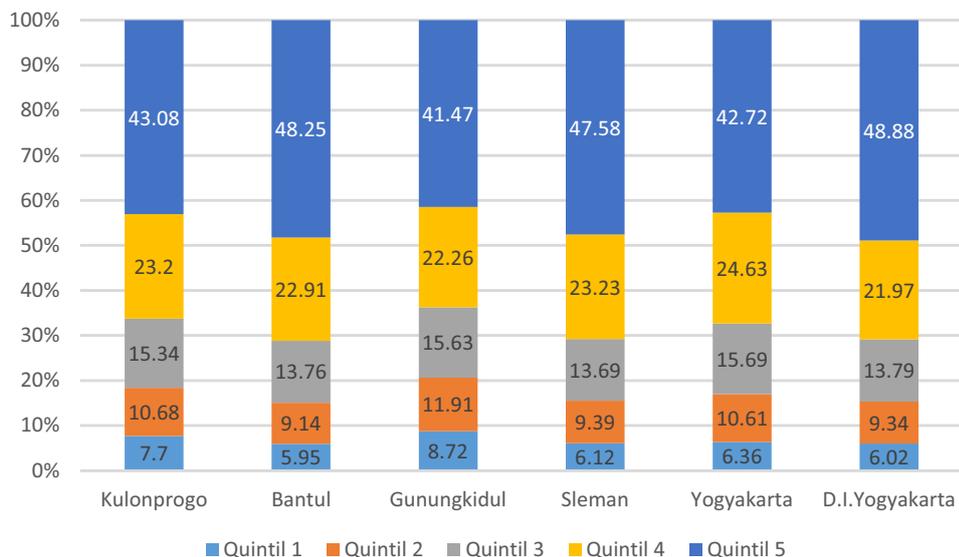




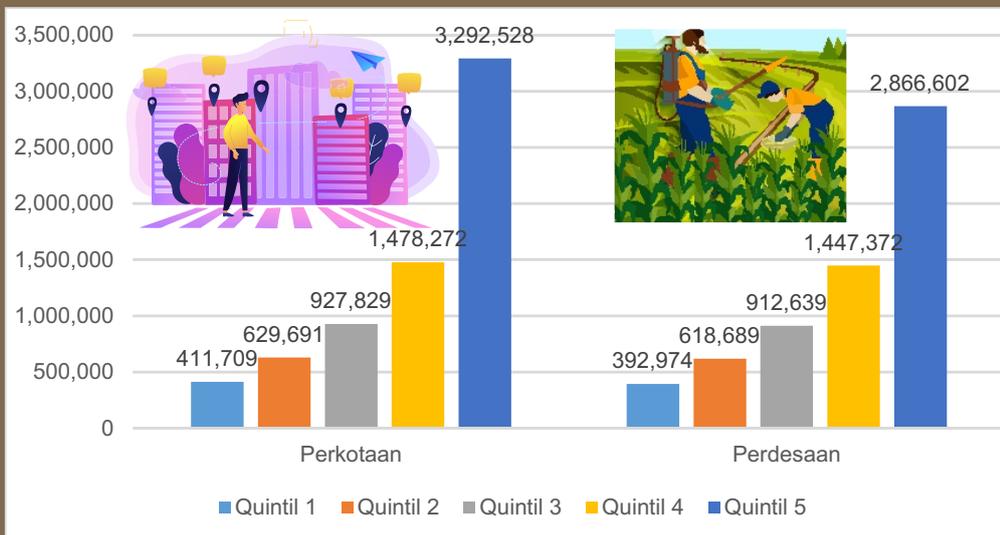
DISTRIBUSI PENGELUARAN MENURUT QUINTIL PENGELUARAN PERKAPITA DI D.I. YOGYAKARTA, 2015-2019



DISTRIBUSI PENGELUARAN MENURUT QUINTIL PENGELUARAN PERKAPITA DAN KABUPATEN KOTA, TAHUN 2015-2019



RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA MENURUT KUINTIL DAN TIPE DAERAH DI D.I YOGYA KARTA, 2019





V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Persentil/Desil/Kuantil

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesempatan kerja, kesenjangan pendapatan merupakan indikator penting dalam pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mampu menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta kesempatan kerja. Kinerja pembangunan ekonomi sudah bagus belum tentu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, akibat tidak samanya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Asra;2014)

Mengurangi kesenjangan/ketimpangan telah menjadi komitmen upaya mencapai kesejahteraan penduduk, bukan hanya Indonesia namun semua Negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kesepakatan tersebut telah diwujudkan menjadi target SDGs ke 10 yakni mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Mereka berupaya untuk memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini. Dengan demikian, penting untuk menekankan isu ketimpangan terutama pendapatan menjadi perhatian dalam pembangunan (Vablen (1970) dan Hirschman(1973)).

Ravallion (2003) menyatakan bahwa “*inequality is about the disparities in levels of living*”. Kesenjangan dibedakan menjadi ‘kesenjangan relatif’ dan ‘kesenjangan absolut’. Kesenjangan relatif tergantung dari rasio pendapatan individu terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Sehingga, jika semua pendapatan naik dengan tingkat yang sama, maka kesenjangan relative menjadi tidak berubah. Kesenjangan absolut merupakan pengukuran kesenjangan dengan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak.

Analisis ketimpangan pendapatan menjadikan pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok pendapatan. Beberapa analisis kesenjangan membagi masyarakat menjadi 10 kelompok desil, mulai dari 10 persen populasi berpendapatan terendah, 10 persen kelompok di atasnya, dan seterusnya sampai 10 persen kelompok berpenghasilan teratas. Selain itu banyak kalangan juga memperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat dengan membandingkan proporsi pengeluaran kelompok berdasarkan Kuantil dimana pengelompokan Kuantil membagi habis per 20 persen masyarakat .

Analisis ketimpangan tersebut memerlukan berbagai ukuran. Saat ini, belum tersedia data pendapatan, ketimpangan pendapatan diproksi dengan pengeluaran. Metode pengukuran ketimpangan pendapatan dengan berbagai sudut pandang. Secara umum akan menyoroti tentang besaran pendapatan yang akan diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan, dari kelompok pendapatan terendah, menengah hingga tertinggi. Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian ukuran yang lazim digunakan lainnya adalah rasio 20 persen golongan teratas terhadap 20 persen penduduk golongan terbawah. Apakah semakin timpang antara kelompok termiskin dan terkaya atau ketimpangan menurun secara periodik. Atau telah terjadi perdeseran dominasi kelompok masyarakat dalam menikmati kue pendapatan total suatu wilayah.

Tabel 5.1.1 Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Kuantil Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantil 1	6,20	5,99	5,99	5,85	6,02
Kuantil 2	9,45	9,09	8,97	8,98	9,34
Kuantil 3	13,59	14,05	13,36	13,29	13,79
Kuantil 4	20,50	23,08	21,56	21,09	21,97
Kuantil 5	50,26	47,79	50,12	50,79	48,88
Q5/Q1	8,11	7,97	8,36	8,68	8,12

Sumber: Susenas 2015-2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Tabel 5.1.1 memberikan gambaran tentang perkembangan distribusi/ketimpangan pendapatan periode tahun 2015-2019 dengan proksi pengeluaran. Secara umum selama 5 tahun terakhir ketimpangan pendapatan masih terjadi meski mulai menurun. Pada tahun 2015, 20 persen penduduk dengan penghasilan terendah masih menerima 6,20 persen. Angka ini terus menurun selama 3 tahun berikutnya. Tahun 2019, kondisinya membaik. Penduduk pada kelompok 20 persen penduduk termiskin menerima 6,02 total pengeluaran DIY. Pola hampir sama terjadi pada Kuantil pengeluaran 2 hingga Kuantil 4. Pangsa pengeluaran yang diterima oleh Kuantil 2 hingga 4 berkisar pada tahun 2019 berkisar antara 9,34 persen hingga 21,97 persen. Angka ini lebih tinggi daripada tahun 2018 pada Kuantil pengeluaran 1 hingga 4.

Sebaliknya, persentase yang diterima kelompok penduduk terkaya (Kuantil 5) berfluktuatif dengan cenderung menurun. Bila pada tahun 2015, kelompok penduduk ini masih menikmati 50,26 persen, kemudian turun menjadi 47,97 persen pada tahun 2016. Proporsi jumlah pendapatan yang diterima kelompok ekonomi teratas kembali naik pada dua tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 turun menjadi 48,88 persen.

Besaran perubahan proporsi pengeluaran yang diterima masing-masing kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa pada tahun 2019, hanya 20 persen penduduk terkaya dengan proporsi pendapatan yang diterima lebih rendah dari sebelumnya. Sementara 4 kelompok ekonomi berikutnya bertambah.

Lebih lanjut, distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh porsi pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk terkaya dibagi dengan penduduk termiskin (Todaro:2004). Pada Tabel 5.1.1 tampak jelas bahwa rasio Q5 terhadap Q1 pada tahun 2015-2019 berkisar antara 7 hingga 8. Secara lengkap, proporsi pendapatan yang diterima kelompok 20 persen teratas 8,11 kali dibandingkan yang diterima penduduk di kelompok Kuantil 1. Rasio tersebut turun sebesar 0,13 menjadi 7,97 pada tahun 2016. Kemudian, rasio tersebut terus meningkat dalam 2 tahun selanjutnya. Kemudian di tahun 2019 turun kembali sebesar 0,32 poin persen,

Tabel 5.1.2 Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil Pengeluaran Perkapita dan Kabupaten Kota, 2015-2019

Kabupaten/kota	Kuantil 1	Kuantil 2	Kuantil 3	Kuantil 4	Kuantil 5	Q5/Q1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	7,70	10,68	15,34	23,20	43,08	5,60
Bantul	5,95	9,14	13,76	22,91	48,25	8,11
Gunungkidul	8,72	11,91	15,63	22,26	41,47	4,75
Sleman	6,12	9,39	13,69	23,23	47,58	7,77
Yogyakarta	6,36	10,61	15,69	24,63	42,72	6,72
D.I.Yogyakarta	6,02	9,34	13,79	21,97	48,88	8,12

Sumber Sumber: Susenas 2015-2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Secara spasial, Tabel 5.2.1 menyajikan distribusi pengeluaran menurut Kabupaten/kota Pola distribusi pengeluaran menurut kuantil pengeluaran pada tahun 2019 hampir serupa di seluruh Kabupaten/kota. Besaran proporsi pengaluaran terhadap total pengeluaran DIY semakin besar seiring dengan meningkatnya kuantil pengeluaran. Penduduk pada kuantil 1 menerima sekitar 5,95 persen hingga 8,72 persen dari total pengeluaran DIY. Sementara golongan ekonomi teratas (Q5) telah menguasai lebih dari 40 persen dari total pengeluaran masyarakat di semua kabupaten/kota.

Hal lain yang dapat diamati dari tabel 5.1.2 adalah rasio Q5/Q1. Kelompok penduduk 20% teratas masih sangat mendominasi. Rasio terbesar adalah di Kabupaten Bantul yakni sebesar 8,11 persen dan terendah adalah di Kabupaten Gunungkidul yakni 4,75 . Artinya, panga penguasaan pengeluaran di wilayah Bantul untuk 20 persen pengeluaran tertinggi sekitar 8 kali lebih dibandingkan penerimaan oleh 20 persen pengeluaran terendah.

5.2. Perkembangan Pengeluaran Menurut Kuantil di D.I. Yogyakarta

Kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan berbeda seiring dengan perkembangan waktu. Semula, setiap penduduk berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan (kebutuhan dasar), kemudian apabila telah terpenuhi akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan yaitu kesehatan, pendidikan dan lainnya. Kemampuan untuk mengendalikan kebutuhan makanan tergantung dari kemampuan rumah tangga untuk membeli maupun kemampuan untuk memproduksi sendiri. Secara alamiah, kebutuhan makanan akan mencapai titik jenuh sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran makanan dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Adanya perubahan komposisi pengeluaran digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2.1 Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kuantil di D.I. Yogyakarta (Rupiah), 2015-2019

Kuantil	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	212,526,214,746	238,125,759,838	256,405,835,339	288,958,624,967	309,226,156,076
2	323,973,952,548	361,121,591,593	383,500,178,703	443,816,444,510	479,520,765,482
3	465,684,609,918	558,333,051,838	571,559,967,049	656,435,361,470	708,076,015,205
4	702,628,340,424	917,162,238,226	922,067,658,798	1,041,924,509,128	1,128,113,362,137
5	1,722,839,546,103	1,899,001,914,011	2,144,165,416,789	2,509,420,680,727	2,510,080,671,178
Total	3,427,652,663,739	3,973,744,555,507	4,277,699,056,677	4,940,555,620,801	5,135,016,970,077

Sumber: Susenas 2015-2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Berdasarkan nilai absolutnya bahwa perkembangan distribusi pengeluaran dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan jumlah pengeluaran yang meningkat untuk semua kuantil pengeluaran. Hal ini karena adanya kenaikan harga barang maupun jasa dan jumlah

penduduk yang semakin meningkat. Total pengeluaran penduduk secara absolut dapat dilihat pada Tabel 5.2.1. Meskipun secara persentase pada kuantil 1 tahun 2019 cukup kecil namun secara absolut total pengeluaran cukup besar. Terlihat ada kesenjangan yang berarti antara total pengeluaran pada kuantil bawah dengan kuantil atas. Total pengeluaran kuantil 5 lebih dari lima belas kali lipat dibandingkan dengan total pengeluaran pada kuantil 1. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun kue pembangunan banyak dinikmati pada kuantil atas namun pada kuantil bawah tetap ikut menikmati meskipun besarnya tidak terlalu banyak.

Ditinjau dari tipe daerah, bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di perkotaan jauh lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan perdesaan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di perkotaan sebesar 1.518.744 rupiah sedangkan di perdesaan sebesar 855.953 rupiah. Berdasarkan kuantil, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada masing-masing kuantil untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di perkotaan untuk kuantil 5 delapan kali lipat rata-rata pengeluaran kuantil 1. Sedangkan untuk rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di perdesaan untuk kuantil 5 sebesar tujuh kali lipat rata-rata pengeluaran kuantil 1. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antar golongan pengeluaran baik di perkotaan maupun di perdesaan, selain itu adanya kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Kuantil dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, 2019

Kuantil	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantil 1	411,709	392,974	403,611
Kuantil 2	629,691	618,689	626,137
Kuantil 3	927,829	912,639	923,925
Kuantil 4	1,478,272	1,447,372	1,469,154
Kuantil 5	3,292,528	2,866,602	3,274,065
Jumlah	1,518,744	855,953	1,339,726

Sumber: Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan paling rendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 823.899 rupiah diikuti Kabupaten Kulon Progo

sebesar 904.901 rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 1.745.570 rupiah diikuti Kabupaten Sleman sebesar 1.728.444 rupiah. Kedua wilayah tersebut merupakan pusat perekonomian di D.I. Yogyakarta dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kue pembangunan di D.I. Yogyakarta banyak dinikmati oleh penduduk di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Kuantil dan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, 2019

Kabupaten/Kota	Kuantil				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	346,907	485,878	692,319	1,051,087	1,948,777
Bantul	375,961	577,131	865,019	1,450,611	3,038,238
Gunungkidul	359,256	488,808	648,430	919,366	1,699,398
Sleman	529,244	815,076	1,177,796	2,002,386	4,117,558
Yogyakarta	553,831	929,733	1,372,993	2,137,834	3,728,325
D.I. Yogyakarta	403,611	626,138	923,925	1,469,154	3,274,065

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Standar kelompok pengeluaran tingkat kabupaten/kota berbeda-beda. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di Kota Yogyakarta pada kuantil 1 sebesar 553,831 rupiah. Nilai tersebut apabila di Kabupaten Gunungkidul akan berada diantara kuantil 2 maupun 3. Begitu juga untuk rata-rata pengeluaran perkapita untuk kuantil 5 di Gunungkidul sebesar 1.699.398 rupiah, apabila didasarkan pada pengeluaran perkapita di Kota Yogyakarta akan berada pada kelompok kuantil 3 maupun 4. Dengan demikian, penduduk yang dikatakan miskin atau termasuk pada golongan 20 persen terbawah pada suatu wilayah belum tentu masuk pada golongan 20 persen terbawah di wilayah lain. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh kemampuan penduduk dalam mengakses kebutuhan barang maupun jasa, tingkat harga pada suatu wilayah tersebut, serta gaya hidup penduduknya. Kondisi pengelompokan selengkapnya di Lampiran.

Hukum Engel menyatakan bahwa apabila selera tidak berbeda, maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka perlahan akan terjadi pergeseran penurunan porsi pendapatan

yang digunakan untuk belanja makanan. Proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran merupakan indikator dini yang mampu menggambarkan derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Di D.I. Yogyakarta, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 587.032 rupiah dengan perbedaan cukup tinggi antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Rata-rata pengeluaran perkapita kelompok makanan di daerah perkotaan sebesar 546.445 rupiah dan daerah perdesaan sebesar 436.764 rupiah.

Tabel 5.2.2 Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kuantil di D.I. Yogyakarta, 2019

Kuantil	Makanan			Bukan Makanan		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	256,252	264,803	259,948	155,456	128,171	143,663
2	374,132	373,510	373,931	255,558	245,179	252,206
3	488,390	513,467	494,835	439,440	399,172	429,090
4	659,691	661,338	660,177	818,581	786,034	808,977
5	956,700	635,165	942,762	2,335,828	2,231,437	2,331,303
Total	587,032	436,764	546,445	931,712	419,189	793,281

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS Prov. D.I. Yogyakarta

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan sebesar 793.281 rupiah. Apabila ditinjau menurut tipe daerah, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan di daerah perkotaan sebesar 931.712 rupiah dan daerah perdesaan sebesar 419.189 rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan di perkotaan lebih dari dua kali pengeluaran di perdesaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakatnya dan didukung dengan ketersediaan barang dan jasa di perkotaan lebih kompleks dibandingkan di perdesaan.

Ditinjau dari kuantil, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada kuantil 1-3 lebih besar daripada kelompok bukan makanan. Sebaliknya, pada kelompok kuantil 4 dan 5 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan lebih kecil daripada kelompok bukan makanan. Hal yang sama juga terjadi untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan bahwa pada kuantil 1-3 pengeluaran makanan lebih besar daripada bukan

makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka secara perlahan akan terjadi pergeseran penurunan komposisi pengeluaran untuk makanan.

Pengeluaran perkapita untuk kelompok bukan makanan terlihat sekali kesenjangan, pada kuantil 1 di perkotaan dengan rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 155.456 rupiah sedangkan pada kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah. Sama halnya di daerah perdesaan untuk kuantil 1 rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 128.171 rupiah dan kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah. Rata-rata pengeluaran tersebut di perkotaan untuk kuantil 5 adalah 15 kali lipat pengeluaran kuantil 1 untuk di perkotaan sedangkan untuk di perdesaan kuantil 5 sebesar 17 kali lipat pengeluaran bukan makanan pada kuantil 1. Sedangkan kesenjangan rata-rata pengeluaran kelompok makanan antara kuantil 1 terhadap kuantil 5 di daerah perkotaan 3 kali lipat, dan perdesaan sebesar 2 kali lipat. Besarnya ketimpangan yang terjadi untuk rata-rata pengeluaran perkapita bukan makanan tersebut karena pada golongan atas kebutuhan akan makanan sudah tercukupi dan seiring dengan peningkatan pendapatannya akan menggeser komposisi pengeluaran makanan menjadi bukan makanan.

5.3. Karakteristik Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran

Tabel 5.3.1 memberikan gambaran mengenai pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Rata-rata pengeluaran pada desil pertama (kelompok 10 persen terbawah) sejumlah 342.219 rupiah per kapita per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar 168.462 rupiah per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar 395.020 rupiah per kapita per bulan.

Selanjutnya seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran penduduk, pengeluaran konsumsi penduduk juga meningkat. Namun jika kelompok pengeluaran penduduk terbawah (desil 1) dan teratas (desil 10) dibandingkan, perbedaan pengeluaran per kapita per bulan antar dua kelompok tersebut cukup timpang. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk terkaya (desil 10) lebih dari 12 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran terbawah (desil 1). Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10 persen terkaya mencapai Rp 4.250.727 per kapita per bulan, sedangkan pada kelompok pengeluaran terbawah hanya mencapai Rp 349.774 per kapita per bulan..

Tabel 5.3.1 Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Desil Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Desil	Pengeluaran per Kapita per Bulan			
	Rata-rata (Rupiah)	Minimum (Rupiah)	Maksimum (Rupiah)	Simpangan Baku (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Desil 1	349.774	168.462	406.148	41.262
Desil 2	457.188	406.214	512.138	31.510
Desil 3	566.158	512.815	622.226	33.717
Desil 4	686.729	622.618	756.127	36.296
Desil 5	829.620	757.114	919.631	46.946
Desil 6	1.018.942	920.028	1.153.857	61.014
Desil 7	1.283.558	1.154.213	1.421.632	83.551
Desil 8	1.655.258	1.421.761	1.901.678	134.651
Desil 9	2.302.055	1.904.171	2.736.313	231.522
Desil 10	4.250.727	2.738.256	20.665.196	2.214.059

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

5.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah kesenjangan. Hal tersebut karena investasi pada sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan. Dalam laporan Bank Dunia (2015) mengenai tingginya kesenjangan di Indonesia salah satunya disebabkan karena ketidaksetaraan yang diterima oleh penduduk dalam hal pelayanan kebutuhan dasar, antara lain pendidikan.

Menurut Yang & Qiu (2016) pendidikan awal memainkan peran penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan dan mobilitas pendapatan antar generasi. Pendidikan yang tinggi dapat terbentuk pada berapa lama mereka menempuh pendidikan atau pada tingkatan pendidikan tinggi, sedangkan mereka yang tidak mengenal pendidikan akan jauh dari kualitas yang tinggi sebagai manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan pendidikan di masyarakat. Pencapaian pendidikan yang tinggi memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan orang memiliki kehidupan yang lebih baik dan ketimpangan pendapatan semakin rendah.

Tabel 5.3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018

Desil	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	< SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desil 1	26,05	23,46	23,58	24,71	2,20	100
Desil 2	22,50	21,08	21,91	30,89	3,62	100
Desil 3	16,10	20,79	23,44	36,88	2,78	100
Desil 4	14,62	22,91	22,46	35,78	4,23	100
Desil 5	14,72	14,51	22,79	40,30	7,68	100
Desil 6	12,06	15,69	19,73	41,09	11,43	100
Desil 7	11,17	13,40	15,88	44,25	15,30	100
Desil 8	9,67	12,11	17,47	35,58	25,17	100
Desil 9	7,85	7,59	10,45	40,56	33,54	100
Desil 10	9,36	3,94	10,13	36,32	40,26	100

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Tabel 5.3.2 maupun tabel 5.3.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendidikan yang cukup signifikan antar kelompok pengeluaran penduduk. Pada kelompok pengeluaran 10 persen terendah (desil 1) terlihat bahwa lebih dari separuh penduduknya berpendidikan SD ke bawah, yaitu pada tahun 2019 mencapai 51,94 persen. Sedangkan penduduk yang berpendidikan universitas hanya ada sebanyak 1,01 persen dari seluruh penduduk yang masuk pada kelompok desil 1. Lebih lanjut, penduduk yang berada pada desil 1 sampai desil 6 lebih dari separuhnya berpendidikan SLTP ke bawah. Bahkan penduduk pada desil 1 dan desil 2 yang berpendidikan SLTP ke bawah lebih dari 70 persen. Sebaliknya jumlah penduduk pada desil 7 ke atas lebih dari separuhnya berpendidikan SLTA ke atas. Penduduk pada kelompok pengeluaran 10 persen teratas merupakan tamatan SMA dan universitas, yaitu mencapai 84,99 persen. Bahkan penduduk kelompok 10 persen teratas (terkaya) pada tahun 2019 lebih dari 40 persen berpendidikan universitas atau tepatnya mencapai 43,51 persen dan yang berpendidikan SD ke bawah tidak lebih dari 8 persen.

Selanjutnya penduduk pada kelompok pengeluaran desil 9 ke bawah sebagian besar berpendidikan SLTA. Kondisi ini diduga terkait dengan intervensi pemerintah berupa pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) sampai jenjang SLTA sehingga memberikan kemudahan akses jenjang pendidikan ini bagi semua kelompok pengeluaran.

**Tabel 5.3.3 Persentase Penduduk Menurut
Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019**

Desil	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	< SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desil 1	27,81	24,13	22,84	24,21	1,01	100
Desil 2	24,88	22,74	23,96	26,23	2,19	100
Desil 3	20,74	21,88	22,96	31,66	2,75	100
Desil 4	18,67	21,93	24,95	31,20	3,25	100
Desil 5	17,13	15,73	21,94	35,75	9,44	100
Desil 6	14,30	13,67	22,36	39,52	10,15	100
Desil 7	13,77	14,90	18,65	37,09	15,59	100
Desil 8	12,04	13,02	18,08	33,72	23,14	100
Desil 9	9,72	6,04	12,34	37,66	34,23	100
Desil 10	4,32	2,89	7,79	41,47	43,51	100

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

5.3.2. Kesehatan

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental serta sosial dan bukan sekedar bebas penyakit serta kelemahan fisik (Todaro;2004). Derajat kesehatan seseorang berkaitan dengan produktifitas. Tubuh dengan stamina yang bagus akan dapat bekerja dengan maksimal sehingga produktifitas meningkat. Dengan demikian, mereka akan menerima upah yang lebih tinggi.

Ketimpangan pendapatan antar individu pun akhirnya muncul bila terdapat kesenjangan dalam hal derajat kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang antara lain rendahnya konsumsi makanan yang bergizi, kurang ya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai (Arsyad:1992).

Indikator yang dapat digunakan dalam menggambarkan kesehatan masyarakat adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, presentase penduduk yang sakit menurut tempat fasilitas kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Ini adalah indikator output. Sementara indikator input ditunjukkan dengan jaminan kesehatan yang digunakan untuk rawat inap atau rawat jalan.

Selanjutnya, keadaan sanitasi dan lingkungan digambarkan oleh kondisi air dan sanitasi yang diakses masyarakat. Kedua indikator ini sebagai indikator awal kualitas hidup manusia dengan upaya mengurangi terjangkitnya penyakit menular. Sementara indikator input berupa kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan yang bergizi akan diwakili dengan ukuran ketahanan pangan. Rumah tangga akan dikelompokkan menurut derajat ketahanan pangan. Tiap level merahan pangan akan menunjukkan posisi rumah tangga dilihat dari sisi kemampuan untuk mendapatkan makanan bergizi serta kualitas makanan yang telah di konsumsi. Ketidakmampuan rumah tangga dalam asupan makanan yang bergizi akan mempengaruhi tingkat harapan hidup, mengurangi ketahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Indikator kesehatan yang pertama adalah angka keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan merupakan semua keluhan yang dirasakan penduduk selama sebulan terakhir seperti batuk, panas, pilek hingga penyakit kronis. Bila tidak segera diberikan penanganan keluhan kesehatan dapat mengganggu aktivitas penduduk seperti dalam bekerja, sekolah atau kegiatan sehari-hari.

Tabel 5.3.2.1 menunjukkan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut kelompok pengeluaran Kuantil tahun 2019. Presentase penduduk di DIY yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 35,67 persen. Hal ini berarti sebanyak 64,33 persen penduduk tidak mengalami keluhan kesehatan. Secara umum persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada semua kelompok pengeluaran Kuantil tidak jauh berbeda yakni mencapai angka diatas 33 persen.

Tabel 5.3.2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil, 2019

Kelompok Pengeluaran	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Kuantil 1	34.40	65.60
Kuantil 2	35.35	64.65
Kuantil 3	36.85	63.15
Kuantil 4	38.22	61.78
Kuantil 5	33.54	66.46
Total	35.67	64.33

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Selain mengobati sendiri, keluhan kesehatan diatasi dengan rawat jalan. Tabel 5.3.2.1 memberikan informasi tentang presentase penduduk yang rawat jalan sebulan yang lalu berdasarkan kelompok pengeluaran Kuantil dan fasilitas kesehatan yang digunakan. Fasilitas kesehatan yang dicakup meliputi fasilitas kesehatan modern seperti rumah sakit, praktek dokter, klinik/praktek bersana, puskesmas dan fasitas kesehatan tradisional/alternatif serta falitas kesehatan lainnya.

Hasil Susenas Maret 2019, mencatat puskesmas paling banyak dikunjungi penduduk untuk rawat jalan, diikuti oleh pemanfaatan praktek dokter/bidan serta rumah sakit swasta. Sementara, praktek pengobatan tradisional tetap masih menjadi pilihan 0,80 persen penduduk meski fasilitas kesehatan modern sudah mudah dijangkau.

Bila ditinjau menurut kelompok pengeluaran Kuantil, 20 persen penduduk pengeluaran terendah dan 20 persen penduduk terendah ke-2 paling banyak mengunjungi puskesmas/pustu yakni 47,60 persen. Persentase ini turun seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran Kuantil. Seperti penduduk pada kelompok Kuantil 5 hanya 13,09 persen yang memanfaatkan penduduk.

Sebaliknya persentsae penduduk yang paling banyak memanfaatkan rumah sakit swasta adalah mereka di golongan Kuantil 5(34,32 persen). Angka ini semakin menurun sejalan dengan menurunnya Kuantil pengeluaran. Hanya 6,50 persen penduduk di kelompok Kuantil 1 rawat jalan di rumah sakit swasta.

Tabel 5.3.2.2 Persentase Penduduk yang Rawat Jalan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Fasilitas Kesehatan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	RS Pemerintah	RS swasta	Praktik dokter/ bidan	klinik/ praktik dokter bersama	Puskesmas /pustu	UKBM	Praktik tradisional/ alternatif	Lain nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kuantil 1	6.00	6.50	33.82	11.99	47.6	0.49	0.53	0.14
Kuantil 2	4.95	13.65	29.43	16.55	40.5	1.19	0.16	0.67
Kuantil 3	10.07	14.52	38.63	11.13	30.9	1.50	1.60	2.19
Kuantil 4	7.00	21.59	31.22	19.92	27.2	0.51	0.65	0.99
Kuantil 5	9.30	34.32	33.40	17.75	13.0	0.33	1.04	1.54
Total	7.45	17.86	33.33	15.41	32.1	0.81	0.80	1.10

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Sementara, bila dicermati lebih lanjut, persentase penduduk yang mengakses tempat praktek dokter/bidan di semua kelompok pengeluaran Kuantil tidak jauh berbeda yaitu di atas 29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan ini mudah diakses dan terjangkau untuk penduduk dari kalangan kelompok ekonomi.

Bila mengobati sendiri atau rawat jalan belum dapat menyembuhkan keluhan kesehatan yang diderita, penduduk akan memilih untuk rawat inap. Terdapat 5 fasilitas kesehatan yang dikunjungi penduduk DIY yaitu rumah sakit swasta/pemerintah, praktek dokter/bidan, klinik/praktek dokter bersama serta puskesmas/pustu.

Tabel 5.3.2.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 13,84 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memanfaatkan rumah sakit swasta. Berikutnya adalah praktek dokter/bidan dan posisi ke tiga ada puskesmas atau pustu. Sisanya mengakses RS pemerintah dan klinik/praktek dokter bersama.

Bila ditinjau menurut kelompok ekonomi, tampak bahwa penduduk pada kelompok 20 persen terendah dan kelompok 20 persen terendah ke 2 paling banyak memilih puskesmas/pustu sebagai tempat rawat inap. Sementara penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 3 hingga Kuantil 5 terbanyak menggunakan rumah sakit swasta. Tercatat 18,46 persen penduduk di kelompok pengeluaran Kuantil 5 yang mengakses rumah sakit swasta. Sebaliknya penduduk pada kelompok ekonomi termiskin yang memanfaatkan rumah sakit swasta hanya 7,58 persen.

Tabel 5.3.2.3 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Fasilitas Kesehatan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	RS pemerintah	RS swasta	Praktik dokter/ bidan	Klinik/ praktik dokter bersama	Puskesmas/ pustu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantil 1	7,77	7,58	10,32	0,00	16,40
Kuantil 2	4,78	9,46	8,62	7,99	11,17
Kuantil 3	11,18	13,97	9,30	3,82	10,00
Kuantil 4	5,76	16,33	9,33	10,65	4,87
Kuantil 5	8,57	18,46	10,64	2,36	4,95
Total	7,67	13,84	9,68	5,11	8,79

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS Prov. D.I. Yogyakarta

Sementara kendala cukup berarti bagi penduduk untuk mengobati keluhan kesehatan adalah faktor biaya. Keberadaan jaminan kesehatan sangat membantu penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun demikian, tidak semua fasilitas kesehatan tersedia atau dapat diakses menggunakan jaminan kesehatan. Pemanfaatan jaminan kesehatan dalam mengakses fasilitas kesehatan dapat disajikan dari data Susenas Maret 2019.

Jaminan kesehatan yang dicakup meliputi BPJS PBI, BPJS Non PBI, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta dan perusahaan/kantor. Informasi penting lainnya adalah menyajikan data tentang penduduk yang mengakses fasilitas kesehatan tanpa menggunakan jaminan kesehatan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 29,51 persen penduduk DIY telah menggunakan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI pada saat rawat jalan. Sementara 19,33 persen penduduk menyatakan mengakses fasilitas kesehatan dengan BPJS Non PBI. Bagi mereka anggota rumah tangga nya bekerja, sebanyak 1,44 persen memilih menggunakan jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor. Sementara jamkesda dan Asuransi kesehatan hanya digunakan masing-masing 0,59 persen dan 0,34 persen. Namun demikian, ternyata sebanyak 48,82 persen penduduk tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan.

Ditinjau menurut kelompok pengeluaran Kuantil, penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 1 hingga 3 paling banyak menggunakan BPJS PBI untuk mengakses layanan rawat jalan. Masing-masing mencapai 46,36 persen, 36,03 persen serta 32,72 persen. Dilain pihak, masih ditemukan informasi bahwa 8,95 persen penduduk pada kelompok ekonomi teratas juga masih memanfaatkan BPJS PBI.

Tabel 5.3.2.3 Persentase Penduduk yang Rawat Jalan menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Jaminan Kesehatan yang digunakan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi kesehatan swasta	Perusahaan /kantor	tidak menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kuantil 1	46,36	6,77	0,71	0,00	0,98	45,18
Kuantil 2	36,03	15,08	1,22	1,32	0,78	45,58
Kuantil 3	32,72	15,98	0,37	0,00	0,83	50,23
Kuantil 4	21,88	27,79	0,60	0,15	1,91	47,68
Kuantil 5	8,95	32,12	0,00	0,27	2,80	55,87
Total	29,51	19,33	0,59	0,34	1,44	48,82

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS Prov. D.I. Yogyakarta

Di lain pihak sebanyak 32,12 persen penduduk kelompok ekonomi teratas dan 27,79 persen penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 4 memilih menggunakan BPJS Non PBI saat rawat jalan. Sementara masih terdapat 6,77 persen penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 1 yang rawat jalan menggunakan BPJS Non PBI.

Selain rawat jalan, jaminan kesehatan juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan kesehatan berupa rawat inap. Tabel 5.3.2.4 menyajikan persentase penduduk yang rawat inap. Pada tahun 2019, sebanyak 41,20 persen penduduk menggunakan BPJS PBI dan 29,07 persen memanfaatkan BPJS Non PBI saat rawat inap. Sementara kurang dari 3 persen penduduk memilih jamkesda, asuransi kesehatan swasta atau asuransi perusahaan/kantor. Sementara sebanyak 23,15 persen bahkan tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap.

Penggunaan berbagai jaminan kesehatan oleh kelompok pengeluaran cukup beragam. Tak jauh berbeda saat mengakses layanan kesehatan untuk rawat jalan, lebih dari 60 persen penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 1 dan Kuantil 2 paling banyak menggunakan BPJS PBI untuk rawat inap. Di sisi lain, BPJS Non PBI paling banyak dimanfaatkan oleh penduduk pada kelompok pengeluaran Kuantil 4 dan Kuantil 5 yakni 33,26 persen dan 48,92 persen. Sementara mereka yang berada di kelompok pengeluaran Kuantil lebih menggunakan BPJS PBI dan BPJS Non PBI masing-masing mencapai 48,44 persen dan 26,61 persen.

Tabel 5.3.2.4 Persentase Penduduk yang Rawat Inap menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Jaminan Kesehatan yang digunakan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	BPJS PBI	BPJS Non PBI	Jamkesda	Asuransi kesehatan swasta	Perusahaan /kantor	Tidak menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kuantil 1	63,97	10,68	5,55	0,00	0,61	19,19
Kuantil 2	61,70	11,00	4,12	1,01	0,36	21,81
Kuantil 3	48,44	28,61	1,61	0,17	4,25	16,91
Kuantil 4	32,83	33,26	1,17	0,00	2,86	30,20
Kuantil 5	15,90	48,92	0,29	5,06	6,84	23,94
Total	41,20	29,07	2,20	1,36	3,32	23,15

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Penggunaan jaminan kesehatan lainnya juga menunjukkan perentase berbeda antar kelompok pengeluaran, namun dengan angka perentase cukup kecil. Seperti asuransi

kehatan swasta dan asuransi perusahaan/kantor paling banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekonomi teratas yakni 6,84 persen dan 5,06 persen. Sementara jamkesda terbanyak adalah mereka di kelompok Kuantil 1 dan Kuantil 2.

Indikator kesehatan berikutnya adalah kondisi perumahan. Terdapat dua indikator yakni air layak dan sanitasi layak. Masing-masing merupakan ukuran penting untuk melihat derajat kesehatan suatu rumah tangga dengan melihat kemampuan rumah tangga dalam mengakses air minum dan sanitasi. Penggunaan sanitasi dan air minum layak merupakan prasyarat untuk upaya pencegahan penyakit menular yang di sebabkan untuk bakteri pada air minum dan penggunaan fasilitas sanitas.

Tabel 5.3.2.5 memberikan informasi tentang kualitas air minum dan sanitasi yang digunakan oleh rumah tangga. Tercatat sebanyak 94,94 persen rumah tangga telah mengakses air minum layak. Artinya hanya 5,06 persen rumah tangga yang masih mengkonsumsi air minum tidak layak. Bila dilihat menurut Kuantil, tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Sementara, ditinjau dari indikator sanitasi layak, sudah 94,67 persen yang telah mengakses sanitasi layak. Menurut kelompok pengeluaran, persentase rumah tangga mengakses sanitasi layak semakin besar seiring meningkatnya tingkat ekonomi rumah tangga. Sebanyak 90,08 persen rumah tangga pada kelompok Kuantil 1 telah mengakses sanitasi layak dan persentase semakin besar hingga pada Kuantil 5 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak telah mencapai 97,82 persen.

Tabel 5.3.2.5 Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Indikator Perumahan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	Air Layak		Sanitasi Layak	
	Tidak	Ya	Tidak	Ya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuantil 1	11,07	88,93	9,92	90,08
Kuantil 2	7,06	92,94	7,79	92,21
Kuantil 3	6,49	93,51	4,80	95,20
Kuantil 4	2,88	97,12	4,47	95,53
Kuantil 5	1,07	98,93	2,18	97,82
Total	5,06	94,94	5,33	94,67

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

Lebih lanjut derajat kesehatan suatu rumah tangga dapat ditunjukkan oleh bagaimana asupan gizi rumah tangga serta kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan bergizi. Salah satunya melalui derajat ketahanan rumah tangga.

Hasil susenas memperlihatkan derajat ketahanan pangan akan mengelompokkan rumah tangga menjadi 4 bagian yakni rawan pangan, kurang pangan, rentan pangan serta tahan pangan. Masing-masing derajat ketahanan pangan memberikan pola yang beragam. Tahun 2019 sebanyak 61,74 rumah tangga telah berkategori tahan pangan, 24,47 rentan pangan, 9,54 kurang pangan dan sisanya berkategori rawan pangan.

Derajat ketahanan pangan memberikan pola yang beragam pada masing-masing kelompok pengeluaran. Tabel 5.2.3.6 memperlihatkan ketimpangan derajat ketahanan pangan antara rumah tangga pada kelompok pengeluaran Kuantil terendah dan Kuantil teratas.

Kuantil 1 didominasi oleh rumah tangga berkategori rentan pangan yakni sebesar 50,98 persen diikuti oleh rumah tangga rawan pangan dan kurang pangan. Sementara rumah tangga berkategori tahan pangan baru mencapai 7,57 persen.

Gambaran yang berbeda tampak pada derajat ketahanan pangan di Kuantil 5. Sebanyak 94,45 persen rumah tangga telah tahan pangan. Dengan demikian, 5,55 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran ini belum tahan pangan. Semakin rendah kelompok pengeluaran Kuantil semakin sedikit persentase rumah tangga masuk pada kategori tahan pangan.

Tabel 5.3.2.7 Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran Kuantil dan Derajat Ketahanan Pangan, 2019

Kelompok Pengeluaran Kuantil	Derajat Ketahanan Pangan				
	Rawan Pangan	Kurang Pangan	Rentan Pangan	Tahan Pangan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantil 1	21,26	20,19	50,98	7,57	100,00
Kuantil 2	2,79	11,56	47,61	38,05	100,00
Kuantil 3	0,58	8,58	27,95	62,89	100,00
Kuantil 4	1,22	7,60	12,64	78,54	100,00
Kuantil 5	0,00	4,26	1,40	94,34	100,00
Total	4,25	9,54	24,47	61,74	100,00

Sumber: Susenas 2019 diolah, BPS D.I. Yogyakarta

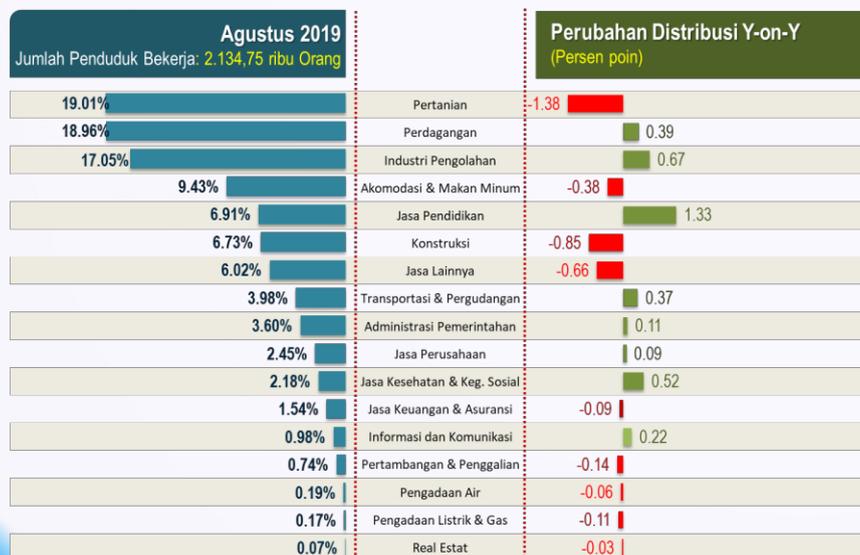
Poin penting dari analisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga mengindikasikan bahwa rumah tangga pada kelompok Kuantil 1 dan Kuantil 2 yang masuk rentan pangan

lebih dari 47 persen. Ariani dan Rachman (2003) menunjukkan bahwa rumah tangga yang termasuk dalam kategori rentan pangan mengindikasikan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi sebagian besar berasal dari pangan sumber energi yang harganya lebih murah. Meningkatkan pendapatan adalah solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui perbaikan asupan gizi.

5.3.3 Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang digambarkan dengan distribusi PDRB ADHB terlihat adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa dan sektor akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2019 terhadap PDRB berkisar pada angka sekitar 9 persen. Namun demikian, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi salah satu tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 yang terserap di sektor pertanian sebesar 19,01 persen dari total pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta atau 1,38 persen poin dibandingkan tahun 2018.

Gambar 5.3.1. Struktur Lapangan Pekerjaan Utama Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2019



Sumber: Sakernas Agustus 2018-2019

Kontribusi sektor pertanian yang semakin mengecil dengan jumlah tenaga kerja yang masih besar tersebut juga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di sektor ini. Dalam kaitannya dengan isu tentang kesenjangan, maka kondisi tersebut patut diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan di Daerah Isyimewa Yogyakarta. Pada tahun 2019, rata-rata produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 79,57 juta

rupiah per orang. Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, produktivitas pada sektor ini adalah relatif kecil. Adapun sektor perekonomian dengan tingkat produktivitas yang terbesar adalah sektor informasi komunikasi, konstruksi dan transportasi pergudangan. Rata-rata produktivitas di sektor informasi komunikasi sebesar 594,23 juta rupiah. Dengan adanya perbedaan tingkat produktivitas antar sektor ini maka kesenjangan pendapatan antar tenaga kerja merupakan suatu keniscayaan.

Tabel 5.3.4 PDRB ADHB, Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.255.030,70	166.592	79,57
2. Pertambangan dan Penggalian	722.619,20	10.143	71,24
3. Industri Pengolahan	18.172.378,50	264.908	68,60
4. Pengadaan Listrik dan gas	202.276,00	2.819	71,75
5. Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	139.653,10	2.513	55,57
6. Konstruksi	15.715.532,20	91.484	171,78
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	11.981.014,20	324.006	36,98
8. Transportasi dan Pergudangan	7.975.660,90	73.505	108,51
9. Pengadaan Akomodasi & Makan Minum	14.636.463,00	176.769	82,80
10. Informasi dan Komunikasi	11.283.225,30	18.988	594,23
11. Jasa-jasa lainnya	47.316.330	485.899	97,38

Sumber: BPS DIY 2019, diolah

Tabel 5.3.5 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan kuantil kelompok pengeluaran. Sebagian besar penduduk pada kelompok 20 persen pengeluaran terbawah (kuantil 1) menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usahanya. Proporsi penduduk dengan kelompok pendapatan 20 persen terbawah pada tahun 2019 paling banyak bekerja pada sektor pertanian, yaitu mencapai 34,23 persen. Penduduk kelompok pendapatan 20 persen terbawah berikutnya bekerja di sektor industri pengolahan yang mencapai 20,48 persen dan diikuti sektor perdagangan sebanyak

14,43 persen. Sedangkan proporsi penduduk dengan kelompok pendapatan 20 persen teratas atau terkaya (kuantil 5) paling banyak bekerja di sektor perdagangan yang mencapai 21,30 persen dan diikuti jasa pendidikan dengan proporsi 12,65 persen.

Tabel 5.3.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Kuantil Kelompok Pengeluaran Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Kuantil				
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,23	27,33	18,76	14,23	4,34
2. Pertambangan dan Penggalian	1,19	0,36	0,19	0,72	0,92
3. Industri Pengolahan	20,48	17,62	15,07	10,56	7,36
4. Pengadaan Listrik dan gas	0,24	0,07	0,43	0,52	0,20
5. Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,06	0,16	0,14	0,27	0,00
6. Konstruksi	8,96	9,99	8,47	5,94	2,70
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	14,43	17,96	21,40	22,92	21,30
8. Transportasi dan Pergudangan	1,88	3,78	3,92	4,05	4,33
9. Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	7,40	10,29	10,22	9,02
10. Informasi dan Komunikasi	0,18	0,54	1,63	0,43	2,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;	0,23	1,07	1,32	2,44	4,99
12. Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,15	0,65
13. Jasa Perusahaan	0,10	0,59	0,78	2,70	2,93
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	0,89	1,68	2,61	5,64	9,77
15. Jasa pendidikan	2,34	2,58	4,94	9,08	12,65
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,69	1,78	2,96	6,77
17. Jasa Lainnya.	6,84	8,18	8,27	7,16	9,30
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2019, diolah

5.4. Analisis Ketimpangan

5.4.1. Gini Rasio dan Kurva Lorenz

Gambar 5.4.1.1 memberikan informasi mengenai perkembangan gini rasio untuk D.I. Yogyakarta dan Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selama periode 2015 sampai dengan 2019, terlihat bahwa angka gini rasio untuk D.I. Yogyakarta selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2017, angka gini rasio di D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia (BPS, 2020). Disamping itu, gini rasio di D.I. Yogyakarta juga menunjukkan pola yang berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Hal tersebut berbeda dengan angka gini rasio rata-rata Indonesia yang menunjukkan penurunan yang konsisten.

Gambar 5.4.1.1. Perkembangan Gini Rasio D.I. Yogyakarta dan Indonesia, Maret 2015 – Maret 2019



Sumber: BPS DIY, 2015 – 2019

Pada tahun 2015, angka gini rasio D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 0,433. Sementara itu pada saat yang sama angka gini rasio Indonesia sebesar 0,408. Selanjutnya pada tahun 2016, angka gini rasio D.I. Yogyakarta dan Indonesia mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 0,42 dan 0,397. Namun, pada tahun 2017, angka gini rasio D.I. Yogyakarta meningkat menjadi 0,432 sementara angka gini rasio Indonesia justru mengalami penurunan menjadi 0,393. Setahun kemudian, angka gini rasio D.I. Yogyakarta kembali meningkat menjadi 0,441. Pada tahun yang sama, angka gini rasio Indonesia melanjutkan kembali penurunannya menjadi 0,389. Pada tahun 2019, angka gini rasio D.I. Yogyakarta turun menjadi 0,423. Meskipun mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, angka gini rasio tersebut masih sedikit lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pada tahun 2016 sedikit lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pada tahun 2019.

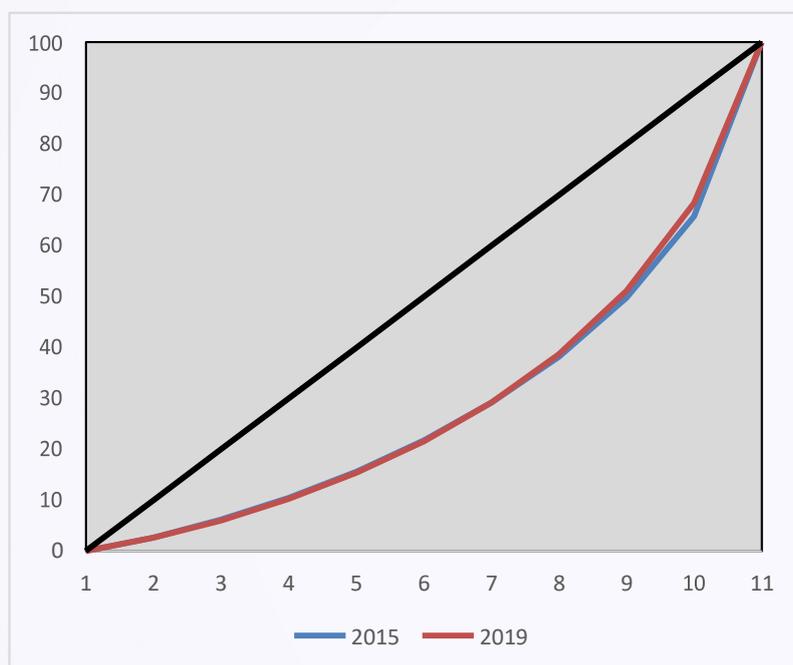
Relatif tingginya angka gini rasio D.I. Yogyakarta tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan tingkat pengeluaran antara kelompok masyarakat atas dengan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa hasil pembangunan masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di D.I. Yogyakarta.

Studi yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi (IMF, 2015). Dengan adanya ketimpangan, porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah ini. Pada akhirnya, dengan rendahnya tingkat pendidikan maka produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah.

Selain itu, IMF juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan memicu terjadinya konflik. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak negatif terhadap investasi pembangunan. Lebih lanjut, dengan adanya ketimpangan maka respon pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi juga menjadi semakin sulit karena kelompok masyarakat yang relatif heterogen.

Meskipun demikian, ketimpangan sampai dengan batasan tertentu mungkin belum mengakibatkan permasalahan karena menyediakan insentif bagi manusia untuk meningkatkan kapasitas dan keahliannya. Sebagai contoh, perbedaan tingkat upah yang biasanya diasosiasikan dengan adanya ketimpangan menjadi pendorong bagi pekerja untuk berkompetisi dan meningkatkan pendidikannya agar karir pekerjaannya juga meningkat. Selain itu, ketimpangan juga dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan jika menyediakan insentif bagi inovasi dan kewirausahaan (Lazer dan Rosen dalam IMF, 2015).

Gambar 5.4.1.2. Kurva Lorenz D.I. Yogyakarta 2015 dan 2019



Sumber: Hasil Pengolahan Susenas 2015 dan 2019

Gambar 5.4.1.2 adalah Kurva Lorenz yang menggambarkan tingkat ketimpangan D.I. Yogyakarta untuk tahun 2015 dan 2019. Terlihat bahwa jarak antara kurva Lorenz, baik tahun 2015 maupun tahun 2019, dengan sumbu diagonal masih cukup jauh. Semakin jauh jarak antara kurva Lorenz dengan sumbu diagonal menunjukkan tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Selain itu, dari gambar 5.4.1.2 terlihat bahwa kondisi ketimpangan D.I. Yogyakarta belum menunjukkan perkembangan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi tersebut sejalan dengan angka gini rasio yang relatif masih besar, dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Masih tingginya tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta diduga mempunyai kaitan

dengan tingkat perekonomian yang tidak merata di wilayah ini. Sebagai contoh, pada tahun 2019, perekonomian Kulon Progo hanya menghasilkan barang dan jasa senilai 8.772,58 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan perekonomian Kota Yogyakarta, nilainya hanya sepertiga kalinya. Demikian juga dengan Gunungkidul, nilai PDRB ADHB kabupaten ini hanya sebesar setengah dari PDRB ADHB Kota Yogyakarta (BPS DIY, 2020). Bahkan gabungan PDRB ADHB kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul masih lebih rendah daripada PDRB ADHB Sleman dan Kota Yogyakarta.

5.4.2. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur ketimpangan penduduk, Bank Dunia menggunakan indikator yang didasarkan pada distribusi pendapatan penduduk menurut kelompok pendapatan. Menurut ukuran tersebut, tingkat ketimpangan termasuk tinggi jika 40 persen kelompok terendah mempunyai total pendapatan kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan. Jika proporsi pendapatan dari 40 persen kelompok terendah sebanyak 12 – 17 persen, maka termasuk ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Adapun ketimpangan dianggap rendah jika 40 persen kelompok terendah mempunyai total pendapatan lebih dari 17 persen dari total pendapatan.

Tabel 5.4.2.1. Distribusi Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2015 – 2019 (Persen)

Waktu	Kelompok Penduduk		
	40 % Berpengeluaran Rendah	40 % Berpengeluaran Menengah	20 % Berpengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2015	14,79	34,02	51,18
Maret 2016	15,08	37,13	47,79
Maret 2017	14,96	34,92	50,12
Maret 2018	14,83	34,38	50,79
Maret 2019	15,36	35,76	48,88

Sumber: Susenas D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019

Tabel 5.4.2.1 menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta masih didominasi oleh 20 persen kelompok penduduk atas. Selama periode 2015 – 2019, kelompok penduduk ini mempunyai proporsi pengeluaran sebanyak kurang lebih 50 persen dari total

pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk berpengeluaran rendah tercatat berada pada rentang antara 14,79 persen sampai dengan 15,36 persen dari total pengeluaran penduduk D.I. Yogyakarta. Dengan demikian, jika menggunakan ukuran Bank Dunia, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di wilayah D.I. Yogyakarta selama periode 2015 – 2019 termasuk dalam kategori sedang/menengah.

Selain itu, meskipun berfluktuasi namun terlihat adanya kecenderungan semakin meningkatnya persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah. Pada tahun 2015, kelompok penduduk ini melakukan konsumsi sebanyak 14,79 persen dari total konsumsi penduduk D.I. Yogyakarta. Setahun kemudian, tingkat konsumsi kelompok penduduk ini meningkat menjadi 15,08 persen. Meskipun pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan konsumsi kelompok penduduk 40 persen terbawah, namun pada tahun 2019, proporsi konsumsi kelompok penduduk ini kembali meningkat menjadi 15,36 persen. Dengan semakin meningkatnya persentase pengeluaran kelompok penduduk ini, hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah fluktuasi yang terjadi baik pada angka gini rasio maupun ukuran Bank Dunia. Masih berfluktuasinya angka gini rasio dan persentase pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan mempunyai potensi yang besar untuk meningkat. Diperlukan program dan kebijakan yang lebih strategis agar tingkat ketimpangan dapat diturunkan secara lebih konsisten.

5.4.3. Indeks Palma

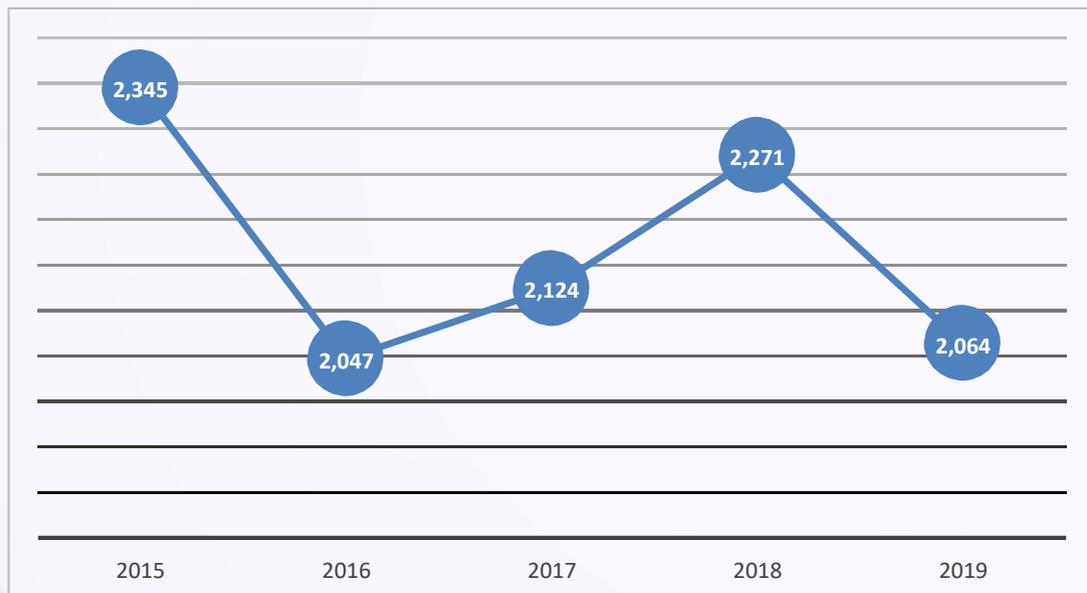
Indikator ketimpangan ini dikembangkan oleh Gabriele Palma pada tahun 2006 dan relatif cukup sederhana serta mudah dipahami. Indeks ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan antara kelompok 10 persen penduduk terkaya dengan kelompok 40 persen penduduk terbawah.

Pada tahun 2015, Indeks Palma di D.I. Yogyakarta sebesar 2,345. Hal tersebut berarti bahwa pangsa pengeluaran untuk 10 persen penduduk terkaya adalah sebesar 2,345 kali lebih tinggi daripada konsumsi yang dilakukan oleh 40 persen penduduk terbawah. Kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa distribusi pengeluaran di D.I. Yogyakarta sekitar 9,38 kali menjauh dari kesetaraan sempurna. Pada periode berikutnya, Indeks Palma cenderung menurun dari 2,047 pada tahun 2016 menjadi 2,064 pada tahun 2019. Dengan kata lain terjadi penurunan disparitas antara pengeluaran 10 persen penduduk terkaya

dengan pengeluaran 40 persen penduduk terbawah di D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya, jika memiliki angka gini rasio pada tahun 2015 sebesar 0,433 dan tahun 2019 sebesar 0,423 atau turun 0,01 poin. Sementara itu pada saat yang bersamaan Indeks Palmanya juga mengalami penurunan 0,281 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di DIY mengalami penurunan yang riil dengan dibuktikan menurunnya angka gini rasio dan indeks Palma. Akan tetapi kecenderungan percepatan dalam menikmati pendapatan di D.I. Yogyakarta untuk penduduk golongan atas masih lebih besar dari golongan 40 persen terbawah. Jika ini terus berlanjut tidak menutup kemungkinan angka gini rasio akan mengalami peningkatan kembali. Bila kita perhatikan Indeks Palma menurut kabupaten/kota tampak nilainya berfluktuasi dan bervariasi, mengikuti pola konsumsi dari penduduk 40 persen terbawah yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.

Gambar 5.4.3.1 Perkembangan Indeks Palma di D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

5.5. Variasi Ketimpangan

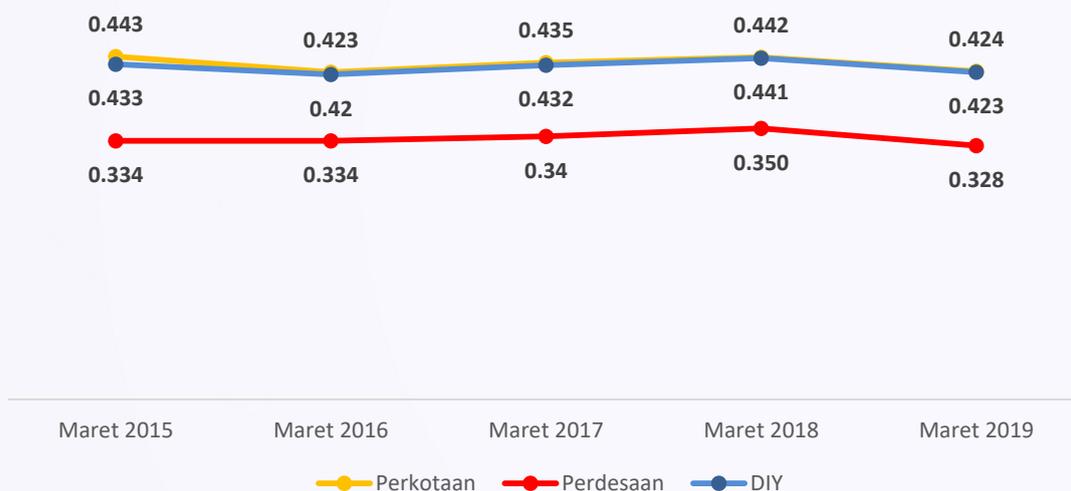
5.5.1. Perkotaan dan Perdesaan

Gambar 5.5.1.1. memberikan informasi mengenai tingkat ketimpangan di daerah perdesaan dan perkotaan D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Terlihat bahwa angka gini rasio di daerah perdesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan angka gini rasio di daerah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di perdesaan D.I. Yogyakarta lebih baik dibandingkan dengan daerah

perkotaan.

Pada tahun 2015, angka gini rasio di perdesaan tercatat sebesar 0,334. Selanjutnya pada tahun 2016, angka gini rasio di perdesaan tercatat tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2017, angka gini rasio meningkat menjadi 0,34. Setahun kemudian, angka gini rasio di perdesaan kembali meningkat menjadi 0,350. Peningkatan gini rasio selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan semakin melebarnya tingkat ketimpangan di perdesaan. Namun pada tahun 2019, angka gini rasio turun menjadi 0,328. Penurunan ini bahkan melampaui angka gini rasio pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan penduduk perdesaan pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya.

Gambar 5.5.1.1. Perkembangan Gini Rasio di Perdesaan dan Perkotaan di D.I. Yogyakarta, Maret 2015 – Maret 2019



Sumber: Susenas, 2015 -2019

Sementara itu pada kurun waktu yang sama, angka gini rasio di perkotaan selalu lebih tinggi daripada angka gini rasio di perdesaan. Pada tahun 2015, angka gini rasio di perkotaan sebesar 0,443 atau 1,33 kali angka gini rasio di perdesaan. Namun demikian, perbedaan tingkat ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut terlihat dengan semakin menyempitnya jarak antara gini rasio perdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2019, gini rasio perkotaan sebesar 0,424 atau sekitar 1,29 kali angka gini rasio perdesaan.

Selain itu, terlihat bahwa pola dan kecenderungan angka gini rasio di perkotaan mempunyai kemiripan dengan pola dan kecenderungan angka gini rasio D.I. Yogyakarta.

Dengan demikian dapat diduga bahwa tingkat ketimpangan D.I. Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan di daerah perkotaan.

Tabel 5.5.1.1. menyajikan informasi mengenai distribusi pengeluaran menurut kelompok penduduk di perdesaan dan perkotaan D.I. Yogyakarta selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Di perdesaan, selama kurun waktu tersebut, kelompok 40 persen terbawah secara rata-rata mengkonsumsi sebanyak 19,68 persen dari total konsumsi seluruh penduduk perdesaan. Pada saat yang sama, kelompok 20 persen teratas di perdesaan secara rata-rata mengkonsumsi sebanyak 41,53 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan. Dengan demikian, konsumsi kelompok penduduk 20 persen teratas secara rata-rata adalah 2 kali dari konsumsi kelompok penduduk 40 persen terbawah.

Tabel 5.5.1.1. Distribusi Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran dan Wilayah, Maret 2015 – Maret 2019 (Persen)

Waktu	Kelompok Penduduk	Perdesaan	Perkotaan	D.I. Yogyakarta
Maret 2015	40 % Berpengeluaran Rendah	20,01	14,91	15,65
	40 % Berpengeluaran Menengah	38,05	34,52	34,08
	20 % Berpengeluaran Atas	41,95	50,57	50,26
Maret 2016	40 % Berpengeluaran Rendah	19,23	14,29	15,08
	40 % Berpengeluaran Menengah	40,16	38,50	37,13
	20 % Berpengeluaran Atas	40,61	47,20	47,79
Maret 2017	40 % Berpengeluaran Rendah	19,96	14,23	14,96
	40 % Berpengeluaran Menengah	38,09	36,87	34,92
	20 % Berpengeluaran Atas	41,95	48,90	50,12
Maret 2018	40 % Berpengeluaran Rendah	19,47	14,32	14,83
	40 % Berpengeluaran Menengah	37,84	35,63	34,38
	20 % Berpengeluaran Atas	42,69	50,05	50,79
Maret 2019	40 % Berpengeluaran Rendah	19,73	15,00	15,36
	40 % Berpengeluaran Menengah	39,82	36,81	35,76
	20 % Berpengeluaran Atas	40,45	48,19	48,88

Sumber: BPS DIY, 2015 – 2019

Pada periode yang sama, di perkotaan, rata-rata konsumsi kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebanyak 14,55 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan. Adapun rata-rata konsumsi kelompok penduduk 20 persen teratas mencapai 48,98 persen atau hampir setengah dari total konsumsi penduduk perkotaan. Secara rata-rata, kelompok penduduk 20 persen teratas mengkonsumsi sebanyak 3 kali lipat dari kelompok penduduk 40 persen terbawah. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di perkotaan lebih besar daripada tingkat ketimpangan di perdesaan.

Selain itu, baik di perdesaan maupun di perkotaan terlihat bahwa tingkat ketimpangan selama lima tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Pada tahun 2015, perbandingan tingkat konsumsi kelompok pengeluaran 20 persen teratas dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sebesar 2,09 kali dan 3,39 kali. Pada tahun 2019, perbandingan konsumsi kedua kelompok tersebut di perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 2,05 kali dan 3,21 kali.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di perdesaan tergolong dalam kriteria “rendah”. Hal ini karena konsumsi kelompok penduduk 40 persen terbawah sebanyak lebih dari 19 persen atau di atas ambang batas kriteria Bank Dunia untuk kategori ‘rendah’ yang besarnya minimal 17 persen. Sementara itu, pada saat yang sama tingkat ketimpangan di perkotaan menurut kriteria Bank Dunia termasuk dalam kategori “menengah”.

Tabel 5.5.1.2. Indeks Palma Menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, 2015 – 2019

Wilayah	Indeks Palma				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perdesaan	1,313	1,320	1,335	1,432	1,236
Perkotaan	2,177	2,129	2,150	2,290	2,051
D.I. Yogyakarta	2,345	2,047	2,124	2,271	2,064

Sumber: Susenas 2015 – 2019, diolah

Berdasarkan pengukuran tingkat ketimpangan dengan menggunakan angka gini rasio maupun ukuran Bank Dunia, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di perdesaan. Tingkat ketimpangan yang tinggi di wilayah perkotaan tersebut nampaknya merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta secara keseluruhan. Tingginya tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta tersebut merupakan fenomenayang juga banyak ditemu di beberapa negara di Asia (UNHABITAT, 2008). Hal tersebut diduga mempunyai kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Selain itu, beberapa faktor sosial ekonomi yang diduga berperan dalam hal ini, adalah kepemilikan asset (baik berupa tanah maupun modal), pendidikan, dan keterampilan.

Tabel 5.5.1.2. menunjukkan indeks palma untuk masing-masing wilayah di D.I. Yogyakarta selama tahun 2015 – 2019. Hasil penghitungan indeks palma menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Pada tahun 2015, nilai indeks palma di perdesaan adalah 1,313. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kelompok 10 persen penduduk teratas sebanyak 1,3 kali kelompok penduduk 40 persen terbawah. Pada saat yang sama, di wilayah perkotaan, konsumsi kelompok 10 persen penduduk teratas adalah sebanyak 2,1 kali kelompok 40 persen penduduk terbawah. Namun demikian, disparitas konsumsi antara kelompok 10 persen teratas dengan kelompok 40 persen terbawah menunjukkan adanya penurunan yang ditandai dengan menurunnya angka indeks palma. Pada tahun 2019, indeks palma untuk perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 1,24 dan 2,05.

Hasil penghitungan Susenas 2015 – 2019 menunjukkan bahwa Indeks Palma di D.I. Yogyakarta mempunyai kecenderungan yang menurun meskipun berfluktuasi. Pada tahun 2015, indeks palma tercatat sebesar 2,345. Selanjutnya pada tahun 2016, indeks palma turun menjadi 2,047. Pada tahun 2017 dan 2018, indeks palma kembali meningkat masing-masing menjadi 2,124 dan 2,71. Namun demikian, pada tahun 2019, indeks palma turun menjadi 2,064. Secara umum kondisi tersebut memperlihatkan bahwa berdasarkan indeks palma, tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya perbaikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin kecilnya angka perbandingan antara pengeluaran kelompok penduduk 10 persen teratas dengan pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah.

5.5.2. Kabupaten/Kota

5.5.2.1 Gini Rasio

Gini Rasio menurut kabupaten/kota pada tahun 2017-2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.5.1. Seperti halnya pola Gini Rasio Daerah Istimewa Yogyakarta, Gini Rasio pada semua kabupaten/kota pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dan masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah semakin merata dinikmati penduduk. Walaupun demikian, berbagai upaya harus tetap dilakukan untuk menekan tingkat ketimpangan.

Pada periode 2017-2019, terlihat bahwa angka Gini Rasio Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah diantara lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

dan tertinggi ada di Kabupaten Bantul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang paling baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan angka Gini Rasio yang tertinggi. Dengan demikian, tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5.5.1 Gini Rasio di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 -2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulon Progo	0,392	0,365	0,359
02 Bantul	0,413	0,448	0,422
03 Gunungkidul	0,340	0,337	0,325
04 Sleman	0,406	0,425	0,417
71 Yogyakarta	0,446	0,419	0,371
D.I. Yogyakarta	0,432	0,441	0,423

Sumber: Susenas 2017 -2019, diolah

Pada periode 2017-2019, ada 3 kabupaten/kota dengan Gini Rasio terus mengalami penurunan. Ketiga Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan yang berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan. Sedangkan Rasio Gini di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman cukup fluktuatif, walaupun pada tahun 2019 juga menurun dibandingkan tahun 2018. Kondisi ketimpangan yang cukup fluktuatif harus menjadi perhatian lebih khusus dibandingkan kabupaten/kota lain.

5.2.2.2 Kriteria Bank Dunia

Sejalan dengan angka Gini Rasio, penggunaan kriteria Bank Dunia untuk mengukur tingkat kesenjangan juga menunjukkan pola yang serupa. Tingkat kesenjangan di Kabupaten Gunungkidul menempati posisi paling rendah di antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tercermin dari Kabupaten Gunungkidul yang

memiliki proporsi tertinggi pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 5.5.2 Persentase Pengeluaran oleh Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019		
	40% pddk pendapatan rendah	40% pddk pendapatan menengah	20% pddk pendapatan tinggi	40% pddk pendapatan rendah	40% pddk pendapatan menengah	20% pddk pendapatan tinggi	40% pddk pendapatan rendah	40% pddk pendapatan menengah	20% pddk pendapatan tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kulon Progo	17,86	34,86	47,28	19,28	35,35	45,36	18,38	38,54	43,08
02 Bantul	16,20	34,92	48,88	14,70	33,81	51,48	15,09	36,67	48,25
03 Gunungkidul	20,45	36,46	43,09	19,76	38,82	41,42	20,63	37,89	41,47
04 Sleman	15,51	36,91	47,58	15,24	36,00	48,76	15,51	36,91	47,58
71 Yogyakarta	12,79	39,21	48,00	14,32	39,03	46,64	16,96	40,31	42,72
D.I. Yogyakarta	14,96	34,92	50,12	14,83	34,38	50,79	15,36	35,76	48,88

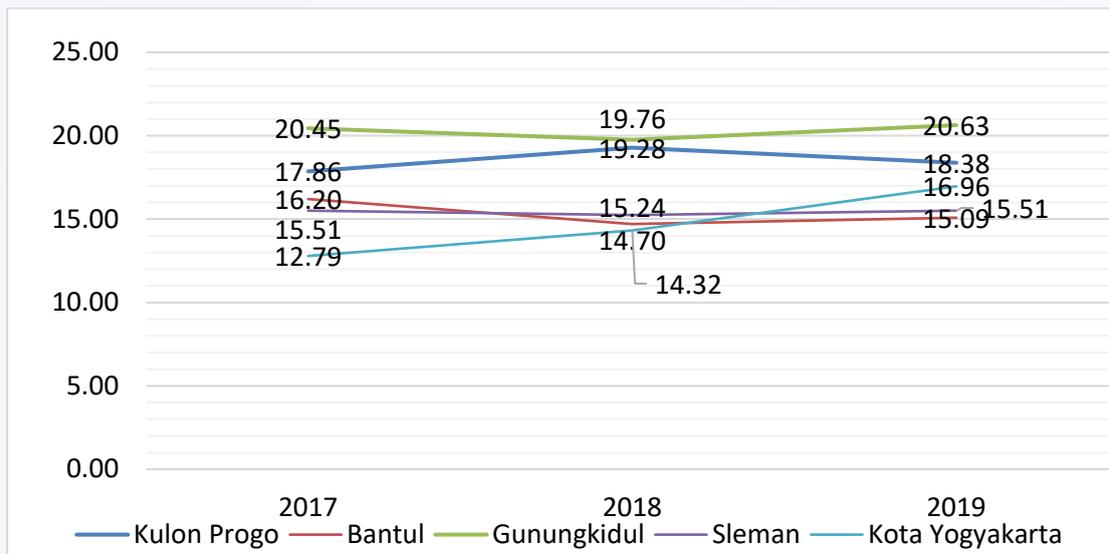
Sumber: Susenas 2017 -2019, diolah

Selama periode 2017 – 2019, proporsi pengeluaran untuk 40 persen penduduk terendah di Kabupaten Gunungkidul berturut-turut tercatat sebesar 20,45 persen, 19,76 persen dan 20,63 persen. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Kulon Progo, mempunyai proporsi pengeluaran untuk 40 persen penduduk terendah dengan nilai di atas 17 persen selama kurun waktu yang sama dan merupakan kabupaten dengan tingkat kesenjangan dalam kategori yang rendah. Sedangkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2019 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, yaitu dengan proporsi pengeluaran untuk 40 persen berpendapatan terendah berada di bawah 17 persen. Sedangkan Kabupaten Bantul pada tahun 2019 menempati tingkat kesenjangan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang mana pada tahun sebelumnya ditempati Kota Yogyakarta. Ketimpangan tertinggi berikutnya diikuti Kabupaten Sleman dan disusul Kota Yogyakarta.

Dilihat dari perkembangannya (gambar 5.5.1), perkembangan proporsi proporsi pengeluaran dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah pada periode 2018-2019 pada umumnya meningkat, kecuali Kabupaten Kulon Progo justru menurun. Hal ini berarti bahwa

pemerataan pendapatan di 4 kabupaten/kota semakin membaik. Menurunnya proporsi pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo perlu mendapatkan perhatian. Dengan semakin menurunnya proporsi pengeluaran dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah dikhawatirkan ketimpangan di wilayah ini akan semakin meningkat.

Gambar 5.5.1 Perkembangan Proporsi Pengeluaran untuk 40 Persen Penduduk Berpendapatan Terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019



Sumber: Susenas 2017 -2019, diolah

5.2.2.3 Indeks Palma

Indikator untuk menggambarkan ketimpangan yang lain adalah Indeks Palma. Indeks yang dikembangkan oleh Gabriele Palma pada tahun 2006 ini relatif cukup sederhana dan mudah dipahami. Indeks ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan antara 10 persen penduduk terkaya dengan 40 persen penduduk termiskin. Indeks Palma di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola yang sama dengan Gini Rasio. Pada periode 2018-2019, Gini Rasio maupun Indeks Palma mengalami penurunan. Pola serupa juga terjadi pada semua kabupaten/kota.

Pada tiga tahun terakhir, tahun 2017-2019, ada 3 kabupaten/kota dengan Indeks Palma terus mengalami penurunan, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Walaupun demikian ada kondisi yang cukup menarik. Indeks Palma untuk kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo pada kisaran angka di bawah 2. Selanjutnya pada tahun 2019 hampir semua kabupaten/kota memiliki Indeks

Palma di bawah 2, kecuali Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan bahwa di 4 kabupaten/kota tersebut, proporsi pengeluaran antara 10 persen kelompok pengeluaran tertinggi dengan 40 persen kelompok terendah tidak terlalu berbeda secara signifikan. Nilai Indeks Palma di Kabupaten Bantul ada pada kisaran 2, yaitu mencapai 2,062. Hal ini berarti bahwa tingkat pengeluaran dari 10 persen kelompok terkaya sebanyak dua kali lipat dibandingkan 40 persen kelompok termiskin.

Tabel 5.5.1 Indeks Palma di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 -2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulon Progo	2,089	1,556	1,508
02 Bantul	2,146	2,343	2,062
03 Gunungkidul	2,060	1,329	1,241
04 Sleman	2,088	2,098	1,991
71 Yogyakarta	2,233	2,049	1,565
D.I. Yogyakarta	2,124	2,271	2,064

Sumber: Susenas 2017 -2019, diolah

5.6. Identifikasi Penyebab Ketimpangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Ebel & Yilmaz, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan.

Secara administratif wilayah D.I. Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yaitu: Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kelima kabupaten/kota memiliki nilai pendapatan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbeda-beda, namun laju pertumbuhan ekonominya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan hingga tahun 2017. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo melonjak tahun 2018-2019. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 berada pada kisaran 5,33 hingga 13,49 persen. Dibanding tahun sebelumnya, level pertumbuhan juga meningkat

dan kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten/kota semakin menyempit.

Pembangunan mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta termasuk sarana dan prasarana penunjangnya seperti pembangunan *under pass*, pelebaran jalan dan jembatan, menjadikan kabupaten Kulonprogo unggul dalam pertumbuhan dibandingkan empat kabupaten/kota yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo melejit mencapai 2 digit sejak tahun 2018. Bahkan di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo mencapai 13,49 persen dan menduduki posisi pertama. Kabupaten Sleman yang biasanya berada pada peringkat pertama tergeser ke posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen. Kota Yogyakarta yang biasanya menduduki peringkat kedua, tergeser menjadi peringkat ketiga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96 persen.

Tabel 5.6.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota, Rata-rata Pertumbuhan per Tahun, dan Andil Pertumbuhan 2019 di D.I. Yogyakarta, 2015-2019 (persen)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-rata 2015-2019	Andil pertumbuhan 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49	8,71	1,07
Bantul	4,97	5,06	5,10	5,46	5,53	5,29	1,03
Gunungkidul	4,82	4,89	5,00	5,15	5,33	5,09	0,70
Sleman	5,18	5,25	5,35	6,37	6,49	5,86	2,20
Yogyakarta	5,09	5,11	5,24	5,48	5,96	5,45	1,59
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	5,26	6,20	6,60	5,77	6,60

Keterangan: *)angka sementara **)angka sangat sementara Sumber : BPS Provinsi DIY

Perbedaan luas wilayah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta ketersediaan teknologi yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah dari luas wilayah D.I. Yogyakarta (46,63 persen), menciptakan nilai PDRB sebesar 18,89 triliun rupiah di tahun 2018 atau 13,36 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul mampu memiliki total PDRB sebesar 12,02 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB D.I. Yogyakarta terendah yaitu 8,50 persen. Luas wilayah Kabupaten Sleman hampir sama dengan Gunungkidul, sekitar 18,04 persen dari luas wilayah D.I. Yogyakarta menghasilkan total PDRB sebesar 47,58 triliun rupiah atau sekitar 33,65 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta. Kabupaten Bantul memberikan sumbangan terhadap PDRB D.I. Yogyakarta sebesar 26,35 triliun rupiah atau sekitar 18,63 persen. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah D.I. Yogyakarta, memberikan sumbangan sebesar 36,60 triliun rupiah atau sekitar 25,88 persen terhadap total

PDRB D.I. Yogyakarta. Lain dengan empat kabupaten yang lain, Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi non pertanian dan non penggalian. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB D.I. Yogyakarta, terlihat hanya Gunungkidul saja yang meningkat persentase peran PDRBnya, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya menurun (Tabel 5.6.1).

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, andil pertumbuhan PDRB Sleman terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 2,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta 2018 yang sebesar 6,60 persen. Andil pertumbuhan terbesar berikutnya dari Kota Yogyakarta yaitu 1,59 persen, dan diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 1,07 persen. Peningkatan andil pertumbuhan Kabupaten Kulonprogo dalam dua tahun terakhir ini, diakibatkan dari melesatnya pertumbuhan ekonomi dan memuncaki pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo mencapai 13,49 persen di tahun 2019. Kali ini andil perekonomian Kabupaten Bantul sebesar 1,03 persen, lebih besar dibandingkan Kabupaten Gunungkidul.

Hanya saja pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut belum tentu dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, oleh karena itu perlu dilihat apakah ketimpangan pendapatan menjadi meningkat atau menurun dari sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo yang mencapai 2 digit pada 2018-2019 menurunkan Gini Rasio dari 0,392 pada tahun 2017 menjadi 0,359 tahun 2019. *Asian Development Bank* (ADB, 2010) mensyaratkan pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ditopang oleh tiga pilar, yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. Pertumbuhan merupakan syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan inklusif. Klassen (ADB, 2010) menyatakan bahwa penting untuk menentukan episode ekonomi seperti apa yang memiliki karakteristik sebagai pertumbuhan yang inklusif. Ada dua fokus untuk hal tersebut, yang pertama melihat melalui proses perluasan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua yaitu pada hasil dari proses pertumbuhan. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Berdasarkan kedua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan

dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok).

Selain pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada daerah A yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya produksi pada daerah A sedangkan daerah B tidak. Oleh sebab itu, kegiatan produksi di daerah A akan semakin tinggi sedangkan di daerah B akan semakin lambat. Jika dibiarkan hal ini akan memperlebar ketimpangan pendapatan. Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut Ravianto, (1986), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

Secara umum, produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mampu tumbuh sebesar 5,41 persen per tahun, menurun dibanding periode 2014-2018 yang mencapai 6,69 persen per tahun. Hal ini berbeda dengan pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi, yang naik dari sebesar 5,36 persen per tahun pada periode sebelumnya, menjadi 5,77 persen per tahun pada periode 2015-2019. Selama periode 2015-2019, ada dua lapangan usaha mengalami rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) mencapai dua digit per tahun, yaitu: real estat sebesar 44,03 persen, dan konstruksi sebesar 13,04 persen, Empat lapangan usaha lain mengalami rata-rata pertumbuhan PTK di atas rata-rata pertumbuhan PTK D.I. Yogyakarta, diantaranya: pertanian 9,81 persen, jasa lainnya 8,35 persen, perdagangan 7,40 persen, dan jasa keuangan dan asuransi 6,93 persen (Tabel 5.6.2).

Produktivitas tenaga kerja di awal periode yaitu tahun 2015 di D.I. Yogyakarta sebesar 53,64 juta rupiah per pekerja selama satu tahun, atau sekitar Rp147 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp169 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Sementara produktivitas tenaga kerja pada tahun 2019 naik mencapai 66,24 juta rupiah per pekerja setahun, atau sekitar Rp181 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp209 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

Menurut lapangan usaha, produktivitas tertinggi pada sektor real estate yang memiliki produktivitas per pekerja setahun mencapai Rp1.642 juta di tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp7.068 juta di tahun 2019. Selanjutnya adalah sektor informasi dan komunikasi dengan produktivitas per pekerja setahun sebesar Rp585 juta di tahun 2015 namun menurun menjadi

Rp538 di tahun 2019. Produktivitas kedua sektor tersebut jauh melampaui sektor-sektor yang lain dan secara konsisten bernilai tinggi, baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Tabel 5.6.2. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK di D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Kategori/lapangan usaha	Produktivitas tenaga kerja (JutaRp/Org/Th)		Rata-rata pertumbuhan 2015-2019 (%)		Rata-rata pertumbuhan PTK 2015-2019 (%)
	2015	2019	Ekonomi	Kesempatan kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, kehutanan dan perikanan	22,46	32,66	1,64	-4,13	9,81
Pertambangan dan penggalian	43,59	45,50	4,29	4,83	1,08
Industri pengolahan	48,44	49,93	5,41	7,29	0,76
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	54,94	54,92	6,65	14,43	-0,01
Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, remediasi	31,02	34,18	4,93	3,68	2,45
Konstruksi	67,01	109,40	9,91	0,33	13,04
Perdagangan, reparasi dan r mobil dan sepeda motor	22,25	29,61	5,62	1,93	7,40
Pengangkutan dan pergudangan	113,62	93,99	4,87	13,73	-4,64
Penyediaan akomodasi dan makan minum	79,55	72,73	6,84	11,43	-2,22
Informasi dan komunikasi	585,28	538,07	7,09	10,46	-2,08
Jasa keuangan dan asuransi	131,74	172,21	5,60	1,81	6,89
Real estate	1.642,47	7.067,91	5,38	-24,61	44,03
Jasa perusahaan	26,52	27,50	5,41	7,23	0,92
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jamsos wajib	134,64	151,33	4,36	5,42	2,97
Jasa pendidikan	76,16	78,03	5,28	6,91	0,61
Jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial	84,22	76,06	5,75	11,27	-2,52
Jasa lainnya	20,65	28,46	5,98	0,63	8,35
Total	53,64	66,24	5,77	3,07	5,41

Sumber : BPS Provinsi DIY

Dalam waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi level makro yang mengalami percepatan dari tahun 2015 hingga 2019, dan memiliki dampak kinerja produktivitas yang berbeda. Pada tahun 2015 dan 2019 lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja D.I. Yogyakarta. Menurut analisis Tipologi Klassen ketiga kategori tersebut dikatakan sebagai “sektor yang produktif dan tumbuh cepat”. Lapangan usaha pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan remediasi dan konstruksi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya mampu tumbuh di atas rata-rata di

tahun 2019, padahal pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata di tahun 2015. Hal ini berarti pada kedua sektor lapangan usaha tersebut termasuk kategori sektor yang “produktif dan tumbuh pesat”. Melambungnya harga tanah di wilayah D.I. Yogyakarta, telah merubah tren investasi *landed* menjadi *high rise* atau hunian *vertical* atau apartemen. Menjamurnya bisnis ini di D.I. Yogyakarta, mendorong pesat laju pertumbuhan output konstruksi. Hal ini memberikan indikasi bahwa arah penguatan ekonomi D.I. Yogyakarta bertumpu pada kelompok sektor sekunder. Sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan karena pangsa distribusinya cukup besar masih perlu dipacu kinerja ekonominya. Inovasi produksi, perluasan kualitas dan kuantitas pemasaran, dan promosi perlu lebih intensif lagi untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di D.I. Yogyakarta.

Kondisi sebaliknya terjadi untuk lapangan usaha real estate, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja empat lapangan usaha ini bertahan di atas rata-rata namun pertumbuhan ekonominya turun dari di atas rata-rata menjadi di bawah rata-rata. Dengan demikian kategori real estate, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan di tahun 2019 turun dari kelompok “sektor yang produktif dan tumbuh cepat” menjadi “sektor yang maju tetapi tertekan (kurang produktif)”. Tingginya produktivitas real estate tidak lepas dari *icon* D.I. Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. Memiliki lebih dari 100 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, jumlah mahasiswa di D.I. Yogyakarta meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi peluang bagi investor untuk menyediakan tempat tinggal bagi para mahasiswa pendatang.

Dilihat secara parsial dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kategori real estate dan konstruksi memiliki rata-rata produktivitas tertinggi selama 2015-2019. Nilai keduanya masing-masing mencapai 44,03 persen dan 13,04 persen. Nilai produktivitas kedua juga di atas rata-rata, baik di tahun 2015 maupun 2019 (Tabel 5.6.2). Sementara itu, kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin merupakan yang tertinggi rata-rata pertumbuhan kesempatan kerjanya, yaitu 14,43 persen per tahun. Selain itu, masih ada 4 kategori yang rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja per tahunnya mencapai 2 digit, diantaranya: pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial, dan kategori informasi dan komunikasi.

Dengan demikian sektor yang dapat diandalkan dari sisi pertumbuhan dan produktivitasnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, dan informasi dan komunikasi, jasa kesehatan manusia dan kegiatan sosial. Sesuai dengan namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai magnet tersendiri bagi wisatawan nusantara maupun

mancanegara. Potensi wisata yang cukup beragam, dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata khusus, didukung oleh berbagai fasilitas seperti: hotel dan penginapan, usaha perjalanan wisata, sarana pendukung maupun penyediaan makanan dan minuman serta cinderamata. Pertumbuhan pariwisata D.I. Yogyakarta akan membuka peluang tumbuhnya pasar wisata, perkembangan teknologi informasi dan sosial media, pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional, dan pembangunan infrastruktur regional seperti bandara, jalan tol, maupun jalur kereta api.

Kemudian, selain pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja, faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di daerah B maka daerah A akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah B. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah A dan daerah B.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sementara kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

Perkembangan ekonomi secara umum sangat dipengaruhi oleh besaran serta pola dari setiap komponen permintaan akhir. Setiap komponen memiliki sifat yang khas mengikuti kondisi perekonomian yang terjadi serta kebijakan ekonomi yang diambil. Secara umum dan menjadi ciri khas perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama roda perekonomian dari sisi pengeluaran. Demikian pula dengan perekonomian D.I.

Yogyakarta, sebagian besar pendapatan yang diperoleh masih digunakan untuk memenuhi permintaan akhir konsumsi rumah tangga.

Kinerja perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2019 mengalami percepatan positif. Secara nominal PDRB D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Ditinjau atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta meningkat dari sekitar 101,4 triliun di tahun 2015 menjadi 141,4 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 92,5 triliun dari total nilai PDRB D.I. Yogyakarta yang sebesar Rp 141,4 triliun atau mencapai sekitar 65,39 persen. Pangsa konsumsi rumah tangga ini sedikit lebih rendah dibanding dengan pangsa 2018 yang sebesar 66,8 persen. Sisi positif yang menguntungkan dari kondisi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam struktur pengeluaran PDRB adalah mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergairah dan permintaan domestik yang lebih stabil. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta, sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk D.I. Yogyakarta.

Perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang bisa untuk menjaga pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Namun, di sisi lain perlu disadari bahwa komponen ini bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. Oleh karena itu harus ada kesesuaian dengan komponen lainnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dari sisi pengeluaran, yaitu perlunya dorongan dari investasi dan kinerja ekspor yang lebih optimal.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Bila dilihat lebih jauh menurut jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga, selama periode 2015-2019 persentase konsumsi bukan makanan selalu lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Pada tahun 2019, porsi konsumsi makanan dan bukan makanan sebesar 27,25 persen dan 38,14 persen terhadap total PDRB. Pengaruh pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi terhadap PDRB mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terdominasi untuk makanan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tabel 5.6.3).

PDRB D.I. Yogyakarta masih dominan ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kecenderungan menurunnya ekspor dan impor luar negeri di satu sisi mengurangi atau menambah cadangan devisa yang tersedia, namun di sisi lain mencerminkan adanya geliat peningkatan produksi dalam negeri. Hasil ekspor bersih antar daerah cenderung menurun, artinya nilai arus barang dan jasa yang masuk lebih besar dibandingkan dengan yang keluar. Sisi positifnya, kondisi tersebut

menunjukkan bahwa permintaan untuk konsumsi akhir maupun konsumsi antara meningkat karena menggeliatnya ekonomi D.I. Yogyakarta. Namun menurunnya porsi ekspor bersih antar daerah juga bisa bermakna terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Oleh karena itu kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya. Sasaran lebih jauh dari kebijakan tersebut adalah untuk dapat mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda D.I. Yogyakarta.

Tabel 5.6.3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di D.I. Yogyakarta (milyar rupiah), 2015-2019

Jenis pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi rumah tangga	68.731	74.430	81.336	86.753	92.460
a. Makanan	28.969	31.380	33.878	36.044	38.532
b. Bukan makanan	39.761	43.050	47.457	50.709	53.927
2. Konsumsi LNPR	3.171	3.225	3.756	4.095	4.614
3. Konsumsi pemerintah	17.214	18.322	19.508	21.346	22.458
4. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)	30.799	33.429	37.111	43.174	49.519
5. Perubahan inventori	1.152	1.296	1.368	1.435	1.501
6. Ekspor luar negeri	6.266	6.495	7.437	8.750	8.971
7. Impor luar negeri	5.066	5.923	6.531	7.206	6.934
8. Ekspor bersih antar daerah	-20.826	-21.312	-24.857	-28.473	-31.189
	101.441	109.962	119.129	129.874	141.400

Keterangan: *)angka sementara **)angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi DIY

Kesinambungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memerlukan penanaman modal atau investasi untuk menggerakkannya. Investasi dipenuhi dari penanaman modal domestik maupun asing. Investasi digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya peningkatan investasi baru sudah seharusnya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dalam buku *A System of National Accounts (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, berbentuk barang setengah jadi, barang input yang belum digunakan, atau juga berbentuk barang jadi yang belum terjual. **Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.**

Pada tahun 2019 nilai PMTB di D.I. Yogyakarta mencapai Rp 49,5 triliun atau naik sekitar Rp 6,3 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 43,2 triliun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp 6,1 triliun. Sementara secara total investasi fisik 2019 sebesar Rp 51 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di D.I. Yogyakarta cukup pesat, nilai investasi meningkat lebih dari 60 persen. Naiknya investasi tersebut selain sebagai dampak dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan, pengangkutan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, yang utamanya disebabkan adanya mega proyek *Yogyakarta International Airport (YIA)*. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2019 mencapai sebesar 9,74 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi selama satu dekade terakhir.

Peran investasi terhadap perekonomian daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sumbangan investasi fisik terhadap PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 sebesar 31,50 persen naik menjadi 36,08 persen di tahun 2019 (Tabel 5.6.2). Peningkatan kontribusi tersebut didominasi oleh komponen PMTB yang naik dari 33,24 persen menjadi 35,02 persen.

Dalam menggerakkan roda perekonomian, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya investasi yang masuk namun perlu dilihat seberapa efektif investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam pembahasan ini, ICOR yang digunakan adalah konsep ICOR yang dihitung dengan *time-lag 0*. Artinya, investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Dilihat dari angka sementara ICVAR D.I. Yogyakarta dalam periode tahun 2015–2019, dapat dimaknai bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan kemajuan, meskipun masih sedikit kurang efisien. Pada tahun 2015 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,90 persen. Di tahun 2019 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan menunjukkan penurunan, yaitu 4,81 persen. Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 4,81 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa ICVAR (ICOR) ini hasil penghitungan dengan *time-lag* 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang. Sehingga, manfaat investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru akan dirasakan pada tahun-tahun mendatang.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Capaian pembangunan manusia di wilayah D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2019 berada pada posisi 79,99. Secara umum, capaian ini terus mengalami kemajuan dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,99 pada tahun 2019. Artinya, setiap tahun IPM D.I. Yogyakarta rata-rata tumbuh sebesar 0,66 persen. Perkembangan posisi IPM ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia di D.I. Yogyakarta yang semakin membaik. Level IPM D.I. Yogyakarta selama periode 2010-2019 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 = \text{IPM} < 80$). Dibandingkan dengan IPM pada level nasional, capaian IPM D.I. Yogyakarta tercatat selalu lebih tinggi. Capaian IPM nasional juga semakin meningkat dan berubah status dari IPM sedang menjadi IPM tinggi pada tahun 2016. Posisi capaian IPM D.I. Yogyakarta sejak tahun 2010 sampai 2019 tidak mengalami perubahan, yakni selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta.

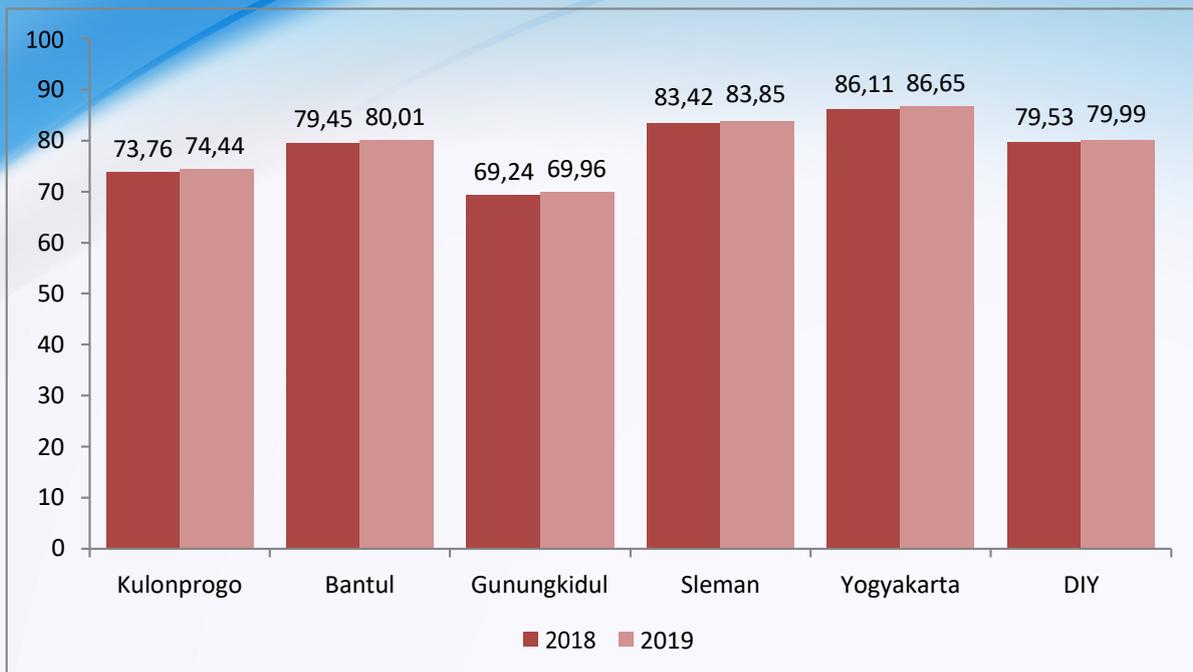
Pencapaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sampai tahun 2019 terlihat cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,96 hingga 86,65. Capaian IPM Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DY, bahkan di Indonesia. Level IPM Kota Yogyakarta mencapai 86,85.

Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman sebesar 83,85 dan termasuk dalam lima besar IPM tertinggi secara nasional. IPM Kota Yogyakarta dan Sleman termasuk dalam kategori “sangat tinggi” (IPM=80). Capaian IPM Kabupaten Bantul sebesar 80,01 dan meningkat statusnya dari IPM “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Capaian IPM Gunungkidul mencapai 74,44 termasuk dalam kategori “tinggi” ($70=IPM<80$). Sementara, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,96 dan masih berada dalam kategori “sedang” ($60=IPM<70$).

Indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat cukup bervariasi. Pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator usia harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,77 tahun yakni Kabupaten Bantul hingga level tertinggi 75,20 tahun yakni Gunungkidul. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,96 tahun (Gunungkidul) hingga 17,28 tahun (Kota Yogyakarta). Harapan lama sekolah Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi secara nasional. Rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,13 tahun (Gunungkidul) hingga 11,45 tahun (Kota Yogyakarta). Sementara, pengeluaran per kapita riil pada tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta berkisar antara Rp9,61 juta per tahun (Gunungkidul) hingga Rp19,12 juta per tahun (Kota Yogyakarta).

Kemajuan pembangunan manusia sampai tahun 2019 dapat terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecepatan pertumbuhannya. Gunungkidul sejak tahun 2013 naik level dari status “sedang” menjadi “tinggi”. Sleman sejak tahun 2011 sudah naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi” dan Bantul naik level dari status “tinggi” menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2019. Sementara itu, dua wilayah lain tidak mengalami perubahan status. Gunungkidul masih tetap berada dalam status “sedang”, dan Kota Yogyakarta sejak 2010 sudah masuk status “sangat tinggi”. Selama periode 2010-2019, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Meskipun dari sisi level capaian paling rendah, Kabupaten Gunungkidul dan Gunungkidul tercatat memiliki pertumbuhan atau tingkat kemajuan yang paling cepat. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode 2010-2019 di kedua daerah masing-masing tercatat sebesar 0,96 persen dan 0,87 persen. Sebaliknya, meskipun secara level IPM paling tinggi tingkat kemajuan/pertumbuhan IPM di Kota Yogyakarta dan Sleman tercatat lebih lambat masing-masing sebesar 0,57 persen dan 0,52 persen per tahun.

Gambar 5.6.1. IPM Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2018-2019



Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan analisis regresi linier data panel dengan model *pooled* pada Tabel 5.6.4. terlihat bahwa besarnya investasi pada tingkat kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh besarnya investasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan investasi yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan investasi dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya investasi yang terjadi. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah terutama pada kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta akan semakin melebar. Koefisien yang didapatkan bernilai negatif yang artinya peningkatan investasi akan menurunkan tingkat ketimpangan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi juga oleh nilai IPM. Dengan demikian IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota. IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif kurang maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka

ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin melebar.

Tabel 5.6.4. Analisis Regresi Linier Model *Pooled* Data Panel Indeks Gini dan Variabel Pengaruh Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2015-2019

Variabel pengaruh	Koefisien	Standar error	Nilai t hitung	p-value
(1)	(2)	(3)		(3)
Konstanta	-0,274	0,124	-2,212	0,039**
Investasi	-0,023	0,000	-1,751	0,096*
ICOR	0,093	0,008	0,613	0,547
IPM	1,405	0,001	6,067	0,000***
Pertumbuhan ekonomi	-0,023	0,003	-0,170	0,867
Produktivitas tenaga kerja	-0,457	0,000	-2,583	0,018**

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta (diolah).

Keterangan : Koefisien determinasi (R^2) = 78,7%; sig.(α) ***=0,001; **=0,05; *=0,1

Produktivitas tenaga kerja terlihat berpengaruh signifikan pula dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara produktivitas tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif. Dengan demikian peningkatan produktivitas tenaga kerja yang merata akan mendorong seimbangannya pembangunan yang terjadi dan mengurangi ketimpangan. Apabila perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja ini terus dibiarkan maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah terutama antar kabupaten/kota akan semakin melebar. Meskipun demikian secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh yang belum signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwasannya ketimpangan pendapatan tidak mutlak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Hanya saja perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju. Masih ada daerah - daerah yang relatif

tertinggal semakin ketinggalan sebab daerah tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti tenaga kerja terdidik dan terlatih tidak tersedia, infrastruktur biasanya tidak memadai sehingga daerah ini akan semakin tertinggal bila pertumbuhan ekonominya tidak berlanjut. Oleh sebab itu, ketimpangan pembangunan akan semakin lebar. Jika tidak dibangun berbagai fasilitas dan faktor pendukung perekonomian di daerah tertinggal maka ketimpangan pembangunan akan tidak terhindarkan dan bahkan bisa menjadi semakin melebar.

5.7. Identifikasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketimpangan

5.7.1. Ketimpangan Pada Masa Awal Pandemi Covid-19

Berdasarkan tabel 5.7.1, terlihat bahwa di daerah perkotaan D.I. Yogyakarta, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2019, Angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,424. Kemudian, pada September 2019, angka Gini Rasio bertambah menjadi 0,430 yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan penduduk. Selanjutnya, pada Maret 2020, angka Gini Rasio kembali naik menjadi 0,436. Sebaliknya di daerah perdesaan, tingkat ketimpangan relatif stabil dalam kurun waktu Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Pada Maret 2019, angka gini rasio di perdesaan sebesar 0,328. Selanjutnya, pada September 2019, angka Gini Rasio turun menjadi 0,326. Namun, pada Maret 2020, angka Gini Rasio kembali ke 0,328. Nilai Gini Rasio di perdesaan yang lebih rendah daripada di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan penduduk di perdesaan lebih baik daripada di perkotaan.

Tabel 5.7.1. Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY dan Indonesia, Maret 2019 - Maret 2020

Wilayah/waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
D.I. Yogyakarta			
Maret 2019	0,424	0,328	0,423
September 2019	0,430	0,326	0,428
Maret 2020	0,436	0,328	0,434
Indonesia			
Maret 2019	0,392	0,317	0,382
September 2019	0,391	0,315	0,380
Maret 2020	0,393	0,317	0,381

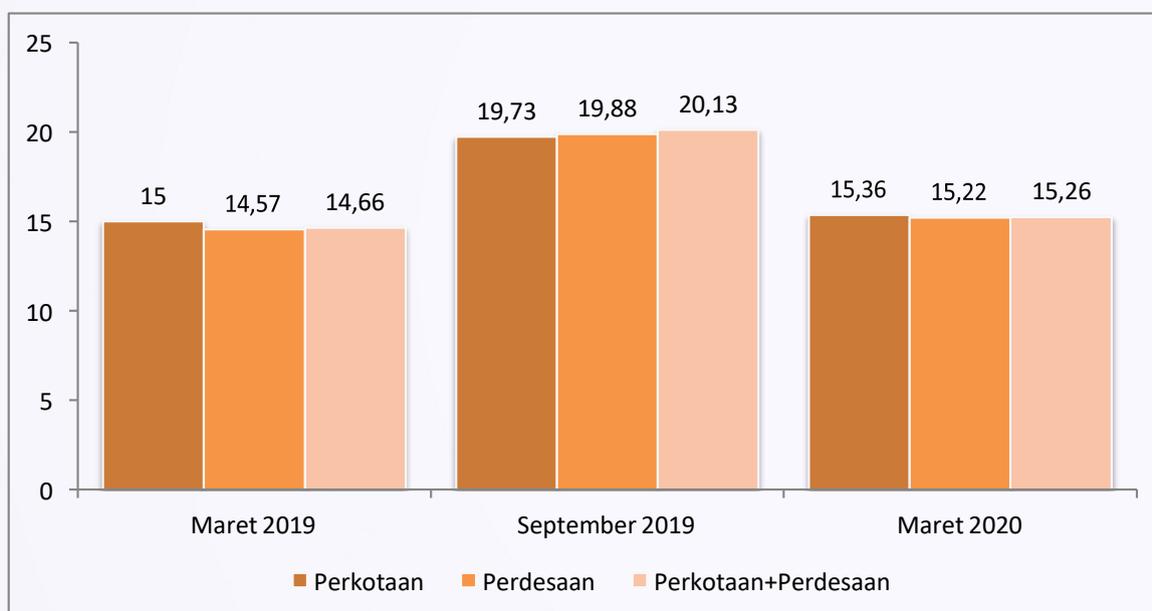
Sumber: BPS Provinsi DIY

Selain Gini Rasio, BPS juga menggunakan Ukuran Bank Dunia untuk menghitung tingkat ketimpangan. Berdasarkan indikator ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori,

yaitu tingkat ketimpangan “tinggi” jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan “sedang” jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan “rendah” jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2019, hasil Susenas menunjukkan bahwa 40 persen penduduk kelompok pengeluaran terendah di D.I. Yogyakarta melakukan konsumsi sebanyak 15,26 persen dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk D.I. Yogyakarta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk ini dibandingkan kondisi pada September 2019 yang besarnya 15,22 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesenjangan pengeluaran di D.I. Yogyakarta.

Gambar 5.7.1. Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah di D.I. Yogyakarta, Maret 2019-Maret 2020



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Sementara itu, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di perkotaan menunjukkan adanya peningkatan. Kondisi tersebut antara lain ditandai dengan turunnya konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2019 dibandingkan dengan Maret 2020. Pada Maret 2020, kelompok 40 persen pengeluaran terbawah mengkonsumsi kurang dari 15 persen dari total pengeluaran. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan Maret 2019 yang besarnya 15,00 persen. Kondisi yang berbeda terjadi di perdesaan. Pada kurun waktu yang sama, tingkat konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah justru terlihat menunjukkan adanya peningkatan. Jika pada Maret 2019, kelompok 40 persen pengeluaran terbawah mengkonsumsi 19,73 persen dari total pengeluaran, pada September 2019 total konsumsi oleh kelompok penduduk ini meningkat menjadi 19,88 persen.

Selanjutnya, pada Maret 2020, konsumsi kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebanyak 20,13 persen dari total konsumsi penduduk D.I. Yogyakarta.

5.7.2. Kondisi Ketenagakerjaan

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Kecuk Suharyanto (2020), penurunan pendapatan lapisan masyarakat bawah lebih tajam penurunannya dibandingkan lapisan atas.

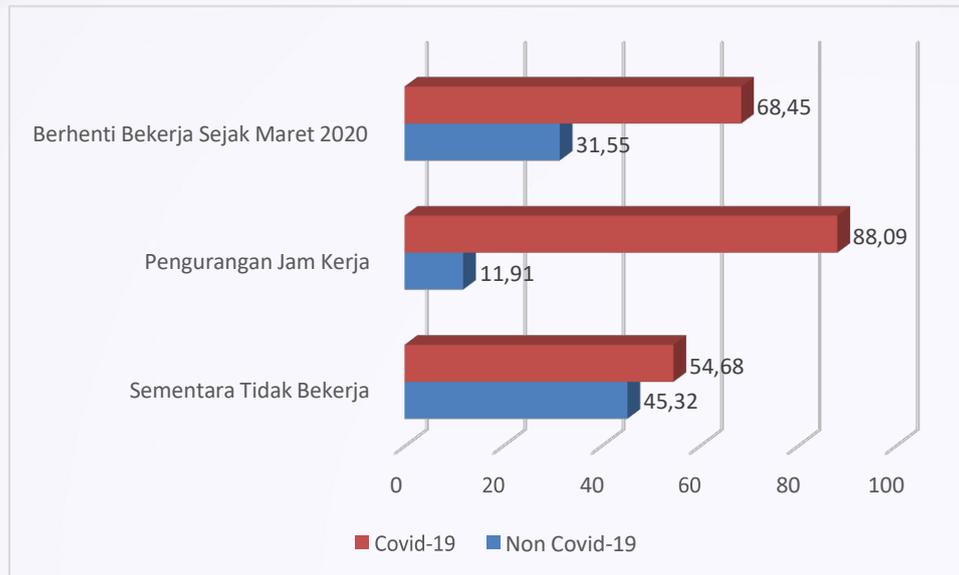
Turunnya kinerja ekonomi Indonesia ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020 yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi triwulan yang hanya mencapai 2,97 persen (y-o-y). Pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali menurun signifikan, yaitu tumbuh minus 5,32 persen (y-o-y). Kondisi serupa juga terjadi di D.I Yogyakarta. Perekonomian D.I Yogyakarta pada triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen (y-on-y) dan pada triwulan II tahun 2020 menurun signifikan sebesar 6,74 persen (y-o-y).

Keadaan memburuknya perekonomian ini sebagai dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha dan ketenagakerjaan. Walaupun Covid-19 sama-sama berdampak terhadap penurunan pendapatan pelaku usaha dan tenaga kerja, akan tetapi penurunan pendapatan akan lebih dirasakan bagi tenaga kerja. Pelaku usaha pada umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan buruh/pekerja. Buruh/pekerja tidak tetap maupun pekerja bebas dengan upah/gaji sistem harian, pendapatan akan menurun atau bahkan tidak dibayarkan jika sementara tidak bekerja, dirumahkan atau bahkan di PHK akibat kebijakan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan survey dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Indonesia yang dilakukan BPS pada Bulan Juli 2020 diperoleh informasi bahwa perusahaan berhenti beroperasi (8,76 persen), pemberlakukan *Work From Home* (7,5 persen), beroperasi dengan pengurangan kapasitas (24,31 persen), beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19 (0,49 persen) dan sisanya masih beroperasi seperti biasa (58,95 persen). Kondisi dunia usaha yang demikian, disikapi perusahaan membuat kebijakan untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas perusahaan sangat terdampak. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung adalah langkah terakhir yang diambil terhadap tenaga kerjanya. Pengurangan jam kerja adalah langkah yang relatif lebih banyak diambil oleh perusahaan dibandingkan pilihan.

Langkah selanjutnya yang dipilih perusahaan dengan merumahkan dan memberhentikan sementara tenaga kerja.

Gambar 5.7.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Terdampak Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020



Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, bahwa Covid-19 berdampak terhadap ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak tersebut dapat dilihat dari indikator penduduk 15 tahun ke atas yang berstatus sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja, dan berhenti bekerja. Berdasarkan Gambar 5.7.1 disajikan persentase penduduk 15 tahun ke atas berhenti bekerja, sementara tidak bekerja dan pengurangan jam kerja keterkaitannya dengan Covid-19. Sejalan dengan kebijakan pelaku usaha (hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha), bahwa pengurangan jam kerja menjadi pilihan utama agar perusahaan tetap mampu beroperasi. Pada Sakernas Agustus 2020 juga dapat dijelaskan bahwa penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan pengurangan jam kerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai 88,09 persen dan sisanya 11,91 persen tidak terkait Covid-19.

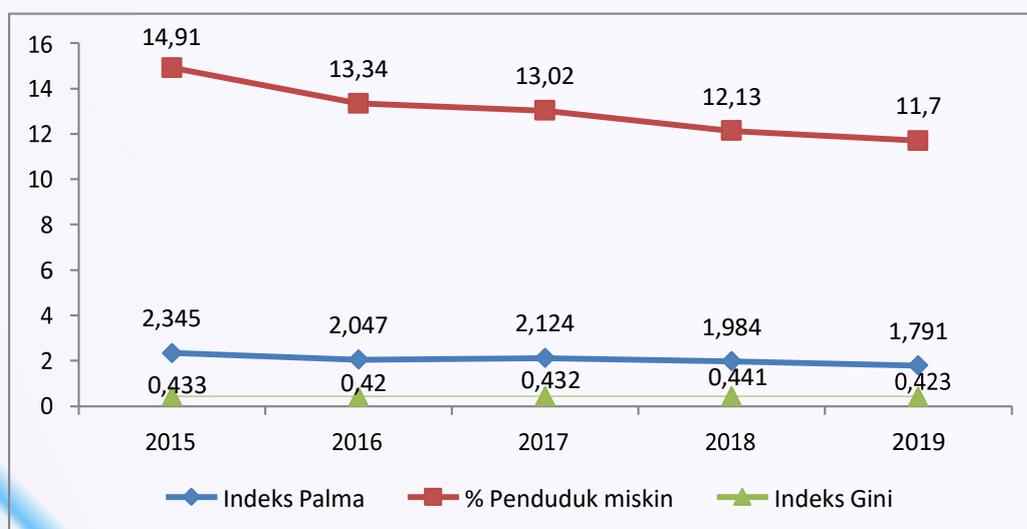
Covid-19 yang telah memasuki D.I Yogyakarta pada Maret 2020 telah merubah tatanan hidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penduduk 15 tahun ke atas yang berhenti bekerja mulai Maret 2020 terkait Covid-19 mencapai 68,45 persen dan sisanya 31,55 persen tidak terkait dengan Covid-19. Selanjutnya penduduk yang memilih status sementara tidak bekerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai lebih dari separuh (54,68 persen) dan sisanya sebanyak 45,32 persen dengan alasan tidak terkait Covid-19 (cuti, sakit, aturan waktu kerja,

cuaca, dll). Jika kondisi ketenagakerjaan ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pekerja dengan kelompok pendapatan terbawah lebih tajam dibandingkan pelaku usaha yang relatif dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

5.8. Keterkaitan Tingkat Ketimpangan dengan Tingkat Kemiskinan

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Pengurangan tingkat kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara sedang berkembang. Menurut Arsyad (1999), cara yang sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan faktor produksi. Sementara menurut Todaro (2000), pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk.

Gambar 5.8.1. Persentase Penduduk Miskin, Indeks Palma, dan Indeks Gini D.I. Yogyakarta Tahun 2015 -2019



Sumber: Susenas 2015 – 2019, diolah

Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif bagi penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak daripada yang tidak miskin. Hasil analisis kemiskinan sebelumnya mendapatkan bahwa rata-rata anggota rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta tahun 2019 mencapai 4,86 orang, sementara anggota rumah tangga tidak miskin hanya 4 orang. Variasi dalam nilai pengeluaran konsumsi, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan antara

kelompok miskin dengan yang tidak miskin juga akan sangat berpengaruh langsung terhadap ketimpangan yang terjadi.

Berdasarkan Gambar 5.8.1 terlihat pola yang cenderung menurun pada persentase penduduk miskin, Indeks Gini, dan indeks Palma pada periode 2015-2019. Pada tahun 2016, ketika persentase penduduk miskin turun dari 14,91 persen menjadi 13,34 persen terlihat bahwa Indeks Palma dan Indeks Gini juga mengalami penurunan, masing-masing secara berurutan dari 2,345 dan 0,433 menjadi 2,047 dan 0,420. Hal ini menunjukkan turunnya persentase penduduk miskin tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk miskin dengan dikonfirmasi oleh Indeks Palma dan Indeks Gini yang tidak mengalami penurunan tajam. Selanjutnya, pada tahun 2019, dimana persentase penduduk miskin turun secara signifikan menjadi 11,70 persen terlihat bahwa Indeks Palma juga turun secara signifikan menjadi 1,791. Dengan demikian, sampai tahun 2019, selain terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara kuantitatif nampaknya terjadi juga perbaikan kualitas penduduk miskin.

5.8.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan

Besarnya pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan memperlihatkan besarnya pengeluaran utama atas kebutuhan dasar hidup yang berhubungan dengan kebutuhan gizi, makanan dan minuman penunjang dimana setiap individu membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat dalam Tabel 5.8.1.

Tabel 5.8.1. menunjukkan nilai pengeluaran konsumsi makanan secara rata-rata bagi kelompok penduduk miskin dan penduduk tidak miskin di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 yang terdapat perbedaan yang cukup besar dalam semua jenis konsumsi makanan. Perbedaan pengeluaran yang terbesar secara rata-rata untuk kelompok tidak miskin dibandingkan kelompok miskin adalah makanan hewani (ikan, daging, telur dan susu). Secara proporsional pengeluaran konsumsi makanan pada kelompok penduduk miskin lebih mengumpul pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian yang mencapai sekitar 44 persen.

Tabel 5.8.1. Pengeluaran Konsumsi Menurut Jenis Pengeluaran Makanan dan Kategori Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, 2019 (Rupiah per kapita per bulan)

Jenis pengeluaran	Pengeluaran konsumsi (Rupiah per kapita per bulan)		
	Tidak miskin	Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	200.427	100.421	188.725
Umbi-umbian	5.746	2.594	5.377
Pangan hewani	155.181	42.264	141.969
Minyak dan lemak	11.867	8.659	11.491
Buah/biji berminyak	744	418	706
Kacang-kacangan	14.684	9.147	14.036
Gula	11.466	8.520	11.121
Sayur dan buah	85.210	31.888	78.971
Lain-lain	57.151	15.321	52.257
Rokok dan tembakau	45.621	12.896	41.792
Total	588.096	232.128	546.445

Sumber: BPS Provinsi DIY

5.8.2. Pengeluaran Rumah Tangga Bukan Makanan

Secara rata-rata besarnya nilai pengeluaran konsumsi bukan makanan antara kelompok tidak miskin dan miskin dapat dilihat pada Tabel 5.8.2. Pengeluaran konsumsi bukan makanan pada kelompok tidak miskin mencapai sekitar 880 ribu rupiah per kapita per bulan, sedangkan pada kelompok miskin hanya sekitar 133 ribu rupiah. Perbedaan nilai pengeluaran terjadi pada setiap kelompok pengeluaran yang ada.

Pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran utama dalam rumah tangga untuk kategori bukan makanan seperti sewa rumah, perbaikan rumah, listrik, air dan telepon, namun pengeluaran yang bersifat rutin seperti listrik, air atau telepon merupakan jenis pengeluaran yang ada pada setiap rumah tangga, sementara pengeluaran untuk sewa dan perbaikan rumah bukanlah pengeluaran rutin, namun tetap menjadi beban dalam rumah tangga.

Dari Tabel 5.8.2 dapat diperhatikan bahwa pengeluaran untuk kepentingan perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan jenis pengeluaran yang memiliki perbedaan cukup besar pada dua kelompok pendapatan yang mana kelompok penduduk tidak miskin memiliki pengeluaran sekitar 4,56 kali pengeluaran kelompok miskin. Terlihat juga bahwa perbedaan terbesar pengeluaran kelompok tidak miskin dibandingkan kelompok miskin pada pengeluaran bukan makanan yaitu pada kelompok pengeluaran bahan tahan lama dan keperluan pesta dan upacara/kenduri. Pada kelompok pengeluaran

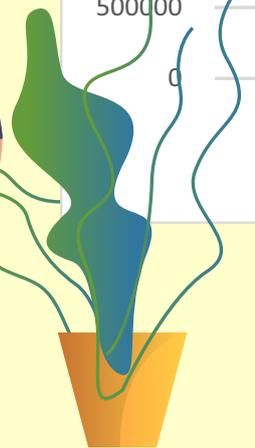
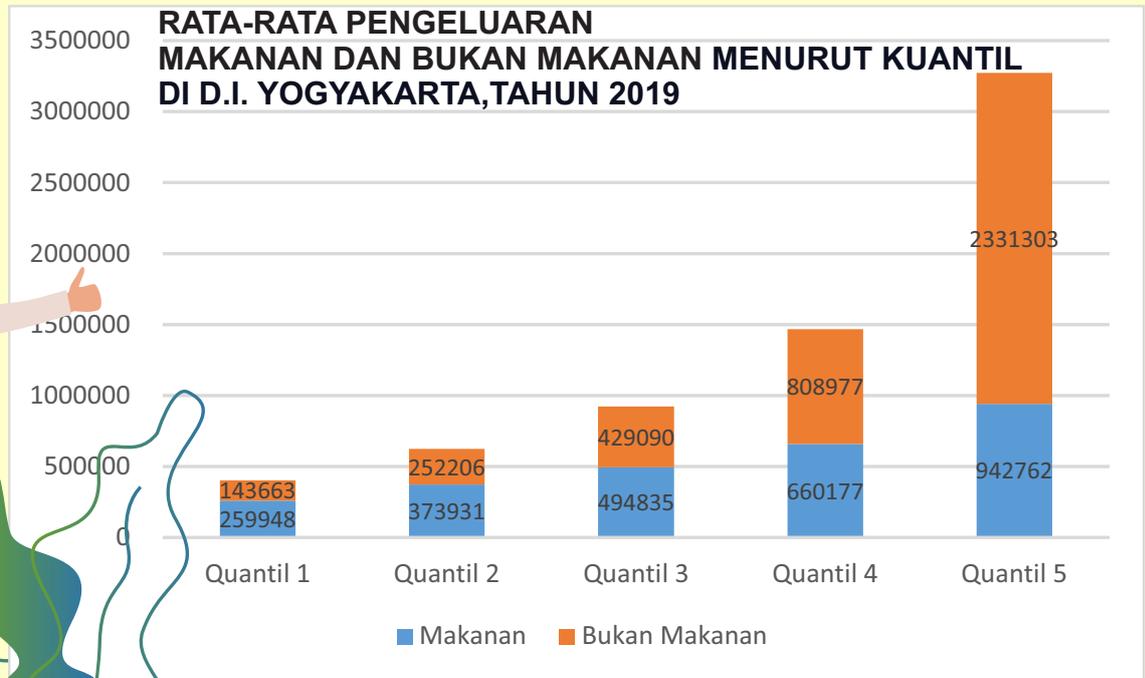
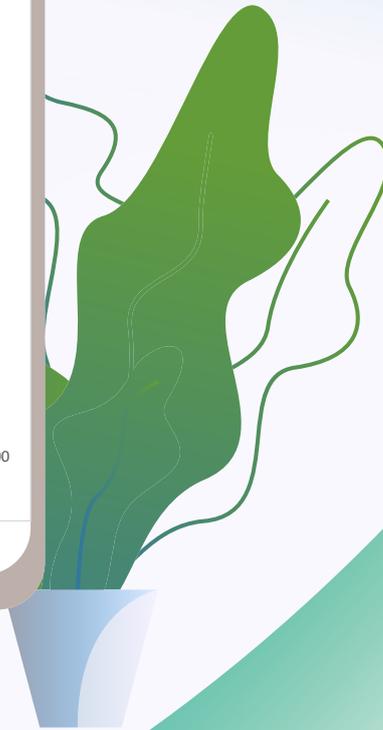
tersebut secara berturut-turut pengeluaran kelompok tidak miskin mencapai 27 dan 38 kali pengeluaran pada kelompok miskin.

Tabel 5.8.2. Pengeluaran Konsumsi Menurut Jenis Pengeluaran Bukan Makanan dan Kategori Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, 2019 (Rupiah per kapita per bulan)

Jenis pengeluaran	Pengeluaran konsumsi (Rupiah per kapita per bulan)		
	Tidak miskin	Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	379.616	83.210	344.935
Aneka barang dan jasa	249.759	27.147	223.712
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	39.013	6.003	35.151
Barang tahan lama	120.037	4.407	106.507
Pajak pungutan dan asuransi	51.689	10.698	46.893
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	40.722	1.081	36.084
Total	880.836	132.545	793.281

Sumber: BPS Provinsi DIY

RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA MENURUT KUANTIL DAN KABUPATEN KOTA, DI D.I. YOGYAKARTA, TAHUN 2019





VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- 1.a. Pada tahun 2015 penduduk dengan 20 persen penghasilan terendah menerima pendapatan sekitar 6,20 persen. Angka ini cenderung menurun selama 3 tahun berikutnya. Sementara persentase yang diterima kelompok penduduk terkaya (kuantil 5) berfluktuatif dengan cenderung menurun. Bila pada tahun 2015, kelompok penduduk ini masih menikmati 50,26 persen, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 48,88 persen.
- b. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada kuantil 1-3 lebih besar daripada kelompok bukan makanan. Sebaliknya, pada kelompok kuantil 4 dan 5 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan lebih kecil daripada kelompok bukan makanan. Pengeluaran perkapita untuk kelompok bukan makanan terlihat sekali kesenjangannya, pada kuantil 1 di perkotaan dengan rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 155.456 rupiah sedangkan pada kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah. Sama halnya di daerah perdesaan untuk kuantil 1 rata-rata pengeluaran bukan makanan perkapita sebesar 128.171 rupiah dan kuantil 5 sebesar 2.231.437 rupiah.
- 2.a. Hasil penghitungan angka Gini Rasio tahun 2015-2019 menunjukkan adanya fluktuasi ketimpangan di D.I. Yogyakarta dengan tren yang menurun. Pada tahun 2015, angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,433. Pada tahun 2017 Gini Rasio turun menjadi 0,432, dan pada tahun 2019 Gini Rasio D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 0,423. Ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia, terlihat juga adanya ketimpangan yang menurun pada periode 2015-2019 di D.I. Yogyakarta. Disamping itu terlihat pula kecenderungan semakin meningkatnya persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah. Pada tahun 2015, Indeks Palma di D.I. Yogyakarta sebesar 2,345. Hal tersebut berarti bahwa pangsa pengeluaran untuk 10 persen penduduk terkaya adalah sebesar 2,345 kali lebih tinggi daripada konsumsi yang dilakukan oleh 40 persen penduduk terbawah. Disamping itu juga terjadi penurunan disparitas antara pengeluaran 10 persen penduduk terkaya dengan pengeluaran 40 persen penduduk terbawah di D.I. Yogyakarta.

- b. Berdasarkan pengukuran tingkat ketimpangan dengan menggunakan angka gini rasio ukuran Bank Dunia maupun Indeks Palma, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tingkat ketimpangan yang tinggi di wilayah perkotaan tersebut nampaknya merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta secara keseluruhan.
- 3.a. Pada periode 2017-2019, ada 3 kabupaten/kota dengan Gini Rasio terus mengalami penurunan. Ketiga Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman cukup fluktuatif, walaupun pada tahun 2019 juga menurun dibandingkan tahun 2018.
- b. Berdasarkan kriteria Bank Dunia Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan kabupaten dengan tingkat kesenjangan dalam kategori rendah, sedangkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2019 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Kabupaten Bantul pada tahun 2019 memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
- c. Pengukuran dengan tiga indikator kesenjangan yang dipergunakan, terlihat bahwa untuk daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris (Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul) tingkat kesenjangan relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak non-agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta).
- 4.a. Dari hasil Susenas 2019, terlihat bahwa tingkat pendidikan kelompok pengeluaran terendah jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk kelompok pengeluaran tertinggi. Lebih dari separuh penduduk dari kelompok pengeluaran terendah hanya mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh separuh penduduk kelompok pengeluaran tertinggi adalah SLTA ke atas. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran terendah bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu, pada saat yang sama sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran tertinggi bekerja pada sektor Jasa.
- b. Terdapat tiga indikator yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta yaitu besarnya investasi pada tingkat kabupaten/kota, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan produktivitas tenaga kerja.
5. Covid-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Sakernas Agustus 2020 dapat dijelaskan bahwa penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan pengurangan jam kerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai 88,09 persen dan sisanya 11,91 persen tidak terkait Covid-19. Penduduk 15 tahun ke atas yang

berhenti bekerja mulai Maret 2020 terkait Covid-19 mencapai 68,45 persen dan sisanya 31,55 persen tidak terkait dengan Covid-19. Selanjutnya penduduk yang memilih status sementara tidak bekerja dengan alasan terkait Covid-19 mencapai lebih dari separuh (54,68 persen) dan sisanya sebanyak 45,32 persen dengan alasan tidak terkait Covid-19 (cuti, sakit, aturan waktu kerja, cuaca, dll). Jika kondisi ketenagakerjaan ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pekerja dengan kelompok pendapatan terbawah lebih tajam dibandingkan pelaku usaha yang relatif dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

- 6.a. Pola searah yang cenderung menurun pada persentase penduduk miskin, indeks Gini, dan indeks Palma pada periode 2015-2019. Pada tahun 2016, ketika persentase penduduk miskin turun dari 14,91 persen menjadi 13,34 persen terlihat bahwa indeks Palma dan indeks Gini juga mengalami penurunan, masing-masing secara berurutan dari 2,345 dan 0,433 menjadi 2,047 dan 0,420.
- b. Nilai pengeluaran konsumsi makanan bagi kelompok penduduk miskin dan penduduk tidak miskin di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat perbedaan yang cukup besar dalam semua jenis konsumsi makanan. Perbedaan pengeluaran yang terbesar secara rata-rata untuk kelompok tidak miskin dibandingkan kelompok miskin adalah makanan hewani (ikan, daging, telur dan susu). Secara proporsional pengeluaran konsumsi makanan pada kelompok penduduk miskin lebih mengumpul pada kelompok padi-padian dan umbi-umbian yang mencapai sekitar 44 persen. Perbedaan nilai pengeluaran juga terjadi pada setiap kelompok pengeluaran bukan makanan yang ada.

6.2. Saran

Dari kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu memfokuskan sasaran kebijakan yang tepat yakni memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses modal dan kesempatan kerja (mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi kepada masyarakat menengah ke bawah, seperti UMKM yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Meningkatkan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan.

2. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya.
3. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar dan program “bapak asuh”.
4. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatarbelakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.
5. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program jaminan sosial yang ada. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.
6. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (budaya Yogyakarta). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Asian Development Bank, 2010, *Key Indicators for Asia and the Pacific*. Asian Development Bank: Mandaluyong City, Philippines.
- Boediono. 2002. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. Yogyakarta : BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2010-2020). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2015 - 2019*. Bantul, BPS Provinsi DIY
- Bourguignon, Francois, 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Work paper presented at the Indian Council for Research on International Economic Realties. New Delhi
- Cobham, Alex., Schlogl , Luke., Sumner, Andy ., 2015, *Inequality and the Tails: The Palma Proposition and Ratio Revisited*, UNDESA Working Paper 143. New York, UN Department of Economic & Social Affairs
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Ehrenberg, Ronald G, & Smith, Robert S. (2003). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.
- Haughton, Jonathan, Khandker, Shahidur R., 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC, The World bank
- Klasen, Stephen, 2010, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series, Mandaluyong City, Philippines.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022*, Yogyakarta.
- Perkins, Dwight H., Radelet, Steven C., Lindauer, David L., 2006. *Economics of Development (Sixth Edition)*. New York, W.W Norton
- Prasetyo, Eko, 2008, *The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*, JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008.
- Prastowo, Yustinus, dkk., 2014. *Ketimpangan Pembangunan di Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta, infid
- The Palma, <http://uncounted.org/palma/>. Kunjungan pada tanggal 27 September 2017

Todaro, Michael,P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2015, *Economic Development 12th Edition*, Addison Wesley, London.

World Bank, 2015. *Indonesia's Rising Divide; Executive Summary*. Jakarta, The World Bank Office Jakarta.

PERSENTASE PENDUDUK YANG RAWAT JALAN MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN QUINTIL DAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN, TAHUN 2019



Praktik Pengobatan tradisional/alternatif

UKBM

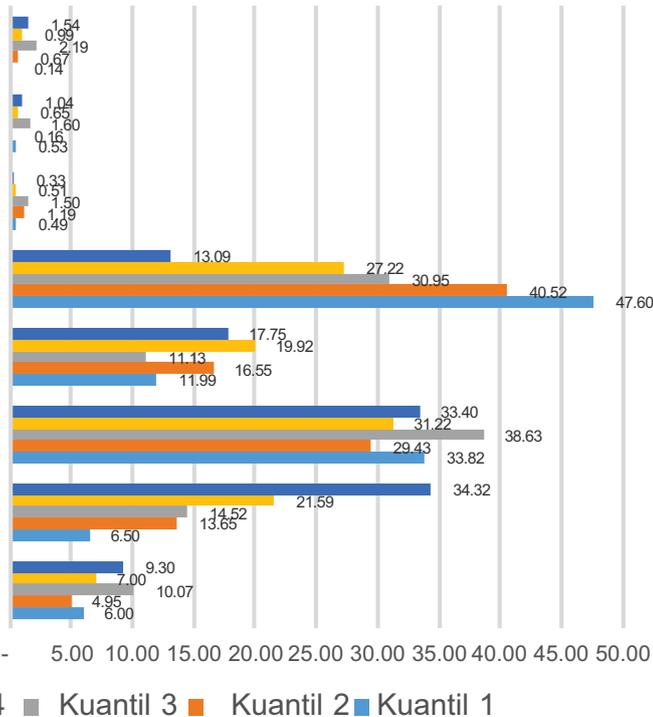
Puskesmas/pustu

klinik/ praktik dokter bersama

Praktik dokter/ bidan

RS swasta

RS Pemerintah



PERSENTASE PENDUDUK YANG INAP MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN QUINTIL DAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN, TAHUN 2019



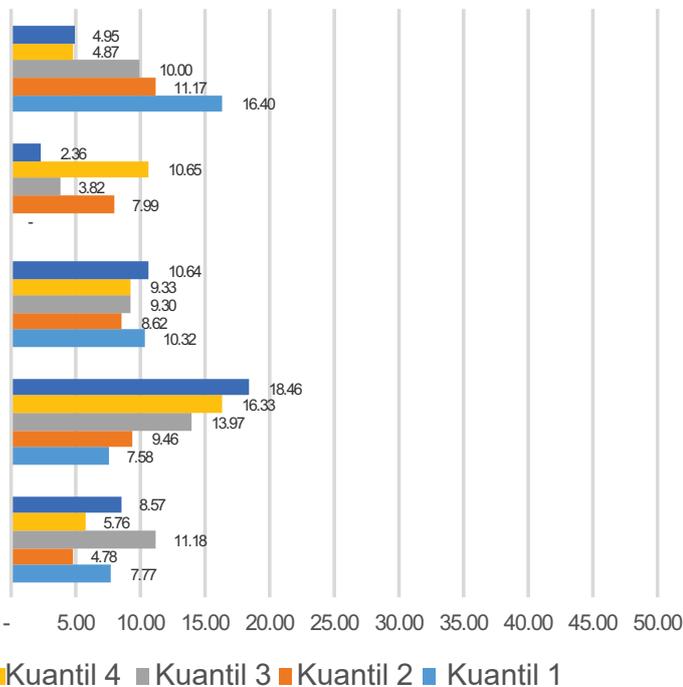
Puskesmas/pustu

klinik/ praktik dokter bersama

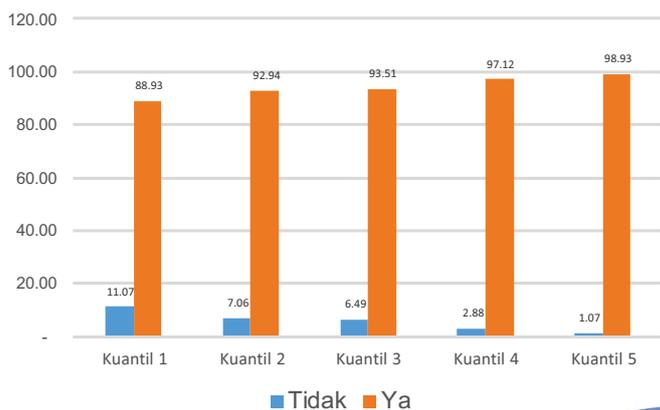
Praktik dokter/ bidan

RS swasta

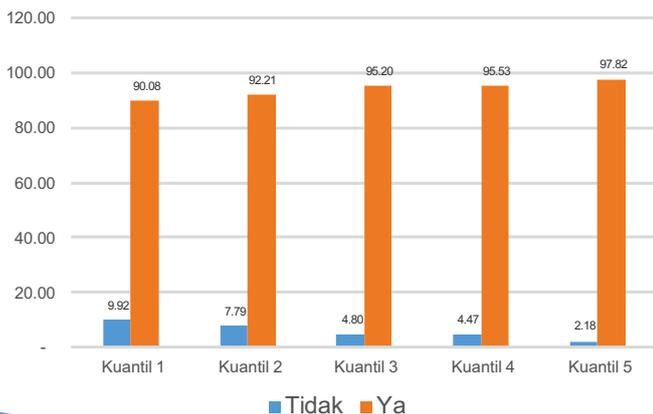
RS Pemerintah



PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN KUINTIL DAN PENGGUNAAN AIR LAYAK DI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019



PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN QUINTIL DAN KONDISI SANITASI LAYAK DI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019



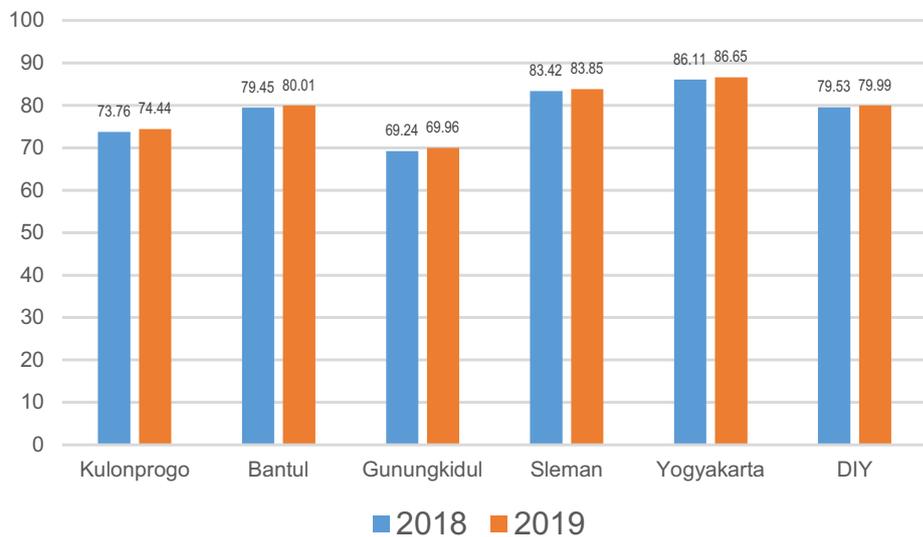
DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK D.I. YOGYAKARTA, MARET 2015 – 2019 (PERSEN)



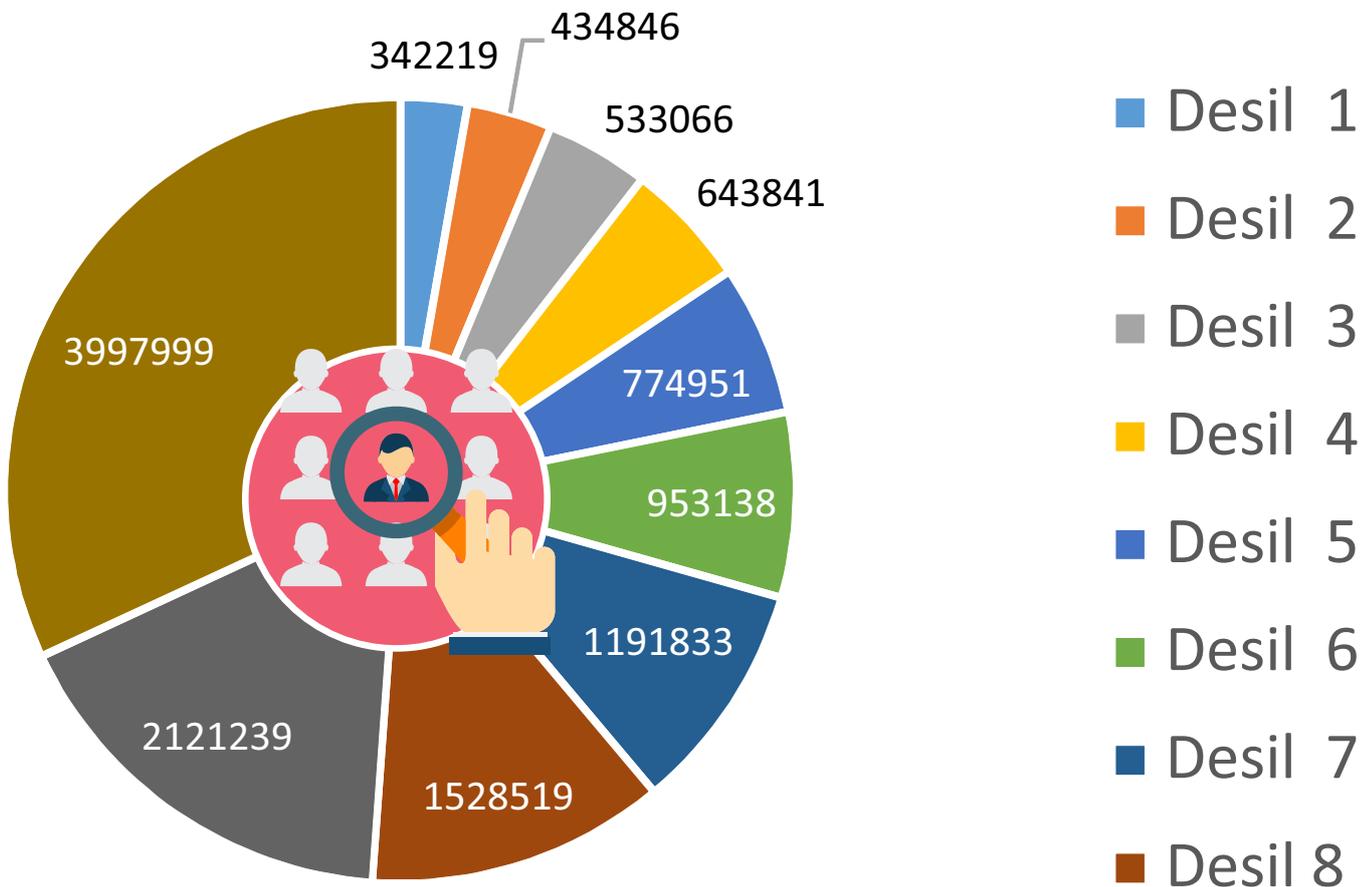
PERKEMBANGAN GINI RASIO D.I. YOGYAKARTA DAN INDONESIA MARET 2015 – MARET 2019



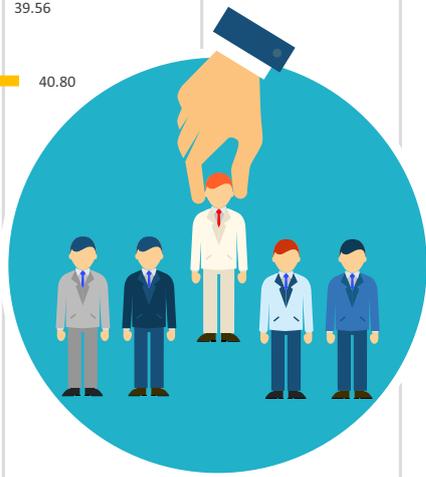
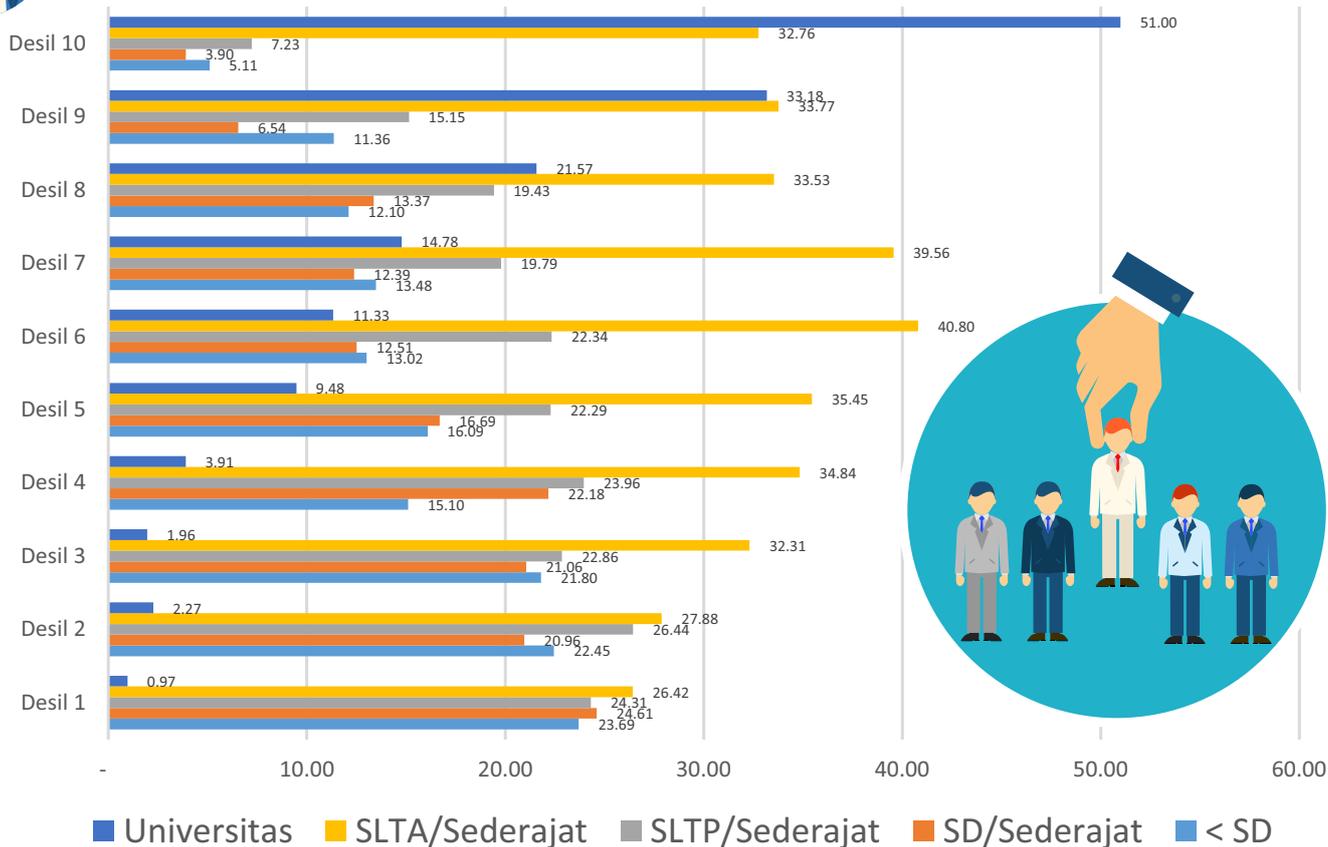
IPM MENURUT KABUPATEN/KOTA DI D.I. YOGYAKARTA, 2018-2019



PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT KELOMPOK DESIL DI D.I. YOGYAKARTA, TAHUN 2019

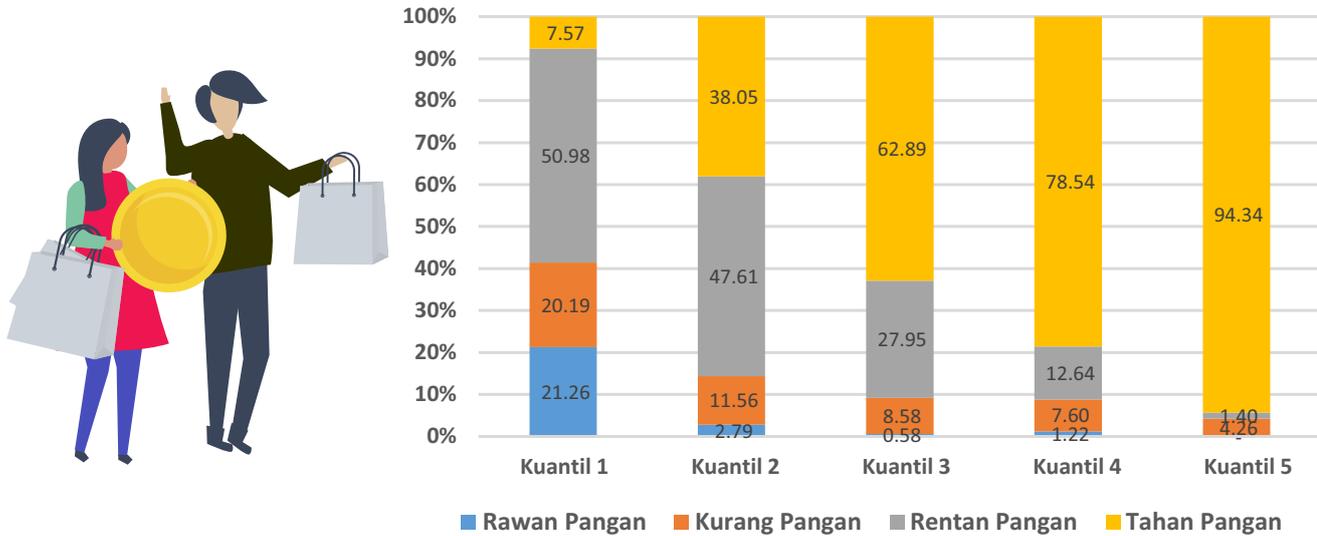


PERSENTASE PENDUDUK MENURUT DESIL KELOMPOK PENGELUARAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN DI D.I. YOGYAKARTA, TAHUN 2019

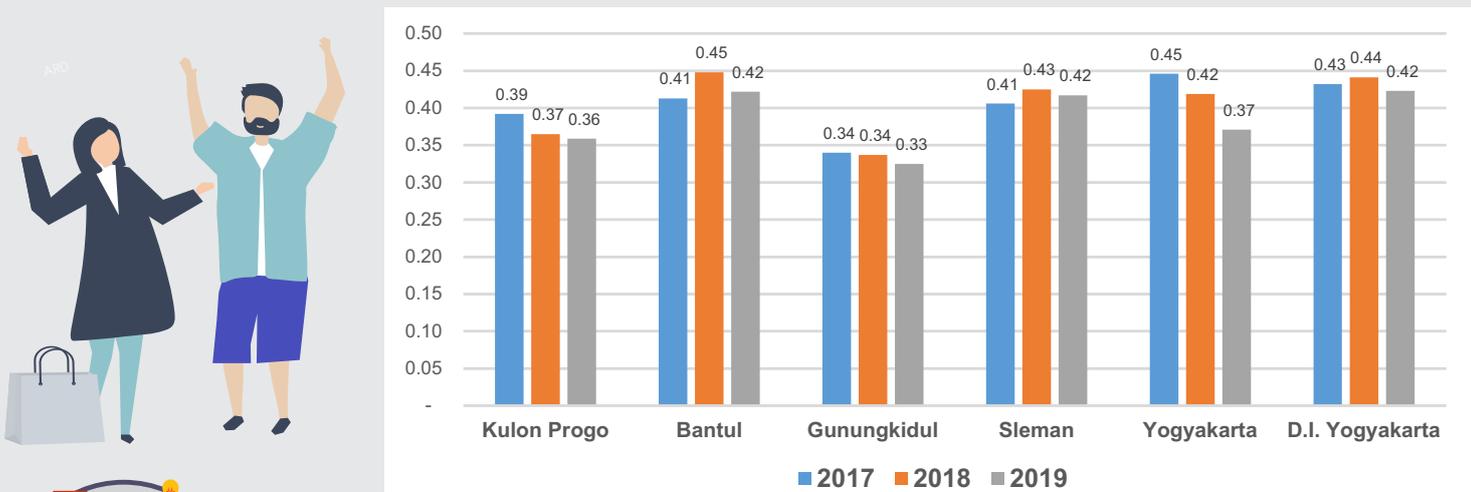


KETIMPANGAN DI D.I. YOGYAKARTA

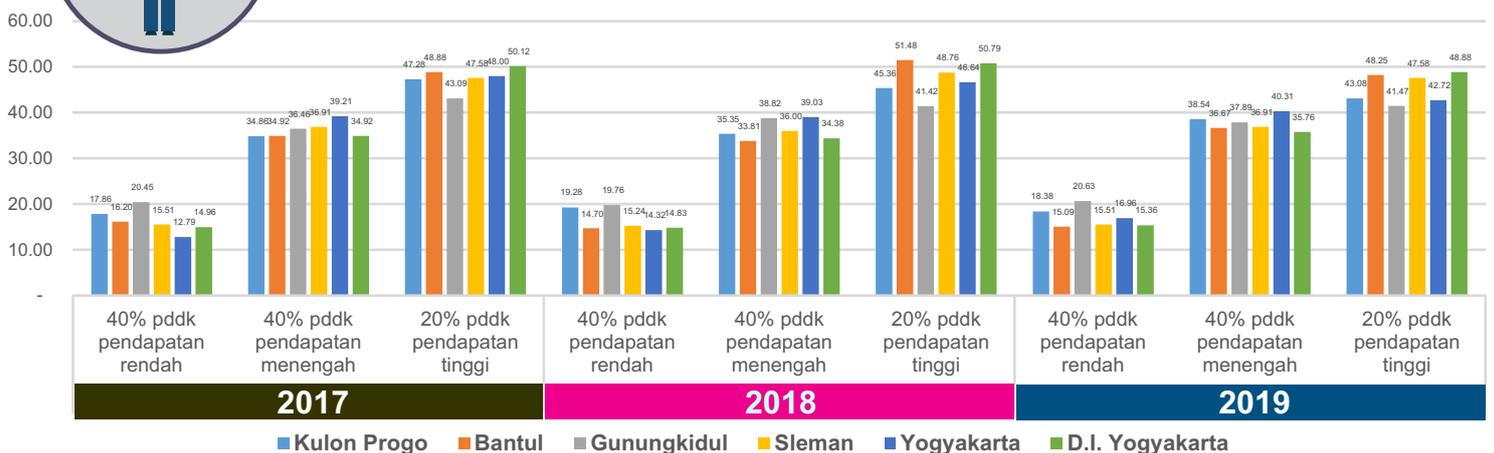
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN KUANTIL DAN DERAJAT KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019



GINI RASIO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2017 -2019



PERSENTASE PENGELUARAN OLEH PENDUDUK MENURUT KRITERIA BANK DUNIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2017-2019

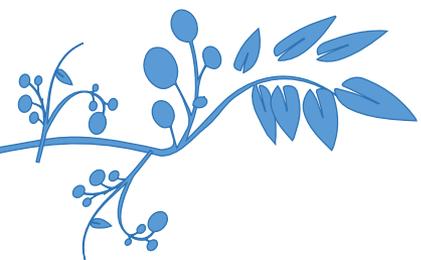


LAMPIRAN

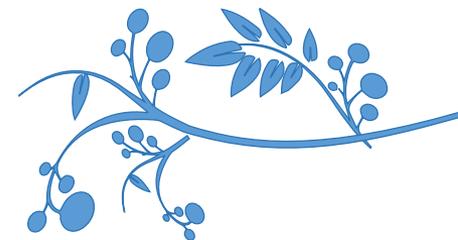
Perubahan Jumlah Penduduk Menurut Desil Pengeluaran

Persentase Perubahan Penduduk Selama Setahun (2018-2019) Menurut Desil Kab dan Provinsi di Kabupaten Kulonprogo

Kelompok Desil Kab/Kota	Desil Provinsi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,54									
2	-7,19	178,22								
3		0,33								
4		-48,08	87,91							
5			-58,58							
6				-35,15						
7				-100,00	-29,30					
8						-49,53	312,33			
9							-6,84	47,19		
10								34,30	-23,26	2,02



Perubahan Jumlah Penduduk Menurut Desil Pengeluaran



Persentase Perubahan Penduduk Selama Setahun (2018-2019) Menurut Desil Kab dan Provinsi di Kabupaten Bantul

Kelompok Desil Kab/Kota	Desil Provinsi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2,14									
2	-4,88	3,04								
3		-35,30	53,72							
4			3,98	0,32						
5				-30,74	43,50					
6					-37,79	50,98				
7						-88,67	92,67			
8							-100,00	24,01		
9								21,94	-5,65	
10									-41,31	12,06



Perubahan Jumlah Penduduk Menurut Desil Pengeluaran



Persentase Perubahan Penduduk Selama Setahun (2018-2019) Menurut Desil Kab dan Provinsi di Kabupaten Gunung Kidul

Kelompok Desil Kab/Kota	Desil Provinsi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0									
2	24	-22								
3		60	-100							
4			-30							
5			234	-78						
6				201	-100					
7					237	-100				
8						78	-100			
9							32	-98		
10								27	-19	-40

